



UNIVERSITAS INDONESIA



**PENGARUH KONFLIK INTERNAL TAHUN 1975-1990
TERHADAP SISTEM KONFESIONALISME
DALAM PEMERINTAHAN LEBANON**

SKRIPSI

RAGIL BAGUS SWASONO

0606087864

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

PROGRAM STUDI ARAB

DEPOK

DESEMBER 2010



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH KONFLIK INTERNAL TAHUN 1975-1990
TERHADAP SISTEM KONFESIONALISME
DALAM PEMERINTAHAN LEBANON**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

RAGIL BAGUS SWASONO

0606087864

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA

PROGRAM STUDI ARAB

DEPOK

DESEMBER 2010

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, Desember 2010



Ragil Bagus Swasono



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ragil Bagus Swasono

NPM : 0606087864

Tanda Tangan :

Tanggal : 29 Desember 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Ragil Bagus Swasono

NPM : 0606087864

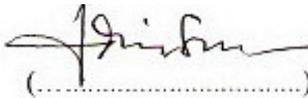
Program Studi : Sastra Arab

Judul : Pengaruh Konflik Internal Tahun 1975-1990
Terhadap Sistem Konfesionalisme
dalam Pemerintahan Lebanon

Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Arab, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

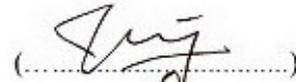
DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Apipudin, M. Hum.



(.....)

Penguji : Yon Machmudi, Ph.D.



(.....)

Penguji : Juhdi Syarif, M.Hum.

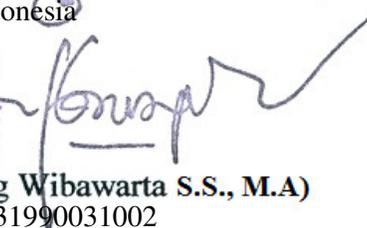


(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 29 Desember 2010

Oleh
Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia



(Dr. Bambang Wibawarta S.S., M.A)
NIP: 196510231990031002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda besar Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wa Salam*, keluarga, para sahabat, dan umatnya yang istiqomah di jalan-Nya hingga hari perhitungan kelak.

Penulisan skripsi “Pengaruh Konflik Internal Tahun 1975-1990 Terhadap Sistem Konfesionalisme dalam Pemerintahan Lebanon” dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora jurusan Sastra Arab pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah tidak mudah bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang telah mencurahkan doa, cinta dan kasih sayang yang tidak akan pernah terbalas sepanjang masa. Serta kedua kakak penulis, Bondan dan Bobi, yang selalu menjadi inspirasi penulis untuk menjadi orang yang sukses.
2. Dr. Apipudin, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, keringat dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Para dosen Program Studi Arab yang tanpa henti memberikan ilmunya kepada penulis saat menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Afdol Tharik Wastono, M.Hum selaku koordinator Program studi Arab FIB UI, Juhdi Syarif, M.Hum, Suranta, M.Hum, Yon Mahmudi, Ph.D, Dr. Abdul Muta'ali, Aselih Asmawi, S.S, Dr. Basuni Imamuddin, M.A, Dr. Fauzan Muslim, M.Hum, Letmiros M.Hum, Dr. Maman Lesmana, Minal Aidin A. Rahiem S.S, Ade Shalihat, M.A, Siti Rohmah Soekarba, M.Hum, dan Wiwin Tri Winarti, M.Hum.
4. Seluruh petugas Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya (FIB UI), Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional (UNAS), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), telah

membantu penulis dalam menyediakan fasilitas maupun sumber dan data, terkait dengan bahasan skripsi penulis. Tak lupa juga petugas Sub-Bag FIB.

5. Ielmy Restina, atas semangat dan dukungan tak kenal henti yang selalu diberikan ketika penulis berjuang sepanjang hari untuk menyelesaikan skripsi ini.

Thanks so much!

6. Teman kumpul, kongko, bermain, “kopdar” bersama di “markas rakyat sahabat” dan tempat-tempat lainnya, Aldi, Berlin, Justanto, Damar, Adi, dan Tisha (semoga kelak penerus kita dapat melanjutkan persahabatan ini kawan)

7. Teman-teman sepermainan SD, Agung SH, Riswandani, dan kawan-kawan lainnya (semoga kita dapat bertemu kembali ditempat yang sama). Teman-teman sepermainan Bogor, Uwi, Idris, Ari, Dewit, Rasyid, Iya, Alm Kiki (kenangan bahagia di lapangan sepakbola dan masjid Cipaku Perumda tak akan pernah penulis lupakan).

8. “Bung” Romika Junaedi, S.Hum yang menjadi teman wara wiri dan canda tawa penulis selama mengarungi lika liku dunia kampus. Khaidir, S.Hum selaku penerang perkuliahan sastra Arab bagi penulis dan teman-teman lainnya. Ahmad Zikri, S.Hum atas tempat singgah *nomaden*-nya. Mardi, S.Hum atas pinjaman motor dan kesan-kesannya selama ini di perkuliahan Sastra Arab. Ajeng, S.Hum, S.Sos atas bantuan tukar pikiran dalam mengejar deadline. Bram dan Ramadhini yang membantu dan menyemangati penulis saat menjalani sidang.

9. Teman-teman S.Arab angkatan 2006: Adi, Tegar, Zulham, Didit, Fakhruhin, Sugiho, Subhan, Dafi, Salman, Tifa, Dita, Icha, Romi, Sakti, Santi, Annisa, Dimas, Puput dan teman-teman S.Arab lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Tidak lupa pula untuk seluruh anggota IKABA (Ikatan Keluarga Asia Barat- Sastra Arab).

Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja dalam proses penulisan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini menjadi ilmu yang berguna bagi kita semua. Terima kasih.

Depok, 29 Desember 2010



Ragil Bagus Swasono

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ragil Bagus Swasono

NPM : 0606087864

Program Studi : Arab

Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Pengaruh Konflik Internal Tahun 1975-1990 Terhadap Sistem Konfesionalisme dalam Pemerintahan Lebanon” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non- eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 29 Desember 2010

Yang menyatakan



(Ragil Bagus Swasono)



*Skripsi ini saya persembahkan
untuk kedua orangtua tercinta
dan orang-orang tersayang*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Kajian Terdahulu	6
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penulisan	7
1.7 Metode Penelitian	8
1.8 Landasan Teori	9
1.9 Sistematika Penulisan	12
BAB 2 TINJAUAN UMUM NEGARA LEBANON	
2.1 Kondisi Lebanon Sebelum Kemerdekaan	14
2.1.1 Era Pra Islam dan Masa Kekhalifahan	14
2.1.2 LebanonRaya	25
2.2 Kondisi Lebanon Pasca Kemerdekaan	30
2.2.1 Keadaan Geografi	33
2.2.2 Keadaan Sosial Budaya	33
2.2.3 Keadaan Ekonomi	34
2.2.4 Keadaan Politik	35

BAB 3 KONFLIK SIPIL LEBANON 1975-1990

3.1 Latarbelakang Konflik	37
3.2 Konflik Sipil 1975-1990	45
3.3 Keterlibatan Suriah dan Israel	49
3.4 Perdamaian	55

**BAB 4 PENGARUH KONFLIK SIPIL TERHADAP
SISTEM POLITIK LEBANON**

4.1 Bentuk Pemerintahan Sebelum Konflik	59
4.2 Bentuk Pemerintahan Setelah Konflik	66
4.3 Analisis Perubahan Sistem Politik Konfesionalisme	71

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	----

LAMPIRAN	85
-----------------------	----

GLOSARI	99
----------------------	----

INDEX	103
--------------------	-----

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan transliterasi huruf Arab yang disesuaikan dengan Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 dan No. 0543-6/U/1987. Transliterasi Arab-Latin tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓai	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍaḍ	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭaṭ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- َ ---	Fathah	A	A
--- ِ ---	Kasrah	I	I
--- ُ ---	Dammah	U	U

Contoh:

دَرَسَ : darasa

كُتِبَ : kutiba

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Tanda dan Huruf	Nama
يَ- ---	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ- ---	fathah dan ya	Au	a dan u

Contoh:

سَوْفَ : saufa

بَيْنَ : baina

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ - - - ي	fathah & alif atau ya	Ā	a & garis di atas
إ - - ي	kasrah & ya	Ī	i & garis di atas
و - - ي	damah & ya	Ū	u & garis di atas

Contoh:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : qālā rasūlullāhu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada tiga, yaitu:

1. *Ta Marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan damah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Jika pada kata terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

الطَّالِبَةُ الْجَدِيدَةُ : aṭ- Ṭālibah al-Jadīdah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang di beri tanda *syaddah* itu.

Contoh:

فَعَّلَ : fa''ala

فَرَّحَ : farraha

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah atau kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الطَّالِبُ : at- Ṭālibu النُّورُ : an-Nūr

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَيْتُ : al-Baitu الْيَوْمُ : al-Yaumu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

سَمَاءُ : samā'un أَخَذَ : akhaḏa

ABSTRAK

Nama : Ragil Bagus Swasono
Program Studi : Sastra Arab
Judul : Pengaruh Konflik Internal Tahun 1975-1990
Terhadap Sistem Konfesionalisme
dalam Pemerintahan Lebanon

Skripsi ini membahas mengenai peristiwa konflik sipil 1975-1990 yang terjadi pada masyarakat Kristen dan Muslim di Lebanon. Konflik tersebut membawa dampak pada sistem politik Konfesionalisme yang menjadi dasar pemerintahan Lebanon. Maka yang menjadi pertanyaan penulis adalah kenapa terjadi konflik internal Lebanon 1975-1990, lalu bagaimana konflik tersebut terjadi dari tahun 1975-1990, kemudian yang terakhir adalah dampak dari konflik. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yang berusaha untuk memaparkan, menjelaskan serta menganalisa data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*Library Research*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kronologis dari peristiwa konflik internal Lebanon pada tahun 1975 sampai 1990, serta bagaimana konflik tersebut dapat merubah sistem Konfesionalisme yang ada di Lebanon pasca diberlakukannya gencatan senjata melalui *Taif Agreement*. Temuan dari penelitian ini adalah pertama, konflik terjadi akibat masalah pembagian kekuasaan, kesenjangan sosial-ekonomi antar kaum Kristen dengan Muslim yang dimulai sejak era kekhalifahan Ottoman, kedatangan para pengungsi Palestina yang menambah struktur demografis, dan terakhir keterlibatan pihak-pihak asing dalam perang terbuka maupun pemerintahan. Kedua, konflik yang terjadi selama 15 tahun terjadi karena bentrokan kaum Muslim dengan Kristen melalui organisasi militernya yang memiliki perbedaan kepentingan. Ketiga, *Taif Agreement* terbukti berhasil mengakhiri konflik sipil dengan mengubah dan mengesahkan konstitusi sebelumnya melalui Pakta Nasional, serta memulihkan keadaan sosial ekonomi Lebanon.

Kata kunci:

Konflik Sipil, 1975-1990, Konfesionalisme, *Taif Agreement*, Pakta Nasional, Lebanon

ABSTRACT

Name : Ragil Bagus Swasono
Study Program : Arabic
Title : The Influence of Internal Conflict Year 1975-1990
Against Confessionalism System
in Lebanon Government

The research discussed about the Civil Conflict 1975-1990 incidents that occurred by Christian and Moslem society in Lebanon. This conflict brings impact to the Confessionalism political system which is the base of Lebanon's Government. So what becomes the author question is why the internal conflict happened in Lebanon by 1975-1990, then how this conflict occurred on 1975-1990, last but not least the impact of this conflict. Research method used by the author is qualitative descriptive method, which explains, clarifies and analyses the data that author gathered through the Library Research technique. The objective of this study is to understand the chronologies from the Lebanon internal conflicts occurred from 1975 to 1990, and how was the conflict changed the Confessionalism system that existed in Lebanon after the reconciliation through Taif Agreement. The conclusions from this research are first, conflicts happened because power sharing problem, social-economy discrepancy between Christian and Muslim since Ottoman era, arrivals of Palestinian refugees that increase the demographic structure in Lebanon, and last was outsider country involvement not only in open war but also inside government. Second, the 15 years conflicts was happened because importance disparity from Christian and Muslim military organizations. Third, Taif Agreement successfully proven to ended the civil conflict by altering and legitimizes previous Lebanon constitution from National Pact, and recovering Lebanon's social economy condition.

Keywords:

Conflict Civil, 1975-1990, Confessionalism, Taif Agreement, National Pact, Lebanon.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lebanon, negara yang lepas dari Dinasti Ottoman setelah menjadi bagiannya hampir selama 400 tahun, merupakan negara yang selain kaya akan keanekaragaman hayati juga memiliki kekayaan akan budaya. Posisi Lebanon yang terletak di titik pertemuan tiga benua (Asia, Afrika, dan Eropa) membuat Lebanon menjadi titik temu dari berbagai peradaban. Melalui peradaban yang silih berganti, kaum beragama terbagi-bagi menjadi golongan sektarian.¹

Lebanon menerapkan sebuah sistem tatanan pemerintahan khusus, yang dikenal sebagai Konfesionalisme², yaitu sebuah tatanan pemerintahan yang mengedepankan sebuah kesamarataan berpolitik dan kekuasaan diantara komunitas beragama. Sistem pemerintahan ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin suara dari para politisi sektarian sehingga distribusi kekuasaan dalam pemerintah dapat diberikan secara adil dan bijaksana kepada anggota-anggota kelompok keagamaan dan konflik kepentingan antar kaum mampu diminimalisir.³

Sistem Konfesionalisme lahir dari sebuah Pakta Nasional tidak tertulis tahun 1943. Setelah merdeka dari Perancis⁴ dilaksanakan pemilihan umum Lebanon, menetapkan Bishara Al-Khuri, seorang Kristen Maronit, menjabat menjadi presiden dan memilih Riyadh Al-Sulh dari golongan Muslim Sunni

¹ http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7583757.stm (Diakses pada tanggal 11 Januari 2010).

² *Konfesionalisme* berasal dari kata *Confessionalism* yang menurut terminologinya adalah sebuah sistem pemerintahan yang mengalokasikan kekuasaan politiknya berdasarkan komunitas – baik etnik ataupun keagamaan- berdasarkan presentase populasi. Konfesionalisme merupakan cabang dari sistim Konsosionalisme atau *Consociationalism*, sebuah sistim yang pemerintahan berdasarkan keberagaman sosial. Sistim ini lahir di Belanda pada tahun 1950an oleh Arend Lijphart. Lihat, <http://www.balkananalysis.com/2004/02/17/problems-of-consociationalism-from-the-netherlands-to-macedonia/> (diakses pada 30 Januari 2010)

³ Charles Winslow, *Lebanon War & Politics In A Fragmented Society*, London: Routledge, 1996, hlm. 80.

⁴ Perancis merupakan sebuah negara penjamin pemerintahan Lebanon dan Suriah kala itu. Dalam menjalankan aksinya, mengaku sebagai negara pelindung kaum Maronit, perancis memiliki tujuan utama yaitu dari segi kepentingan militer. Posisi strategis Lebanon dan Suriah sangat menguntungkan Perancis dalam menghalau sepak terjang dari Inggris saat perang dunia I. Ironisnya rakyat Lebanon dan Suriah justru menderita akibat aksi Perancis sebagai negara pelindung. Lihat, William L Cleveland dan Martin Burton, *a History of the Modern Middle East 3rd ed*, Oxford: Westview Press, 2004, hlm. 217-218.

menjadi perdana menteri.⁵ Kedua orang tersebut membuat sebuah perjanjian tidak tertulis terkait dengan kondisi demografis sektarian Lebanon. Meskipun dengan jumlah representasi kaum Kristen yang lebih banyak, karena didasarkan sensus penduduk tahun 1932.⁶

Pakta Nasional, juga membahas status Lebanon yang menjadi sebuah negara yang berdaulat tanpa ikatan dengan negara tertentu, dan dengan kebijakan luar negeri yang tetap sebagai bangsa Arab. Hasil tersebut merupakan jawaban dari kaum Kristen Maronit terhadap ketakutannya, apabila kelak Lebanon akan terbawa menjadi sebuah negara murni Arab-Islam. Sedangkan di pihak lain, kaum Muslim merasa puas karena Lebanon menyatakan memiliki identitas sebagai bangsa Arab.⁷ Melalui Pakta Nasional lembaga eksekutif dipilih berdasarkan keterwakilan kaum, Presiden dari kaum Kristen Maronit, Perdana Menteri seorang Muslim Sunni, Ketua Dewan Parlemen dari seorang Muslim Syi'ah.⁸

Sayangnya dengan representasi kekuasaan politik Lebanon yang terlalu memihak Kristen Maronit menimbulkan kesenjangan politik dan sosial. Kaum Muslim merasa menjadi kaum yang terpinggirkan oleh dominasi kaum Kristen maronit mulai sejak era kekhalifahan Ottoman. Dengan kondisi pemerintahan yang tidak adil, mulai muncul usaha-usaha untuk memberontak. Terlebih lagi dengan kehadiran para imigran Palestina di tanah Lebanon akibat dari konflik Arab-Israel. Kaum Kristen Maronit merasa kehadiran dari para imigran Palestina akan mengganggu jalannya pemerintahan di Lebanon, dan menyeret Lebanon dalam perang berkelanjutan antara Palestina dan Israel.⁹ Kedatangan para milisi Palestina yang membangun basis militer di selatan perbatasan Lebanon didasari dari perjanjian di Kairo pada tahun 1969, yang menyatakan bahwa pemerintah Lebanon akan mengizinkan wilayahnya di bagian selatan digunakan demi

⁵ William L Cleveland dan Martin Burton, *Loc. Cit.*, hlm. 225.

⁶ *Ibid.*

⁷ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 77.

⁸ Badredine Arfi, *International Change and the Stability of Multiethnic States: Yugoslavia, Lebanon and Crises of Governance*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2005, hlm. 190.

⁹ Edwards-Milton, Beverley, *Conflicts in The Middle East since 1945 2nd edition*, London: Routledge, 2002, hlm. 66.

kepentingan pengungsi Palestina,¹⁰ serta mengizinkan pihak PLO¹¹ untuk mempertahankan atau melindungi diri dari berbagai serangan.

Pemerintah Lebanon pada mulanya berusaha tidak terlibat dalam konfrontasi antara pihak milisi Palestina dengan Israel, akan tetapi melalui desakan Dunia Arab¹² dan anggota parlemen Muslim, menginginkan agar Lebanon untuk turut serta berperan aktif memecahkan persoalan yang sedang dihadapi Palestina. Pada akhirnya atas desakan tersebut, pemerintah Lebanon tidak dapat mencegah milisi Palestina yang menggunakan perbukitan di batas wilayah bagian selatan Lebanon untuk meluncurkan serangan terhadap Israel.¹³

Kedatangan pengungsi Palestina mengakibatkan gerakan yang menyangkut atas semua kepentingan parlemen Lebanon, keputusan parlemen yang sebagian besar terdiri dari kaum Muslim dan Kristen, terpecah menjadi dua kubu. Di pihak parlemen Kristen ingin agar pemerintah Lebanon lebih memfokuskan penyelesaian masalah dalam negerinya¹⁴ dengan mengorbankan permasalahan Palestina-Israel. Di pihak lain yaitu parlemen Muslim, menginginkan agar pemerintah Lebanon untuk mengedepankan penyelesaian konflik antar Palestina-Israel, karena konflik tersebut telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan infrastruktur tempat tinggal bagi kaum Muslim. Konflik kepentingan kemudian menjurus kepada perpecahan yang berkelanjutan, dengan semakin runtuhnya pemerintahan, tidak bersatunya militer, dan semakin menyebarnya

¹⁰ Kail C.E, *Lebanon's Second Republic Prospects for the Twenty-first Century*, Florida: University Press, 2002, hlm. 29.

¹¹ PLO merupakan Organisasi Pembebasan Palestina yang terbentuk pada tahun 1964, organisasi ini merupakan organisasi yang diakui secara sah oleh Liga Arab bahkan Israel untuk mewakili gerakan rakyat Palestina. Gerakan ini didirikan untuk membatasi kegiatan perlawanan milisi Palestina dan mencegah gerakan dari rakyat Palestina dalam beroperasi secara bebas sehingga mencegah konflik yang berkelanjutan. Lihat, William L Cleveland dan Martin Burton, *Op. Cit.*, hlm. 358-359.

¹² Penyerangan terhadap Bandara Udara Internasional di Beirut pada tahun 1968 serta pembunuhan tiga orang pemimpin Palestina pada tahun 1973 di Beirut oleh pasukan Israel merupakan kulminasi dari serangan-serangan pasukan Israel secara sepihak, sehingga memicu perhatian dari para nasionalis di Lebanon maupun Dunia Arab. Lihat Edward-Milton, *Op. Cit.*, hlm. 66.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pada awal tahun 1970, hampir sekitar 500.000 kepala keluarga keluarga di wilayah pinggiran Beirut dilanda kemiskinan. Rata-rata diantara mereka merupakan pengungsi akibat dari konflik Palestina-Israel, dan para pengungsi yang terpaksa harus meninggalkan daerahnya karena pemerintah tidak lagi mendanai irigasi dan jasa transportasi yang diperlukan untuk kepentingan pertanian dan perdagangan. Lihat, William L Cleveland dan Martin Burton, *Op. Cit.*, hlm. 383-384

konflik, yang berakibat pada munculnya realitas sosial dan ideologi antara Kristen melawan Muslim.¹⁵

Keberadaan milisi Palestina dan perselisihan Arab-Israel yang berkelanjutan, menimbulkan konflik kepentingan diantara teritorium 3 negara yaitu, Palestina, Israel, dan Lebanon. Dibawah tekanan baik dari Dunia Arab maupun anggota parlemennya sendiri untuk lebih berperan dalam konflik Israel-Palestina yang tak berkesudahan, hubungan pemerintahan yang dikuasai Muslim dan Kristen Maronit menjadi retak. Terpecah dalam berbagai cara penyelesaian konflik yang saling bersinggungan. Kaum Kristen Maronit berada dalam posisi yang bertolak belakang karena solusi militer mereka tentu saja akan melibatkan pihak non Muslim yang dalam kondisi konflik tersebut pasti akan bersinggungan dengan keberadaan kaum fanatik Sunni Syi'ah, dan tentu saja tidak akan mendapat sokongan dari petinggi Muslim Lebanon.

Konflik perang sipil tersebut turut melibatkan beberapa negara yang berusaha untuk menjadi penengah, meskipun pada akhirnya justru mempersulit gerak Lebanon untuk mengerahkan pasukan militernya guna meredam konflik internal. Peristiwa konfrontasi Arab-Israel dijadikan sebagai sebuah tameng “pasukan keamanan” bagi pihak asing untuk lebih menancapkan kekuasaannya di Lebanon, pihak tersebut antara lain seperti Suriah, Israel, Iran, Dunia Barat, dan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa). Tindakan militer dan pejabat Lebanon guna menyelesaikan konflik internal negaranya menjadi sia-sia dengan intervensi pihak asing didalamnya.¹⁶

Konflik Sipil 1975-1990 memunculkan berbagai organisasi berbasis jihad yang saling mewakili kaum beragama di Lebanon. Wilayah urban dibagi-bagi menjadi sebuah kamp perang dan pengungsian, yang masing-masing dipimpin oleh tokoh militan. Dari berbagai peristiwa yang terjadi akibat perang sipil, memunculkan berbagai perundingan, gencatan senjata, konferensi, dan usaha damai lainnya. Arab Saudi yang tahu bagaimana mengatasi konflik terutama dalam permasalahan kaum Kristen Lebanon, mencetuskan agar para dewan legislatif Lebanon berkumpul di Taif, Arab Saudi. Rumusan ini membenahi dan

¹⁵ Edwards-Milton, *Op. Cit.*

¹⁶ Ibnu Burdah, *Konflik Timur Tengah: Aktor, Isu, dan Dimensi Konflik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008, hlm. 27.

mengesahkan rumusan sebelumnya yaitu Pakta Nasional. Sehingga dari *Taif Agreement* yang mengurangi rasio perwakilan kaum Kristen Maronit, akan tercipta rasio pemberian representasi yang sama dan adil dalam kegiatan berpolitik Lebanon. Seiring dengan pembenahan sistim politik, maka diharapkan perbaikan bidang ekonomi dan sosial juga berkembang menjadi lebih baik¹⁷

1.2 Perumusan Masalah

Konflik internal Lebanon pada tahun 1975-1990 merupakan peristiwa yang secara struktural merubah tatanan pemerintahan yang ada yaitu Konfesionalisme. Konfesionalisme adalah sebuah tatanan pemerintahan yang mengedepankan sebuah kesamarataan berpolitik dan kekuasaan diantara komunitas beragama dengan tujuan untuk melindungi dan menjamin suara dari para politisi sektarian. Distribusi kekuasaan dalam pemerintah ini dapat diberikan secara adil dan bijaksana kepada anggota-anggota kelompok keagamaan, serta konflik kepentingan antar sekte mampu diminimalisir.¹⁸

Pembagian kekuasaan yang sebelumnya tidak mampu menciptakan perdamaian dirombak kembali sedemikian rupa dalam usahanya untuk menghilangkan polemik yang berkelanjutan antar umat beragama di Lebanon. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaruh dari konflik internal Lebanon yang terjadi pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1990, terhadap penerapan sistem pemerintahan Konfesionalisme di Lebanon?

1.3 Batasan Masalah

Konflik antara kaum Muslim Syi'ah dan Suni dengan kaum Kristen Maronit bukanlah perang fisik semata akan tetapi berhubungan dengan ikatan perjanjian politik yang sudah ada. Pakta Nasional yang dirumuskan secara tak resmi seakan tak mampu lagi mengatasi dan melindungi keberadaan umat beragama di Lebanon. Persaingan antar kedua umat beragama ini sangat terlihat

¹⁷ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 80.

¹⁸ *Ibid.*

jelas terutama ketika salah satu pihak umat beragama merasa kedudukannya akan terancam oleh dominasi umat beragama lain.

Konflik ini selain bersifat kompetitif, juga melibatkan pihak-pihak asing yang ikut campur dengan kepentingannya masing-masing sehingga memunculkan konflik regional disekitarnya. Usaha untuk melakukan proses perdamaian sulit dilakukan karena pihak-pihak asing terlalu gencar memasuki wilayah Lebanon dengan kepentingannya masing-masing. Pemerintahan Lebanon dibuat kesulitan karena keputusan-keputusan yang diambil haruslah menguntungkan kedua belah pihak yang bertikai, selain itu juga harus berurusan dengan kepentingan negara lain yang berada didalam wilayah Lebanon. Arab Saudi sebagai negara yang netral, berusaha menjadi penengah masalah yang berkepanjangan ini melalui *Taif Agreement*. *Taif Agreement* selain sebagai pembuka pintu gencatan senjata juga untuk meresmikan perjanjian terdahulu dengan beberapa pembenahannya yaitu Pakta Nasional.¹⁹

Dari permasalahan diatas, maka masalah yang akan diteliti dalam Skripsi ini hanya yang berkenaan dengan kenapa terjadi konflik internal Lebanon 1975-1990, lalu bagaimana konflik tersebut terjadi dari tahun 1975-1990, kemudian yang terakhir adalah dampak dari konflik.

1.4 Kajian Terdahulu

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis telah meninjau beberapa penelitian skripsi sebelumnya yang berkaitan dengan Lebanon di Universitas Indonesia. Skripsi pertama, ditulis oleh Musa Shahabuddin yang berjudul “Gerakan Hizbullah Libanon”. Skripsi ini memaparkan bagaimana gerakan Hizbullah dapat menjadi sebuah gerakan terkemuka di Timur Tengah, khususnya Lebanon. Konsistensi Hizbullah dalam menjalankan berbagai kegiatan bersenjata, sosial-kemasyarakatan, dan politik menyebabkan gerakan ini mendapat berbagai simpati dan dukungan dari masyarakat, khususnya masyarakat Syiah. Selain itu gerakan politik yang bersih dan konsisten menjadikan gerakan Hizbullah mendapatkan berbagai dukungan dari berbagai pihak. Skripsi ini mengedepankan profil dari gerakan Hizbullah dalam menghadapi agresi Israel di Lebanon.

¹⁹ *Ibid.*

Skripsi yang kedua, karya Eleine Koesyono dengan judul “Kehadiran Perancis di Libanon sebuah kajian sejarah”. Dalam skripsi ini memaparkan kondisi Libanon ketika masih berada dibawah mandat Perancis. Melalui perjanjian San Remo di Itali, dewan tertinggi sekutu menetapkan Perancis sebagai negara penjamin Libanon. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pemerintah Perancis memberlakukan kebijakan-kebijakan dan aktivitasnya di Libanon, sampai dengan berakhirnya mandat Perancis atas Libanon secara resmi.

Skripsi yang ketiga, oleh Bambang Widodo yang diberi judul “Keterlibatan Suriah dalam konflik di Libanon 1975-1976 suatu tinjauan sejarah”. Skripsi ini membahas keterlibatan Suriah dalam konflik di Libanon yang terjadi pada tahun 1975 sampai tahun 1976, serta kendala-kendala yang dihadapi Suriah di Libanon. Pembahasan dalam skripsi ini menekankan pada keterlibatan Suriah di Libanon dan kaitannya dengan konsep Suriah Raya, yaitu sebuah konsep pembentukan negara Suriah Raya yang meliputi Suriah dan negara-negara di sekitarnya termasuk Libanon.

1.5 Tujuan Penelitian

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Konflik Internal Tahun 1975-1990 Terhadap Sistem Konfesionalisme di Pemerintahan Libanon” merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Sebagai karya tulis ilmiah, skripsi ini memiliki beberapa tujuan pengembangan ilmu dan pengetahuan, khususnya mengenai dinamika masyarakat kawasan Asia Barat. Tujuan tersebut adalah agar mahasiswa dapat mengenal kronologis dari peristiwa konflik internal Libanon pada tahun 1975 sampai 1990. Serta bagaimana konflik sipil tersebut dapat merubah sistim Konfesionalisme yang ada di Libanon pasca diberlakukannya gencatan senjata melalui *Taif Agreement*.

1.6 Manfaat Penulisan

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan sivitas akademika pada khususnya dalam menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang

sejarah dan politik. Selain itu, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap khazanah kajian Asia Barat, khususnya Lebanon.

1.7 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam karya penulisan ini merupakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang berusaha untuk memaparkan, menjelaskan serta menganalisa data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data. Dalam mengerjakan penulisan ini terdapat teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data serta teknik analisa data²⁰ yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini:

1. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data yang diperoleh adalah berdasarkan penelitian kepustakaan (*Library Research*) seperti buku, artikel, dokumen, surat kabar, kamus dan data lain yang didapatkan dari situs-situs resmi yang terkait dengan pembahasan maupun buku elektronik (E-Book) untuk melengkapi karya penulisan.

Penelusuran sumber pustaka dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI), Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional (UNAS), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

2. Teknik Pengolahan Data.

Dalam mengolah data yang telah diperoleh, kemudian penulis mempelajari, mengamati serta mencatat data yang memiliki korelasi dengan pokok permasalahan yang digunakan.

3. Teknik Analisis Data.

Penulis berupaya untuk menganalisa data berdasarkan teori yang dipergunakan yang selanjutnya dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan obyektif sehingga dapat menganalisis dengan menghubungkan data yang ada secara sistematis di dalam masalah yang akan dibahas.

²⁰ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3S, 1990, hlm. 92-94.

1.8 Landasan Teori

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis pembahasan masalah dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori yang diterapkan oleh Hugh Miall mengenai resolusi konflik kontemporer. Menurut Hugh Miall, Konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas, kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Namun cara kita menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Adalah mungkin mengubah respon kebiasaan dan melakukan penentuan terhadap pilihan-pilihan yang dianggap tepat.²¹ Dalam konflik perang sipil di Lebanon, ada sebuah heterogenitas yang memunculkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan antar kaum beragama. Keadaan tersebut dipicu juga oleh kemunculan sebuah perubahan sosial yang merusak tatanan sosial yang ada, yaitu keberadaan kaum Kristen Maronit yang terusik dengan keberadaan pengungsi Muslim Palestina. Akibatnya adalah komposisi populasi kaum Muslim di Lebanon akan meningkat dan menyudutkan populasi kaum maronit serta pergerakan mereka dalam pengambilan keputusan di pemerintahan yang mungkin akan bersebrangan dengan kepentingan kaum Muslim.

Dalam usahanya untuk meredakan konflik antara dua kubu yang bertikai, ada pihak-pihak yang berusaha untuk membuat perubahan dalam konflik yang sedang berlangsung. Masuknya pihak ketiga akan mengubah struktur konflik dan menimbulkan sebuah pola komunikasi yang berbeda, memungkinkan pihak ketiga menyaring atau melihat kembali pesan-pesan sikap dan perilaku mereka yang berkonflik. Pihak ketiga seperti para politisi dan pemerintah dapat menggunakan semua bentuk kekuasaannya, dan apabila pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan dapat melibatkan pihak asing. Dilihat dari segi intervensi pihak ketiga, maka akan berguna dengan membedakan antara mediator yang berkuasa,

²¹ Hugh Miall, dkk, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, terj. Tri Budhi Sastrio, Jakarta: Raja Grafindo, 1999, hlm. 17-18.

yang membawa sumber kekuasaan mereka, dan mediator yang tidak mempunyai kekuasaan, yang perannya ditentukan hanya untuk komunikasi dan fasilitasi.²²

Konflik perang sipil di Lebanon menurut penulis, melalui teori konflik kontemporer Hugh Miall, masuk ke dalam golongan konflik *tidak simetris*. Yaitu, konflik dapat muncul antara pihak-pihak yang tidak sama seperti konflik antara minoritas dan mayoritas, sebuah pemerintahan yang sudah mapan dengan sekelompok pemberontak. Akar konflik terletak bukan pada masalah atau kepentingan tertentu yang dapat memisahkan pihak-pihak yang terlibat, tetapi terletak dalam struktur dan hubungan antar mereka. Karenanya struktur peran dan hubungan ini tidak dapat diubah tanpa menimbulkan konflik²³. Peran pejabat pemerintah yang pembagiannya didasarkan kuota melalui Pakta Nasional yang telah disepakati bersama sebelumnya, dengan kaum maronit yang memiliki rasio perwakilan dalam kabinet sedikit jauh lebih banyak dari kaum Muslim atau berbanding 6:5, membuat keputusan-keputusan mereka dalam usahanya menuntaskan konflik lebih condong menguntungkan pihak Kristen Maronit. Kondisi tersebut tentu saja sangat memberatkan kaum Muslim yang tidak ingin keberadaan kaumnya selalu berada pada posisi yang dirugikan akibat keputusan-keputusan kaum Kristen Maronit. Menurut Hugh Miall, dalam konflik yang strukturnya tidak simetris, yang kuat selalu menang, sedangkan pihak yang lemah akan selalu kalah. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik jenis ini adalah dengan mengubah strukturnya, menggabungkan kekuatan dengan pihak yang lemah atau minoritas guna menghasilkan perumusan solusi yang tidak berat sebelah.

Kekuasaan di Lebanon sebelum dan ketika berlangsungnya konflik perang sipil, dalam pembagian representasi kursi pemerintahannya tidak memiliki rasio yang seimbang. Oleh karena itu muncul kecemburuan dari pihak lain yang posisinya lemah. Dominasi kaum Kristen Maronit dengan kekuasaannya yaitu melalui jabatan kepresidenan, pemegang komando angkatan bersenjata, serta kuota anggota parlemen yang jauh lebih besar dari kaum Muslim. Dalam perkembangannya kaum Muslim semakin terperosok ke jurang kemiskinan diiringi dengan populasi yang semakin bertambah, sedangkan populasi kaum

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Kristen Maronit mengerucut karena rata-rata kaum mereka yang semakin kaya merasa situasi di Lebanon sudah tidak aman sehingga mereka beremigrasi. Situasi tersebut berlanjut dengan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi pemerintah, dan berakhir dengan konflik-konflik. Penyelesaian konflik seharusnya merupakan tanggung jawab negara-negara yang terlibat, akan tetapi pihak luar juga memainkan peran penting dalam usaha untuk memecahkan solusi konflik.

Ada empat faktor yang menentukan pihak luar turut dilibatkan dan akan memainkan peranan penting guna penyelesaian konflik. *Pertama*, sumber-sumber konflik kontemporer terletak diluar sebuah negara dan sama banyaknya seperti yang terletak di dalam sebuah negara. Komunitas Internasional seringkali yang paling bertanggung jawab atas timbulnya sebuah konflik. *Kedua*, meningkatnya interdependensi bermakna bahwa konflik kontemporer mempengaruhi kepentingan kawasan regional yang berdekatan. *Ketiga*, kombinasi penderitaan manusia dan transparansi media membuat sulit bagi pemerintahan luar untuk tetap bertahan dan tidak melakukan apa-apa. *Keempat*, hampir semua kajian sepakat bahwa banyak konflik yang berlarut-larut hanya dapat diselesaikan ketika sumber-sumber dari luar dilibatkan.²⁴ Dalam hal ini keterlibatan pihak asing untuk menyelesaikan permasalahan di Lebanon ada yang merugikan maupun menguntungkan. Suriah sebagai negara yang memiliki ikatan “khusus” dengan Lebanon, terutama dengan kaum Muslim, turut andil dengan keputusan-keputusannya mengerahkan pasukan guna mengamankan masyarakat dan meredakan pihak yang bertikai.

Akan tetapi keterlibatan mereka justru membebani pemerintahan Lebanon, karena dengan keberadaan mereka akan membatasi gerak gerik militer dan keputusan pemerintah Lebanon. Negara lain yang terlibat adalah Palestina kemudian Israel. Konflik Palestina-Israel menyisakan para korban-korban yang kemudian diungsikan ke kawasan Lebanon. Perhatian pemerintah Lebanon menjadi terpecah antara mengurus kepentingan dalam negerinya atau ikut membantu menyelesaikan konflik Palestina-Israel dengan desakan dari dunia Arab. Negara-negara lain yang turut membantu penyelesaian konflik Lebanon pun justru berakhir dengan kerugian bagi Lebanon. Perjanjian yang diadakan oleh

²⁴ *Ibid.*

pihak-pihak asing seringkali berakhir ditengah jalan, meskipun pada akhirnya berhasil menuntaskan permasalahan konflik dengan merubah tatanan pemerintahan yang ada melalui mediasi Arab Saudi.

1.9 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama adalah bab pendahuluan; bab kedua mengenai tinjauan umum negara Lebanon; bab ketiga membahas tentang peristiwa konflik perang sipil di Lebanon 1975-1990; bab keempat membahas dampak dari peristiwa konflik perang sipil di Lebanon 1975-1990 terhadap sistem pemerintahan yang ada, dan bab kelima adalah penutup. Penulis juga menunjukkan lampiran-lampiran yang berisi data dan gambar penunjang untuk menambah isi materi skripsi ini.

Bab Pertama, Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan permasalahan, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian, landasan teori dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Tinjauan Umum Negara Lebanon, memaparkan profil singkat terbentuknya negara Lebanon yang disertai pembahasan kondisi pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan Lebanon. Kemudian ditambah dengan tinjauan umum negara Lebanon mencakup; keadaan geografis, kondisi ekonomi, kehidupan sosial dan budaya, dan sistem politik.

Bab Ketiga, Konflik Sipil Lebanon 1975-1990, menjelaskan terjadinya perang sipil pada tahun 1975-1990. Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang konflik sipil di Lebanon. Kemudian Bab ini akan mendeskripsikan konflik sipil tersebut sampai pada proses perdamaian. Oleh karena itu, dalam Bab ini akan juga dijelaskan bagaimana proses perdamaian dari perang sipil tersebut, mulai dari pihak-pihak yang terlibat baik dalam maupun luar negeri sampai usaha-usaha penyelesaian konflik.

Bab Keempat, Pengaruh Konflik Sipil Terhadap Pemerintahan Lebanon, merupakan analisis pengaruh perang sipil terhadap perubahan sistem politik Konfesionalisme yang ada di Lebanon. Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana bentuk sistem politik yang ada di Lebanon sebelum perang sipil terjadi. Kemudian akan dijelaskan bagaimana sistem politik Konfesionalisme pada

saat konflik terjadi. Akhirnya, akan dijelaskan bagaimana konflik sipil tersebut merubah sistem Konfesionalisme yang ada di Lebanon.

Bab Kelima, Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kajian yang diambil oleh penulis setelah meneliti dan menganalisis pokok masalah. Kesimpulan adalah jawaban pokok permasalahan yang didapat oleh penulis setelah melakukan penelitian dan analisa melalui media online dan literatur, sehingga pembahasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Selain itu penulis juga akan menyertakan saran-saran yang membangun dan hal-hal yang dapat dikaji oleh orang lain dikemudian hari.



BAB 2

TINJAUAN UMUM LEBANON

2.1 Kondisi Lebanon Sebelum Kemerdekaan

Selama bertahun-tahun Lebanon telah menjadi persimpangan utama sebuah peradaban di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila negara kecil ini mempunyai sebuah perjalanan sejarah yang luar biasa. Dalam perjalanannya menjadi sebuah negara yang merdeka, Lebanon terlebih dahulu dikuasai oleh beberapa dinasti besar. Dinasti tersebut adalah Babilonia, Armenia, Persia, Yunani, Romawi, Arab, Pasukan Salib, dan Ottoman. Dinasti tersebut silih berganti menguasai Lebanon dengan meninggalkan kisah sejarahnya masing-masing, dan sampai pada akhirnya Lebanon jatuh ke dalam kekuasaan Perancis. Pada masa kekuasaan Perancis inilah rakyat Lebanon melakukan gerakan perlawanan sampai titik penghabisan untuk mendapatkan kemerdekaannya.

2.1.1 Era Pra Islam dan Masa Kekhalifahan

Keberadaan Lebanon sebagai sebuah peradaban sudah ada sejak masa prasejarah. Lebanon menjadi wilayah jajahan dari beberapa periode, mulai dari periode dinasti Babilonia, Armenia, Persia, Yunani, Romawi, Arab, Pasukan Salib, kekhalifahan Ottoman, sampai terakhir menjadi negara dibawah kekuasaan Perancis.²⁵ Kaum *Kana'an* merupakan kelompok masyarakat yang pertama kali mendiami wilayah Lebanon. Mereka merupakan kaum imigran yang pindah ke wilayah Lebanon dari kawasan selatan sekitar tahun 3000 SM. Kaum *Kana'an* dikenal sebagai pedagang yang masyhur pada masanya, mereka melakukan kerjasama perdagangan dengan masyarakat Yunani dan di seputaran kawasan mediterania, lalu kemudian mereka distribusikan secara merata ke dataran Arab. Selain pandai berdagang, kaum *Kana'an* juga dikenal sebagai seorang pelaut dan penjelajah. Karena jiwa petualang dan kebiasaan mereka yg berpindah-pindah

²⁵ <http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field%28DOCID+lb0012%29> (diakses pada 31 Maret 2010).

tempat, mereka mendirikan pemukiman yang independen di sepanjang Laut Tengah.²⁶

Pada awal tahun 1800 SM, beberapa penguasa asing mulai mengetahui keberadaan pemukiman kaum *Kana'an* dan mulai mengintervensi keberadaan mereka, tujuan utamanya adalah untuk mengambil alih keberadaan pemukiman *Kana'an* yang dianggap sangat strategis karena berada di daerah pesisir. Penguasa tersebut antara lain berasal dari bangsa Mesir, *Hittite*, *Assyiria*, Babilonia dan Persia. Pada sekitar tahun 875 SM, dinasti *Assyiria* menduduki pemukiman kaum *Kana'an*, namun usaha tersebut selalu menuai pemberontakan dari penduduk setempat. Hampir 200 SM tahun lamanya mereka berhasil menduduki wilayah kaum *Kana'an*, sampai akhirnya karena usaha pemberontakan yang bertubi-tubi mengakibatkan kondisi pemerintahannya goyah dan pada akhirnya datanglah bangsa Babilonia dan Persia.²⁷

Dalam usahanya untuk menancapkan kekuasaan pada kaum *Kana'an*, bangsa Babilonia juga masih disulitkan oleh sisa-sisa pengaruh dari bangsa *Assyiria*. Penduduk *Kana'an* yang ingin menjadi masyarakat merdeka terus melakukan pemberontakan, sedangkan bangsa *Assyiria* yang merasa masih memiliki ikatan dengan kaum *Kana'an* berusaha untuk tetap mempertahankan kedudukan mereka. Cyrus Agung atau Cyrus II, pendiri bangsa Persia, meruntuhkan dominasi Babilonia dengan merebut ibukota babilon sehingga kaum *Kana'an* dan segala wilayahnya berpindah tangan ke bangsa Persia. Selang beberapa tahun, setelah terjadi pergantian kursi kepemimpinan di dalam dinasti Persia, kepercayaan kaum *Kana'an* dan masyarakat di wilayah jajahan bangsa Persia terhadap pemimpinnya mulai memudar dan menimbulkan berbagai konflik serta pemberontakan.²⁸

Masyarakat Kristiani yang tinggal di daerah pesisir maupun pedalaman banyak yang mengungsi ke daerah Gunung Lebanon dan menetapkan untuk tinggal disana dengan beberapa pejuang korban peperangan guna menghindari penyiksaan. Seiring dengan pergantian kepemimpinan yang sedikit demi sedikit melemahkan pemerintahan Persia, bangsa Makedonia (Yunani) menganggap

²⁶ *The World Book Encyclopedia*, USA: World Book Inc, 1988, hlm. 173.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

kondisi tersebut sebagai sebuah peluang untuk melancarkan serangan ke jantung kota Persia yaitu Asia Minor atau yang seringkali disebut Anatolia.²⁹ Bangsa Persia pun akhirnya runtuh dan Makedonia kemudian melanjutkan ekspansinya ke pesisir Lebanon melalui komando jenderal Alexander Agung.

Kaum *Kana'an* menerima kedatangan bangsa Makedonia dengan tangan terbuka, mereka menganggap bangsa Makedonia sebagai sebuah bangsa berkuasa yang akan membawa sebuah peradaban baru. Kaum *Kana'an* yang merupakan masyarakat kosmopolitan tidak sulit untuk menerima kemunculan budaya Yunani, karena mereka seringkali bersentuhan dengan kebudayaan luar yang masuk dan berakulturasi dengan masyarakat sekitar. Banyak bekas bangunan-bangunan peninggalan kebudayaan Yunani yang masih terlihat di kawasan Lebanon.

Sepeninggal kematian Alexander Agung, pemerintahan Makedonia akhirnya dibagikan kepada jenderal kepercayaannya. Yang pertama, Seleucius I memperoleh *Kana'an* (dataran Lebanon), Anatolia, Suriah Utara dan Mesopotamia, yang kemudian menjadi dinasti *Seleucid*. Yang kedua, Ptolemy mendapatkan Suriah Selatan, Mesir. Yang ketiga, Antigonus I mendapatkan beberapa daerah di Eropa termasuk Makedonia. Akan tetapi pembagian tersebut justru menimbulkan perpecahan yang tidak berkesudahan antara Seleucus I dan Ptolemy, karena masing-masing menginginkan kemakmuran yang ada di wilayah Lebanon. Konflik tersebut berakhir dengan kemenangan *Seleucid* yang berlangsung selama 40 tahun. Pada tahun 64 SM, merupakan tahun-tahun keterpurukan dinasti *Seleucid* yang ditandai dengan kekacauan oleh peperangan serta perebutan kekuasaan di pemerintahan. Sampai akhirnya Pompey, jenderal bangsa Romawi memasukan Suriah dan Lebanon ke dalam wilayah kekaisaran Romawi.

Perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat pasca diberlakukannya *Pax Romana*.³⁰ Kota-kota di Dataran Lebanon menjadi pusat berkembangnya ilmu pengetahuan dibidang hukum, selain itu juga menjadikan Lebanon sebagai daerah persebaran akulturasi budaya-budaya

²⁹ http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_ancient_Lebanon (diakses 31 Maret 2010).

³⁰ *Pax Romana* adalah masa damai dan minimalisasi peperangan oleh militer bangsa Romawi yang dicetuskan oleh Cesar Agustus. *Pax Romana* kadang disebut juga *Pax Augusta* karena dibentuk oleh Cesar Agustus. Masa ini berjalan sekitar 207 tahun (dari tahun 27 SM sampai tahun 180). Lihat : <http://www.unrv.com/early-empire/pax-romana.php>

disekitarnya.³¹ Beberapa reruntuhan bangunan akibat peninggalan dari kebudayaan Romawi juga masih tampak sampai saat ini, yaitu kuil di Baalbek, Biqa dan reruntuhan kota di Bayt Miri, dekat Beirut. Kristenisasi mulai muncul ke Lebanon pada tahun 325 M, sampai kemudian diteruskan pada era kekaisaran Bizantium.³² Setelah Kematian Theodosius I pada tahun 396 M, kekaisaran Romawi kemudian berubah memasuki dinasti Bizantium. Selama hampir 200 tahun menguasai Lebanon dan sekitarnya, tidak sedikit terjadi bencana alam yang memporak porandakan wilayah tersebut sehingga menghancurkan kota Beirut, terutama bangunan pendidikan, kuil-kuil di Baalbek dan rumah-rumah warga yang menewaskan hampir 30.000 warga. Bencana alam tersebut mengakibatkan kekacauan dan korupsi di pemerintahan karena bantuan-bantuan yang mengalir justru disalahgunakan oleh pejabat pemerintahan. Pertikaian antara kelompok agama juga kerap kali terjadi, bahkan dewan kota setempat selalu angkat tangan untuk mengatasi masalah perbedaan pendapat antar agama. Masalah ini melemahkan kekaisaran dan memudahkan kaum Muslim di semenanjung jazirah Arab untuk melakukan ekspansinya.³³

Pada awal tahun 600 M, kaum Muslim dari semenanjung jazirah Arab menduduki Lebanon. Agama Islam kemudian sedikit demi sedikit mulai menggantikan agama Kristen yang rata-rata dianut oleh penduduk di sekitar daerah pesisir Lebanon. Akan tetapi kaum Kristiani tetap menjadi kaum yang dominan di kawasan pegunungan Lebanon sampai kemudian pasukan salib datang dari Eropa dan menginvasi Lebanon sekitar tahun 1100. Pasukan tersebut datang dengan tujuan untuk mendapatkan tanah suci (Palestina) dari kaum Muslim dan menyebarkan kembali agama Kristen yang sebelumnya berkurang akibat kedatangan kaum Muslim.³⁴

Ketika Pasukan Salib datang, beberapa delegasi dari kaum Maronit yang tinggal di pegunungan Lebanon turun menawarkan jasa mereka dan kemudian beberapa orang dari kaum Maronit ikut bersama-sama dengan Pasukan Salib untuk berperang melawan musuhnya yaitu kaum Muslim. Hubungan antara kaum

³¹ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 7.

³² *The World Book Encyclopedia, Loc. Cit.*

³³ <http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/lbtoc.html> (diakses 31 Maret 2010).

³⁴ *The World Book Encyclopedia, Loc. Cit.*

Maronit dengan Pasukan Salib dari waktu ke waktu semakin erat. Kaum Maronit mendapatkan keamanan dan keahlian berperang dari para Pasukan Salib, sedangkan di lain pihak Pasukan Salib mendapatkan posisi yang strategis untuk memudahkan menghancurkan kaum Muslim, selain itu beberapa perajurit mereka yang tidak dapat ikut berperang akan mendapatkan jabatan-jabatan tinggi dalam kepemimpinan kaum Maronit.³⁵ Pada tahun 1300, dinasti Mameluk dari Mesir mengusir para pasukan Salib dari Lebanon dan menduduki Lebanon.³⁶

Keikutsertaan kepala suku dari kaum Maronit dan Druze dalam mengerahkan pasukannya di sisi pasukan Salib, untuk membantu dan mendapatkan kemerdekaan di Gunung Lebanon, ternyata justru membawa mereka dalam keterpurukan. Bangsa Mameluk yang ingin membalas dendam pada akhirnya terus melakukan perjalanan ke daerah Lembah Qadisha di pegunungan Lebanon dan menyerang penduduk disana yang notabene merupakan kawasan penduduk kaum Druze dan Kristiani terutama Maronit. Dalam jalur pasukan Mameluk yang mereka lewati, mereka menghancurkan kota dan membunuh seluruh penghuninya. Pada periode ini banyak kaum Muslim yang bermigrasi dari kawasan Suriah, Irak, dan Jazirah Arab ke Gunung Lebanon terutama di Lembah Biqa dan kawasan Kasrawan. Kondisi ini menyudutkan tempat tinggal kaum Druze yang menetap disana, yang kemudian memicu konflik antar kaum Druze.³⁷

Pasca pendudukan bangsa Mameluk, Beirut melalui lokasi geografisnya yang strategis menjadi kawasan yang kaya akan aktifitas perdagangan dari Eropa sampai ke Timur Tengah. Bangsa Eropa menginginkan barang mewah dari dataran Arab baik berupa bahan mentah yaitu tekstil, dan barang-barang jadi seperti perhiasan. Sedangkan masyarakat dari Timur Tengah memanfaatkan permintaan dari bangsa Eropa sebagai sebuah potensi pasar yang sangat menguntungkan. Dalam kondisi bangsa Mameluk yang sedang mencapai masa kemakmuran, ternyata bangsa Mameluk masih terus diganggu oleh masalah pemberontak dan serangan-serangan dari bangsa Mongol, serta beberapa pasukan Salib yang masih tersisa. Di lain pihak bangsa Ottoman yang usai meruntuhkan sisa-sisa dari dinasti Persia, kemudian melihat celah di bangsa Mameluk yang

³⁵ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 11.

³⁶ *The World Book Encyclopedia, Loc. Cit.*

³⁷ *Ibid.*

disibukan oleh urusan militernya. Bangsa Ottoman kemudian menyerbu melalui kawasan Suriah dan menghancurkan Mameluk pada 1516 di Marj Dabaq, kawasan utara Aleppo. Kepemilikan Lebanon kemudian perlahan-lahan berganti ke dinasti Ottoman³⁸

Pada sekitar tahun 1516 dinasti Ottoman benar-benar secara penuh menguasai wilayah Lebanon, dengan pusat pemerintahannya di Istanbul (yang sekarang dikenal dengan Turki). Ketika konflik antara dinasti Mameluk dan Ottoman berlangsung, *Amir* dari Lebanon menyatakan kesetiaannya kepada Ghazali, Jendral atau *Pasha* dari Damaskus. Bangsa Ottoman menaruh kepercayaan besar kepada *Amir* dari Lebanon karena telah membantu mereka ketika berperang di Marj Dabaq, atas jasa-jasa dan kepandaian bertutur kata dari *Amir* Lebanon Fakhr ad Din I (1516-1544). Akhirnya Sultan mengukuhkan daerah Gunung Lebanon menjadi daerah semi Otonom, yang kemudian berkembang menjadi daerah Otonom karena kepandaian para *Amir* dalam mengelola roda pemerintahannya, walaupun di masa mendatang pembentukan kawasan otonom ini cenderung berujung dengan konflik-konflik kepentingan antar golongan.³⁹

Pada masa terbentuknya daerah otonom Gunung Lebanon inilah awal mula benih-benih konflik di Lebanon mulai mengemuka. Emiratis dari Gunung Lebanon dibawah kekuasaan Ottoman mendapatkan kekuasaannya berdasarkan sistem *Iqta* atau *Iltizam*, kepala suku berhak mendapat kekuasaan dalam mengatur pengalokasian pajak pertanian di daerah pegunungan dan gurun dibawah pengawasan *Wali* dari Ottoman. Para pemegang hak *Iqta* tersebut dapat terus menjalankan berbagai macam pekerjaan otonominya di Gunung Lebanon selama mereka bisa terus menyediakan upeti-upeti yang telah disepakati bagi *Wali* Ottoman. Selain itu mereka juga harus menyediakan angkatan bersenjata kepada pasukan militer Ottoman ketika dibutuhkan, dan memberikan pengawasan daerah Gunung Lebanon dibawah kekuasaan dinasti Ottoman.⁴⁰ Kawasan ini didominasi oleh kaum Druze yang menjadi prajurit/pejuang yang kental akan unsur adat

³⁸ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 11-12.

³⁹ [http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field\(DOCID+1b0023\)](http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+1b0023)) (diakses pada 22 April 2010).

⁴⁰ Fawwas Traboulzi, *A History Of Modern Lebanon*, London: Pluto Press, 2007, hlm. 3.

istiadat kesukumannya, serta kaum Maronit yang sebagian besar merupakan masyarakat dari berbagai unsur golongan seperti pedagang, pengrajin, dan beberapa tokoh-tokoh penting di Gunung Lebanon, dan juga kaum Muslim yang populasinya tidak terlalu banyak.⁴¹

Fakhr al-Din II (penerus dari Fakhr al-Din) yang merupakan *Amir* dari Gunung Lebanon, meneruskan perjuangan pendahulunya demi terlaksananya pencapaian untuk memimpin Lebanon secara independen. Berbagai usaha dilakukan Fakhr Al-Din untuk memajukan Gunung Lebanon guna menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mapan sehingga dapat menyamai kekuatan Ottoman. Kekuatan ekonomi merangkak naik dengan dibangunnya infrastruktur di seluruh kawasan, menghubungkan daerah yang terpisahkan oleh sungai dikawasan pesisir, membangun karavan, dan berusaha menjalin hubungan dengan berbagai kota di Eropa seperti Venice, Florence, dan Marseile.⁴² Bahkan Fakhr al-Din membangun sendiri pasukan militernya yang bebas dari campur tangan Ottoman guna memuluskan langkahnya menciptakan Gunung Lebanon yang merupakan cikal bakal Lebanon menjadi sebuah negara yang merdeka.

Keputusan-keputusannya yang diluar sepengetahuan Sultan membuat pemerintah Ottoman berang. Pada tahun 1633, Sultan mengumumkan bahwa Fakhr al-Din merupakan pemberontak dan mengerahkan pasukan ke Gunung Lebanon untuk menangkapnya. Sampai pada akhirnya dengan bantuan para pemimpin lokal, Fakhr al-Din berhasil ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1635. Kepemimpinan di Gunung Lebanon seterusnya dikuasai oleh keturunan keluarga Maan. Kekuasaan keluarga Maan bukan tanpa perjuangan, karena dari kaum dan keluarga lainnya terutama dari keluarga Yamani, turut serta berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi kepempinan di Gunung Lebanon. Akhirnya tahun 1697, Ahmed Maan, menjadi penerus silsilah keluarga Maan yang terakhir berkuasa karena dia tidak mempunyai keturunan laki-laki.

Kursi kepemimpinan selanjutnya diberikan kepada seorang yang masih memiliki ikatan saudara dari keluarga Maan dari garis keluarga wanita, yaitu

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴² Phillip A. Hitti., *A Sort History Of The Near East*, London: Princeton University, 1966, hlm. 221.

Syihab. Keluarga Syihab merupakan kaum Sunni yang datang dari Wadi al-Taym, kawasan diluar Gunung Lebanon. Selama periode kepemimpinan dari keluarga Syihab (1697-1788), terjadi perubahan dari sistem ekonomi feodal menuju sistem ekonomi kerakyatan guna menghindari pemberontakan yang lebih meluas. Pedagang di Beirut (terutama Muslim Sunni dan Kristen) dapat meminjamkan uang kepada petani sehingga mengurangi ketergantungan petani kepada tuan tanah, selain itu dapat memperbesar perkembangan ekonomi di bidang kerajinan tangan dan pertanian.⁴³ Akan tetapi meskipun perkembangan ekonomi berubah dan berkembang, konflik masih tidak luput dari pemerintah era Syihab. Konflik antar dua pemimpin kala itu yaitu Basyir Syihab II dan Basyir Junbalat. Pada tahun 1821-1825 terjadi peristiwa pembunuhan dan peperangan antar sekte dengan tujuannya masing-masing, kaum Maronit menginginkan kuasa mayoritas atas kaumnya di Gunung Lebanon sedangkan kaum Druze menginginkan kuasa atas Lembah Biqa. Setelah berbagai pertempuran yang sengit dan mengorbankan banyak korban jiwa, pada 1825 Basyir II mampu mengalahkan Basyir Junbalat, memenjarakannya, dan kemudian dieksekusi. Basyir II lalu meneruskan tugas yang dimiliki Junbalat meliputi pengaturan pajak, denda, dan menyita hak *Iqta* kemudian mendistribusikan lahan yang sebelumnya dalam kepemilikan Junbalat kepada orang-orang terdekat.⁴⁴

Pada beberapa tahun berikutnya Gunung Lebanon menjadi kawasan yang lekat akan konflik sipil. Dimulai dari tahun 1840 sampai 1845, sampai kemudian tahun 1852, tahun 1858, dan 1860. Tahun-tahun tersebut menjadi sebuah transformasi bagi masyarakat Lebanon dengan kepemimpinan Basyir Qasim atau Basyir III, dengan merestrukturisasi pemerintahan otonomnya melalui penghapusan sistem pemerintahan Feodal yang pada akhirnya dihapuskan secara menyeluruh. Pasukan-pasukan bersenjata mulai ditingkatkan sehingga pasukan Mesir yang mulai berusaha mengambil alih kawasan Lebanon seringkali gagal karena kegigihan dan taktik gerilya dari pasukan Gunung Lebanon yang menghalaunya.⁴⁵

⁴³ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 18.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 27.

Ketika Basyir Qasim diangkat dari komandan pasukan militer kaum Maronit menjadi penguasa Gunung Lebanon, dia membawa Gunung Lebanon seakan-akan merupakan kawasan yang didominasi oleh kaum Maronit. Dia memerintah seolah-olah tidak memiliki keterikatan baik dengan tradisi pemimpin-pemimpin sebelumnya maupun dengan pembatasan kekuasaan dinasti Ottoman. Salah satu langkah radikal yang ditempuh Basyir III adalah memberikan kekuasaan kaum Druze yang sedang dalam pengasingan kepada kaum Kristen Maronit, terutama kerabat terdekatnya. Sehingga banyak pejabat tinggi kaum Druze yang kembali dari pengasingannya, menuntut hak atas jabatan dan kekuasaan sebelumnya di wilayah selatan yang sekarang menjadi milik tuan tanah kaum Kristen.⁴⁶ Langkah radikal lainnya yaitu Basyir III mendapatkan dukungan dari agen Inggris berupa pengadaan persenjataan bagi militer kaum Kristen Maronit untuk mengantisipasi adanya peperangan di Gunung Lebanon. Pada masa ini umat Kristen mengalami kejayaannya dengan mayoritas penduduknya menempati wilayah kaum Druze, dan sebagian dari mereka menjadi kaya raya karena pengambil alihan jabatan yang ditinggalkan oleh kaum Druze.

Pada Tahun 1841 dan tahun 1842 terjadi konflik antara kaum Druze dan Kristen Maronit. Konflik tersebut selain bermula dari rasa ketidakpuasan kaum Druze terhadap kepemimpinan kaum Kristen Maronit, juga karena terbunuhnya salah seorang kaum Kristen Maronit yang sedang berburu di lahan milik ulama kaum Druze. Kontak fisik lalu berlanjut dengan pasukan Kristen Maronit yang membalas dari Dayr al-Qamar menuju pemukiman kaum Druze di Baqlin. Peristiwa tersebut membuat hampir 17 orang terbunuh dan membuat pertikaian antar kaum Druze dengan Kristen Maronit disepanjang Gunung Lebanon menjadi semakin meruncing.

Kontak fisik antara kaum Druze dan Maronit kemudian meletus. Kaum Druze bergerak menuju kediaman *Hakim* atau penguasa kala itu, Basyir III, di Dayr al-Qamar, sedangkan kaum Kristen Maronit berusaha untuk bertahan dan

⁴⁶ Tahun 1821 terjadi konflik antara Basyir II yang didukung oleh kaum Kristen dengan kaum Druze yang dimotori oleh Basyir Junbalat sebagai pihak pemberontak, konflik tersebut berkesudahan dengan kemenangan kaum Kristen yang memenjarakan dan kemudian mengeksekusi Basyir Junbalat. Pasca eksekusi, tugas dan hak kepemilikan tanah dari Junbalat kemudian dibagi-bagikan kepada kaum Kristen yang memiliki hubungan kerabat dengan Basyir II. Lihat, Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*, hlm. 10.

mengamankan penduduk mereka dari serbuan pasukan kaum Druze yang juga dibantu oleh sebagian pasukan Ottoman⁴⁷ dengan membunuh hampir 200 orang kaum Kristen Maronit di Saghbin.⁴⁸ Dengan kondisi yang semakin memanas, terutama setelah beberapa representasi pemerintahan dari dinasti Ottoman mulai angkat kaki dari Lebanon, pihak asing segera turun tangan. Richard Wood, seorang agen Inggris berhasil membujuk wakil dari tiap pihak yang bertikai untuk melakukan perundingan. Perpecahan dapat dihentikan sementara dengan memberikan keputusan bahwa kaum Druze dapat memperoleh kekuasaannya kembali di wilayah selatan Gunung Lebanon, sedangkan kaum Kristen Maronit sedikit demi sedikit mulai kehilangan kekuasaannya karena kaum Druze yang terus mengumpulkan dukungan-dukungan dari pendukung Basyir II terdahulu.

Karena konflik antara kaum Kristen Maronit dan kaum Druze yang tidak berujung membaik, dan membuat posisi kaum Kristen Maronit semakin terpojok. Untuk itu ditemukanlah sebuah solusi pembentukan sistem *qa'im maqamiya*, yaitu sistem yang membagi kawasan Gunung Lebanon menjadi dua wilayah bagi kaum Kristen dan Druze, serta memilih *qa'im maqam* atau gubernur dari masing-masing wilayah. Sistem ini dicetuskan oleh Metternich dari wakil kedutaan Austria, dengan pihak Inggris dan Ottoman.⁴⁹ Setahun setelah pembentukan sistem *qa'im maqamiya*, konflik mengemuka karena perbedaan pendapat mengenai pembagian wilayah. Kaum Kristen Maronit kemudian meminta bantuan kepada Kaum Kristen Yunani Ortodoks agar membantu dan ikut bergabung dalam pasukannya. Akan tetapi mereka menolak membantu dengan alasan tidak mendapatkan keadilan pada penerapan sistem *Qa'im Maqamiya*, yaitu tidak mendapatkan kuota kursi *qa'im maqam* dalam kekuasaan yang dipimpin oleh kaum Kristen Maronit.⁵⁰ Kaum Kristen Maronit kemudian tidak tinggal diam meskipun minim dengan bantuan, mereka membalas menyerang guna

⁴⁷ Pasukan Ottoman membantu kaum Druze dalam memerangi kaum Kristen Maronit karena kala pemerintahan Basyir III, Gunung Lebanon seakan-akan menjadi daerah yang mayoritas pemerintahannya dikuasai oleh kaum Kristen Maronit dengan mengesampingkan keberadaan kaum-kaum lainnya serta mengabaikan *wali-wali* dari Ottoman sehingga membuat Sultan geram. Sultan kemudian memutuskan untuk mengambil tindakan sementara dengan membantu kaum Druze guna mengembalikan jalannya roda pemerintahan yang sesuai dengan perintahnya. Lihat, Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 27.

⁴⁸ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 31.

⁴⁹ Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁵⁰ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 33.

mempertahankan posisinya. Akan tetapi perlawanan tersebut justru mengantar mereka kedalam posisi yang kurang menguntungkan, karena hampir sebagian masyarakat Kristen mundur dan berusaha melarikan diri sehingga membuat posisi mereka menjadi terpecah belah.

Pada September 1845 melalui desakan para dewan Eropa, pemerintahan Ottoman dipaksa untuk campur tangan menghentikan peperangan serta memberikan jalan keluar dari peperangan. *Bab Ali* atau diplomat dari bangsa Ottoman akhirnya mengutus duta bidang luar negerinya yaitu Shakib Effendi guna meluruskan masalah. Shakib Effendi kemudian berunding dengan para dewan serta pemimpin lokal, dan menawarkan solusi yang kelak merupakan cikal bakal sistem konfesionalisme di Lebanon. Setelah berunding kemudian dia menjalankan perintah pusat, yaitu untuk lebih menegaskan keberadaan Ottoman di kawasan Gunung Lebanon dan melucuti semua senjata penduduk. Selanjutnya Shakib Effendi juga mengumumkan penghentian intervensi dewan dari Eropa kedalam urusan Gunung Lebanon. *Qa'im Maqamiya* dirombak menjadi sistem keterwakilan politik sektarian di Gunung Lebanon.

Kali ini dalam penerapan sistem *Qa'im Maqamiya* dibantu dewan untuk mengumpulkan pajak dan mengurus administrasi hukum. Tiap dewan terdiri dari dua belas anggota yaitu: anggota dewan dan hakim yang masing-masing terdiri dari enam keterwakilan komunitas beragama: Maronit, Druze, Ortodoks Yunani, Katolik Yunani, Sunni, dan Shi'ah. Namun Shi'ah tidak mendapat bagian sebagai hakim karena Sultan hanya mengakui secara hukum Muslim Sunni, sehingga Shi'ah hanya mendapat jabatan sebagai penasihat. Ke-12 anggota tersebut akan menjadi wakil *Qa'im Maqam* dengan pembagian Kristen Maronit di utara dan Druze di selatan. Masing-masing *Qa'im Maqam* diputuskan resmi menjadi petugas pemerintah dan menjadi wewenang *Wali* di Sayda, sedangkan di Jubayl, Zahleh dan Dayr al Qamar menjadi kota otonom dibawah pemerintahan dinasti Ottoman.⁵¹

Pada tahun 1860 terjadi perang sipil kembali antara kaum Kristen Maronit dengan kaum Druze. Kejadian bermula ketika kaum Maronit menembaki kaum Druze yang melewati batas wilayah *Qa'im Maqamiya* dengan melintas di Beirut

⁵¹ Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*, hlm. 16.

ketika ingin berburu. Kondisi tersebut mengakibatkan korban jiwa yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya karena konflik telah menyebar hampir ke seluruh dataran Lebanon. Akhirnya melalui investigasi komisi internasional yang terdiri dari Inggris, Perancis, Austria, dan Prussia yang diselenggarakan oleh kekhalifahan Ottoman, diputuskanlah bahwa akan dibentuk administrasi dan yuridikasi hukum baru yang bernama *Mutasarrifat*.⁵² *Mutasarrifat* yang merupakan pembaharuan dari sistem terdahulu, merestrukturisasi dan membekali pemerintahan di Gunung Lebanon dengan kekuasaan yang lebih baik karena disokong oleh bantuan internasional yang lebih berpengalaman dalam membantu menjalankan roda pemerintahannya. Sistem ini berlangsung dari tahun 1861 sampai dengan 1914 ketika terjadi perang dunia pertama.⁵³

2.1.2 Lebanon Raya

Tahun 1914 meletus perang dunia yang pertama di kawasan Eropa, bangsa Turki Ottoman menyatakan bergabung dengan kekuatan poros tengah yang dipimpin oleh Jerman dan sekutunya guna melawan *Triple Entente* (Inggris, Perancis, dan Rusia) Ketika bangsa Turki Ottoman pergi ke zona peperangan maka daerah Lebanon dijadikan sebagai markas militer untuk mensuplai persenjataan serta mengamankan wilayah di sekitar Lebanon. Tahun berikutnya sistem *Mutasarrifat* ditiadakan dengan mengabolisi Dewan Administrasi di seluruh kawasan Lebanon mencakup Gunung Lebanon. Hal tersebut tentu saja membuat masyarakat Lebanon terpicu amarahnya karena terlibat dalam konflik peperangan antar negara, meskipun tidak sedikit masyarakat Muslim yang ikut bergabung dengan militer Turki Ottoman karena perasaan satu tujuan *Jihad*. Pemberontakan bermunculan dengan berdirinya gerakan-gerakan yang menentang militer Turki Ottoman dengan jenderalanya Jemal Pasha yang berada di Beirut.⁵⁴

Pasca kekalahan Turki Ottoman di kanchah perang dunia pertama, terdapat tiga perjanjian rahasia antara anggota *Triple Entente* yang berhubungan dengan kekuasaan Turki Ottoman. Pertama adalah Perjanjian Konstantinopel pada 18 Maret 1915, yang membagi wilayah Suriah utara dan Asia Minor (Turki) kepada

⁵² Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 33.

⁵³ *Ibid.*, hlm 48.

⁵⁴ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 48.

anggota *Triple Entente*. Kedua adalah Perjanjian London pada 26 April 1915 yang diadakan pasca Itali menyatakan bergabung dengan kekuatan *Triple Entente* dan menginginkan bagian dari kemenangan perang kala itu. Dalam kedua perjanjian tersebut, kawasan Turki dibagikan kepada Inggris dan Perancis. Palestina yang posisinya berdekatan dengan Suriah (yang menjadi wilayah kepemilikan Inggris dan Perancis), menjadi wilayah milik dunia internasional karena merupakan wilayah suci bagi semua umat beragama dan untuk menghindari terjadinya polemik dikemudian hari.⁵⁵ Yang terakhir melalui perjanjian Sykes–Picot, Turki Ottoman dibagi wilayahnya dan disahkan menjadi milik Inggris dan Perancis, dengan Perancis mendapatkan wilayah tenggara Turki, kawasan Utara Irak, Suriah dan Lebanon.⁵⁶

Pada 1 September 1920, Jenderal Gouraud secara resmi mengumumkan bahwa Lebanon Raya telah berada di bawah mandat Perancis. Kawasannya meliputi wilayah terdahulu ketika masa sistem *Mutasarrifat* yang digabungkan dengan kawasan perkotaan Beirut, Sidon, Tyre dan Tripoli, serta empat kota peninggalan Turki Ottoman yaitu Hasbaya, Rashaya, Ba'albak dan Akkar. Sedangkan perbatasan wilayahnya meliputi Nahr al-Kabir di utara, Palestina di selatan dan Laut Mediterania di bagian barat serta daerah pegunungan di sebelah timur.⁵⁷

Melalui kedekatan hubungan dengan kaum Kristen Maronit Lebanon, Perancis mulai membenahi kembali sistem pemerintahannya dan memisahkan wilayah Suriah dengan Lebanon. Mengangkat Gubernur, Georges Trabaud (1920–23), M.Privat-Aubouard (1923–4), General Vandenberg (1924–5), dan Leon Cayla (1925–6) yang disertai dengan anggota dewannya masing-masing, kemudian membenahi sistem peradilan dengan memasukan hakim dan pengacara yang berasal dari pejabat Perancis. Kegiatan tersebut juga diimplementasikan di Suriah guna menciptakan peradaban yang baru di kawasan Arab. Akan tetapi setelah pembentukan Lebanon Raya tersebut ternyata mendapat penolakan dari hampir semua kaum Muslim di Lebanon, karena kaum Muslim menginginkan

⁵⁵Yahya Armajani, *The Middle East Past And Present*, New Jersey: Prentice Hall, 1970, hlm. 294–295.

⁵⁶ http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Sykes-Picot_Agreement.

⁵⁷ Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*, hlm. 80.

Lebanon menjadi negara Arab yang merdeka dan terus berada dalam satu lingkaran kawasan persaudaraan Muslim Arab Suriah.⁵⁸

Pada tahun 1926, terjadi revolusi di Suriah dan melalui desakan Komisi Mandat Nasional kemudian Perancis mengesahkan sistem konstitusi Lebanon dan Suriah. Setelah melalui berbagai perundingan, pada 23 Mei 1926 Lebanon Raya menjadi 'Republik Lebanon' dan mengesahkan Lambang negaranya yang merupakan lambang negara Perancis akan tetapi dengan menempatkan gambar pohon cedar ditengahnya, kemudian juga bahasa Perancis ditetapkan sebagai bahasa resmi dengan Arab sebagai bahasa keduanya. Dewan representatif diubah menjadi Dewan Perwakilan dan dilanjutkan dengan pembentukan Senat yang menjadi representasi bagi sekte-sekte dan agama. Hari berikutnya pada 26 Mei 1926, Charles Dabbas, seorang Ortodoks Yunani terkemuka, diangkat menjadi kepala pemerintahan selama kurun waktu 3 tahun melalui pertemuan antara Dewan Perwakilan dengan Senat.⁵⁹

Dengan mempertimbangkan beberapa faktor, terutama untuk meminimalisir perwakilan dari tiap kaum yang terus bertambah di Lebanon, pada Juli 1937 Komisaris Tinggi menetapkan majelis baru yang terdiri dari 60 deputi, yang 2/3 anggotanya diangkat melalui pemilihan dan yang lainnya sudah ditetapkan Komisaris Tinggi, semuanya didasarkan pada proporsional yang tertulis di sensus penduduk tahun 1932 pada tiap sekte. Pihak Prancis juga menambah masa jabatan Presiden menjadi 6 tahun yang sebelumnya 3 tahun. Pada bulan September, Emile Eddé yang sebelumnya bersaing dengan Bishara al-Khuri akhirnya berhasil menjabat kembali menjadi presiden. Kemudian dia meminta Khayr al-Din al-Ahdāb, seorang Muslim Sunni sebagai perdana menteri untuk membentuk kabinet pemerintahan. Dalam kabinet yang dibentuk oleh Khayr al-Din al-Ahdāb tersebut, dia menetapkan sistem yang menjadi panutan pada masa mendatang yaitu bahwa kedudukan seorang Presiden dari pihak Kristen Maronit akan seimbang dengan pengangkatan Muslim Sunni sebagai kepala pemerintahan atau perdana menteri.⁶⁰

⁵⁸ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 60.

⁵⁹ Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*, hlm. 90.

⁶⁰ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 66.

Pasca pembenahan sistem konstitusi di Lebanon Raya, frekuensi pemberontak dan para pemrotes yang terkadang berujung dengan konflik fisik mulai berkurang. Para politisi Lebanon setelah mendapatkan pengalaman dan pembelajaran dari pemerintah parlemen Perancis mulai menjalankan kegiatan berpolitiknya dengan prosedur yang benar dan jauh dari korupsi sehingga tercipta aktifitas administrasi yang berjalan dengan semestinya. Partai-partai politik mulai bermunculan, diantaranya adalah Blok Konstitusional yang dipimpin oleh Bishara al-Khuri dan partai Blok Nasional yang dipimpin oleh Emile Edde. Partai lain yaitu al-Khataeb atau Phalangis yang didirikan oleh Bikfayyā didirikan guna mengantisipasi laju partai Muslim yang terus bermunculan.⁶¹

Partai Phalangis merupakan partai sayap kanan Lebanon yang didominasi oleh kaum Kristen Maronit dengan salah satu misinya agar memberikan pembelajaran pada kaum Kristen muda sehingga tercipta regenerasi yang berjuang demi solidaritas antar masyarakat Lebanon. Partai Phalangis mengadopsi cara berpakaian partai fasis yang sedang mengemuka kala itu. Organisasi Sunni Najjāda juga muncul untuk menandingi solidaritas kaum Kristen dengan kaum Muslim. Partai lainnya yaitu *al-Hizbu-sh-Ahuyu 'ī-l-Lubnānī* atau Partai Komunis Lebanon yang berdiri untuk mendobrak pemikiran para pekerja dengan berlandaskan paham-paham Karl Marx dan Friedrich Engels. Kamal Jumblat, seorang pemimpin Druze, kelak juga mendirikan *al-Hizb al-Taqadummi al-Ishtiraki* atau Partai Sosialis Progresif-PSP yang berpaham sekuler namun sebagian besar pengikutnya adalah kaum Druze.⁶²

Pada tahun 1940, setelah rezim Vichy di Perancis berkuasa akibat dari kekalahan perancis pasca perang dunia kedua dari Nazi, Jendral Henri Ferdinand Dentz diangkat menjadi Komisaris Tinggi di Lebanon. Pengangkatannya membuat jabatan Emile Edde diturunkan pada 4 April 1941 dan Ferdinand Dentz menunjuk Alfred Naqqash sebagai Presiden. Pemerintahan Vichy yang berkuasa di Lebanon berakhir beberapa bulan berikutnya ketika pasukan militer Jendral de Gaulle tidak berhasil berdiplomasi guna mengatasi polemik yang terjadi di Lebanon dan Suriah karena masing-masing mengharapakan kemerdekaan yang sah

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 68.

⁶² *Ibid.*

dan diakui dunia internasional.⁶³ Gencatan senjata akhirnya dilakukan pada bulan-bulan berikutnya yaitu 14 Mei 1941. Setelah pelaksanaan gencatan senjata, Jendral Charles de Gaulle dan Jendral Dentz mengunjungi Lebanon serta mengumumkan bahwa rezim Vichy telah berakhir dengan penarikan 2/3 pasukan Perancis dari Lebanon. Jendral Dentz juga menjanjikan bahwa status Suriah dan Lebanon pada masa mendatang akan dinegosiasikan sesuai dengan janji mereka untuk menjadikan Suriah dan Lebanon negara yang merdeka bebas aktif.

Melalui desakan dari dalam dan pihak luar negeri, pada 26 November 1941, Jendral Georges Catroux seorang delegasi dari Jendral Charles de Gaulle, menyatakan kemerdekaan Lebanon atas pemerintahan Perancis. Kabar tersebut dengan cepat diketahui oleh negara-negara internasional seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, negara-negara Arab dan beberapa negara di Asia, beberapa negara tersebut juga segera membentuk perwakilan duta besarnya di Lebanon. Meskipun Perancis telah menyatakan kemerdekaan Lebanon, akan tetapi berbagai kekuasaan peninggalannya masih ada yang terus dijalankan. Setelah pemberian kemerdekaan, Lebanon segera melakukan pembenahan, dan pada tahun 1943, Majelis Perwakilan di Lebanon menunjuk Bishara al-Khuri dari Partai Konstitusional untuk menjabat sebagai presiden. Dia kemudian menunjuk Riyadh as Sulh sebagai perdana menteri dan memintanya untuk membentuk pemerintahan pertama Lebanon yang independen bebas dari campur tangan asing. Pada 8 November 1943, Majelis Perwakilan Lebanon mengembangkan konstitusi, menetapkan Arab sebagai bahasa utama dan menetapkan lambang bendera kenegaraan yang baru, yang terakhir menghapus dan merubah beberapa peraturan peninggalan yang berhubungan dengan mandat Perancis. Delegasi Perancis, Jendral Jean Helleu menyatakan bahwa pembentukan pemerintahan baru yang dicanangkan batal dan tidak sah karena dibuat secara sepihak tanpa sepengetahuan otoritas Perancis.

Pada tanggal 11 November, para politisi yang baru memerintah, Bishara al-Khuri, Riyadh as Sulh, `Abd al-Hamid Karami, menteri Salim Taqla dan Kamil Sham`um ditangkap di benteng Rashaya sebelah selatan Lembah Biqa. Tindakan tersebut membuat pemimpin kaum Muslim dan Kristen di Lebanon berang karena

⁶³ *Ibid.*, hlm. 70.

kesewenang-wenangan Perancis.⁶⁴ Di Beirut, partai Phalangis dan Najjāda membentuk kesatuan untuk menyerbu gedung Parlemen milik Perancis dan menangkap pejabatnya yang mengakibatkan 18 orang meinggal dan 66 lainnya luka berat. Didesak oleh negara-negara internasional seperti Mesir, Arab Saudi dan Irak agar segera menghentikan pertumpahan darah di Lebanon, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill berunding dengan Jendral de Gaulle yang kemudian menginstruksikan kepada Jendral Catroux untuk menyelesaikan krisis. Pada 22 November 1943, setelah penetapan ultimatum kepada Perancis untuk membebaskan para politisi Lebanon yang ditangkap, pada akhirnya pihak militer Perancis membebaskan Bishara al-Khuri, Riyadh as Sulh dan politisi lainnya, serta memproklamirkan akhir dari mandat Perancis di Lebanon. Hari pembebasan tersebut ditandai sebagai hari kemerdekaan bangsa Lebanon.⁶⁵

2.2 Kondisi Lebanon Pasca Kemerdekaan

Akhir dari pemerintahan mandat Prancis meninggalkan berbagai persoalan yang membekas terutama dengan masalah konflik antar sekte dan korban dari perang dunia pertama bagi Lebanon. Namun dibalik kerusakan tersebut, pemerintahan Perancis telah membangun sebuah kekuatan ekonomi dan sistem tata sosial di Lebanon. Otoritas Perancis memperbaiki dan memperluas jaringan pelabuhan di Beirut, membangun jalur-jalur perdagangan yang menghubungkan seluruh kota Lebanon. Mereka juga mengembangkan struktur pemerintahan terdahulu mulai dari sistem administrasi, sistem hukum pidana dan perdata, serta yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan sistem pendidikan, pertanian, kesehatan publik, dan standar hidup masyarakat Lebanon. Melalui peninggalan tersebut, para politisi Lebanon mulai berpikir untuk mengembangkan pondasi dasar pemerintahan untuk meminimalisir konflik sektarian yang selama ini terjadi.

Pada tahun 1943, Bishara al-Khuri dan Riyadh as Sulh mencanangkan perjanjian tidak resmi yang disebut *al Mithaq al Watani* atau biasa disebut Pakta Nasional. Dalam pakta tersebut diatur jabatan dalam pemerintahan harus terdiri dari; Presiden berasal dari kaum Kristen Maronit, Perdana Menteri yang berasal

⁶⁴ http://www.lebguide.com/Lebanon/history/Lebanon_history_french_mandate.asp (diakses pada 12 Mei 2010).

⁶⁵ Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*, hlm. 116-117.

dari Muslim Sunni, Ketua Dewan Legislatif dari Muslim Shi'ah, dan Wakil Pembicara Anggota Parlemen berasal dari kaum Druze. Dengan perbandingan anggota parlemen 6:5 bagi Kristen Maronit dan kaum Muslim menurut sensus penduduk tahun 1932. Dari awal pembentukannya, Pakta Nasional merupakan sebuah sistem yang sangat rapuh terutama setelah diberlakukannya sistem yang kurang lebih serupa dengan sistem terdahulu yaitu *Mutasarrifat* dengan pembentukannya yang berujung dengan konflik sektarian.⁶⁶

Setelah merdeka, Lebanon mulai aktif dalam kancah dunia politik internasional. Salah satunya adalah menjadi anggota dari Liga Arab pada tahun 1945. Lebanon juga turut berpartisipasi pada konferensi San Francisco yang dibentuk oleh UN dan kemudian ikut menjadi anggota resminya di tahun yang sama. Pada April 1946 melalui desakan Inggris dan perundingan di London, Perancis akhirnya secara resmi memulangkan seluruh pasukannya dari wilayah Lebanon, dan pada 31 Agustus 1946 seluruh pasukan Perancis yang tersisa meninggalkan Lebanon.⁶⁷

Selama kurun waktu 1950-1960, stabilitas pemerintahan Lebanon mulai terusik dengan munculnya paham republikan, sosialis, dan nasionalis, termasuk gerakan *nasserism*⁶⁸ setelah terjadi revolusi di Mesir oleh seorang Gamal Abdul Nasser. Setelah penyerangan Inggris dan Perancis di Kanal Suez pada 1956, Gamal Abdul Nasser tidak hanya menjadi pahlawan bagi Mesir tapi juga bagi dunia Arab. Seiring kejadian tersebut, semangat persatuan Arab kaum Muslim Lebanon menjadi membumbung tinggi. Banyak kaum Muslim yang sebelumnya bersembunyi dalam dominasi pemerintahan kaum Kristen Maronit, akhirnya mulai bermunculan dengan menginginkan perombakan distribusi pemerintahan melalui pemberlakuan sensus ulang. Kaum Kristen Maronit tentu saja menolak usulan tersebut, karena sensus baru bagi mereka akan merusak Pakta Nasional

⁶⁶ [Http://www.lebguide.com/Lebanon/history/Lebanon_history_french_mandate.asp](http://www.lebguide.com/Lebanon/history/Lebanon_history_french_mandate.asp).

⁶⁷ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 73.

⁶⁸ *Nasserism* adalah sebuah ideologi gerakan nasionalisme dan Pan Arab yang dikombinasikan dengan paham Sosialisme. Ideologi ini menentang adanya komunisme di kawasan Arab karena bertolak belakang dengan tradisi dan nilai agama yang menjadi pondasi masyarakat Arab. *Nasserism* juga menolak adanya intervensi bangsa asing, karena akan menggerus nilai-nilai norma dan kemandirian bangsa Arab. *Nasserite* adalah masyarakat yang menganut ideologi *Nasserism*. Lihat: Kail C.E., *Op. Cit.*, hlm. 20., dan Badredine Arfi. *International Change and the Stability of Multiethnic States; Yugoslavia, Lebanon and Crises of Governance*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2005, hlm. 151.

yang sudah terbentuk dengan berdasarkan sensus penduduk tahun 1932. Alasan lain penolakan pemberlakuan sensus ulang penduduk adalah kedudukan umat Kristen Maronit yang tentu saja akan goyah dengan jumlah penduduk Muslim yang terus bertambah.⁶⁹

Pada tahun 1958, umat Muslim melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan dan bertikai dengan kaum Kristen Maronit. Umat Muslim mendesak pemerintah untuk bergabung dalam pembentukan *Al-Jumhuriyah al-Arabiyah al-Muttahidah*, atau Persatuan Republik Arab, agar lebih mendekatkan diri dan mendapat dukungan dari bangsa Arab, sedangkan untuk mengantisipasi umat Kristen menginginkan agar Lebanon membina kembali hubungan dengan pihak barat (Perancis dan Inggris). Presiden Camile Chamoun yang khawatir dengan stabilitas politik pemerintahannya pada akhirnya meminta bantuan Amerika Serikat dibawah Doktrin Eisenhower.⁷⁰ Pasukan berenjata Amerika Serikat dikerahkan untuk mengamankan dan meredakan situasi di Lebanon, sedangkan Jendral Fuad Chehab diangkat menjadi presiden Lebanon untuk meneruskan kesuksesan sepeninggalan presiden terdahulu yaitu Camile Chamoun.

Akan tetapi status quo Lebanon tak selamanya berlangsung normal ketika berlangsung perang sipil selama 15 tahun pada 1975-1990. Konflik tersebut dipicu oleh perlawanan PLO terhadap Israel yang berakibat mengungsinya korban-korban Palestina menuju Lebanon berangsur-angsur mencapai 400.000 jiwa. Pada tahun 1984 pasukan Amerika Serikat menyerahkan “mandat”nya⁷¹ kepada Suriah. Kawasan selatan Lebanon menjadi tidak stabil dikarenakan desakan pasukan Suriah terhadap Israel melalui okupasinya di Puncak Golan dan beberapa milisi Palestina yang bersembunyi di kamp-kamp pengungsi. Sejak sebelum tahun 1991 pasca pembentukan parlemen dengan sistem baru yaitu *Taif Agreement*, rekonstruksi pemerintahan Lebanon berturut-turut berada dibawah

⁶⁹ Kail C.E., *Op. Cit.*, hlm. 20.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Melalui Doktrin Eisenhower, sebuah negara dapat meminta bantuan ekonomi atau pasukan militer kepada Amerika Serikat. Tujuan utama dari doktrin tersebut agar Amerika Serikat dapat memasuki kawasan Timur Tengah saat konflik kanal Suez terjadi. Selain itu adalah agar dapat membendung pengaruh dari Uni Soviet yang berusaha memasuki Mesir guna mengambil alih fungsi Terusan Suez yang sangat berharga. Eisenhower memandang kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang sangat berharga akan suplai minyaknya, dan dalam masa mendatang tentu saja akan sangat berguna bagi keperluan Amerika Serikat dan Sekutunya. Lihat: Robert L.B and Lawrence H.L., *The Eisenhower Administration, 1953–1961: A Documentary History*, vol. 2 (New York: Random House, 1971), hlm. 725–26.

bayang-bayang Suriah melalui 30.000-35.000 pasukan militernya. Pasukan Suriah tidak akan meninggalkan Lebanon selama Israel berhenti mengusik Lebanon, serta atas kepentingan Suriah terhadap Lebanon.

2.2.1 Keadaan Geografi

Republik Lebanon berada di tepi laut Mediterania Asia Barat Daya. Republik Suriah menjadi batas wilayah bagian utara Lebanon sepanjang 35 km, disusul oleh Israel disebelah selatan sepanjang 79 km, serta Laut Tengah yang menjadi batas wilayah bagian barat. Kondisi wilayah dataran Lebanon didominasi oleh kawasan pegunungan, akan tetapi dalam kawasan tersebut terdapat 4 wilayah yang menjadi bagian intinya yaitu wilayah pegunungan Lebanon, Lembah Biqa, dan pegunungan Anti Lebanon. Lebanon diperkirakan memiliki luas wilayah sekitar 4015 mil.⁷² Negara ini juga memiliki curah hujan yang tinggi antara bulan Oktober sampai April yang berkisar dari 380mm di utara hingga lebih dari 1500mm di daerah pegunungan dan perbukitan. Karena memiliki curah hujan yang tergolong tinggi, Lebanon menjadi negara yang subur dibanding wilayah lain negara-negara Arab.⁷³

2.2.2 Keadaan Sosial Budaya

Penguasaan atas Lebanon yang silih berganti menyebabkan Lebanon menjadi wilayah yang multikultur, terdiri dari berbagai sekte-sekte dan golongan kaum beragama. Di negara ini setidaknya terdapat kurang lebih 18 sekte serta golongan keagamaan yang menjadikan wilayah ini memiliki relatifitas sekte yang besar. Keenam belas sekte dan golongan keagamaan tersebut dibagi menjadi tiga golongan.

Golongan pertama adalah Muslim yang terdiri dari, Syi'ah sebagai kaum terbanyak Lebanon, Sunni sebagai kaum terbesar ketiga Lebanon, Ismaili yang merupakan cabang dari Syi'ah, Druze sebagai kaum terbesar keempat Lebanon, Alawi yang merupakan cabang dari Ismaili dan berpusat di bagian utara Lebanon perbatasan Suriah. Golongan kedua adalah Kristen yang terdiri dari, Maronit

⁷² Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁷³ *The World Book Encyclopedia, Loc. Cit.*, hlm. 175.

sebagai kaum terbesar kedua Lebanon, Ortodoks Yunani sebagai kaum peninggalan era Bizantium yang merupakan kaum terbesar kelima Lebanon, Katolik Yunani sebagai kaum terbesar keenam Lebanon, Ortodoks Armenia atau Gregoria yang memiliki keterwakilan di sistem konfesional, Katolik Roma, Sekte *Jacobite Monophysite*, Katolik Suriah, Katolik *Chaldea*, Kristen, dan yang terakhir adalah Nestorian. Golongan Ketiga adalah Yahudi dengan populasi yang tidak terlalu besar di Lebanon. Relativitas sekte-sekte agama menyebabkan wilayah ini menjadi sangat multikultur dan rentan akan konflik, baik internal maupun eksternal yang memunculkan campur tangan pihak asing dengan menggunakan aliansinya pada masyarakat Lebanon.⁷⁴

2.2.3 Keadaan Ekonomi

Sebelum terjadinya konflik sipil 1975-1990, negara ini merupakan negara yang memiliki tingkat kemakmuran relatif tinggi. Melalui letak negara yang sangat strategis yaitu di tepi Laut Tengah, Lebanon menjadi transit arus lalu lintas perdagangan dari tiga benua. Dua pertiga *Gross National Product* (GNP) Lebanon berasal dari sektor jasa, perdagangan, dan terutama perbankan. Lebanon dianggap sebagai ibukota perbankan bagi dunia Arab pada umumnya dijuluki sebagai “Swiss di Timur Tengah” dalam kekuatan finansialnya. Sebagai negara yang berada dalam kondisi geografi pegunungan, ternyata tidak menyurutkan Lebanon menjadi negara tujuan wisatawan mancanegara. Kombinasi dari keindahan iklim, peninggalan bangunan-bangunan bersejarah, hotel-hotel, klub malam, restoran, tempat wisata pantai dan pegunungan, fasilitas olahraga terbuka dan festival budaya internasional serta pengaturan sistem perekonomian yang baik membuat sektor pariwisata dan perbankan menjadi industri pemasukan andalan Lebanon. Bahkan ibu kotanya, Beirut, dijuluki oleh banyak orang sebagai *The Paris From Middle East* atau Paris dari Timur Tengah.⁷⁵ Sektor-sektor lain yang menunjang perekonomian Lebanon adalah jasa asuransi. Perdagangan transito, industri, &

⁷⁴ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm., 289

⁷⁵ Majalah Edisi Koleksi Angkasa, September 2006

pertanian. Meskipun Lebanon memiliki tanah yang subur, ternyata pertanian berada di urutan terbawah dalam pendapatan sektor ekonomi Lebanon.⁷⁶

Keunggulan geografis wilayah Lebanon menjadikan penghubung antara Timur dan Barat. Transportasi yang melintasi Lebanon meliputi jalur-jalur internasional, secara umum merupakan jalur darat yang menghubungkan Eropa dengan negara Arab dan Timur. Tempat berlabuh untuk kapal-kapal pengangkut minyak dibangun di lepas pantai Tripoli dan az-Zahrani, dekat Sidon, yang merupakan pusat penyulingan minyak bumi Lebanon.⁷⁷

Perekonomian Lebanon mencapai titik terendah ketika pecahnya konflik sipil pada 1975-1990 yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan dan menghancurkan infrastruktur. Berbagai sektor penunjang perekonomian terusik terutama yang paling terkena dampaknya adalah sektor pariwisata Lebanon. Keadaan yang mencekam dan situasi yang tidak kondusif mematikan daya tarik wisata Lebanon.

2.2.4 Keadaan Politik

Masyarakat Lebanon yang kaya akan etnik dan perbedaan agama membawa dampak yang sangat besar terhadap penerapan sistem pemerintahannya. Situasi politik, ekonomi dan sosial-budaya Lebanon sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional Timur Tengah pada umumnya. Untuk itulah Lebanon menerapkan sebuah sistem pemerintahan yang khusus, yaitu sistem konfesionalisme. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi gesekan antar umat beragama dengan secara adil, mendistribusikan representasi dari semua kaum beragama ke dalam tatanan pemerintahan. Sistem Konfesionalisme juga membagi kekuatan politik berdasarkan kelompok agama dan sekte sangat, meskipun rentan menimbulkan perpecahan sosial-politik mengingat setiap kelompok politik berafiliasi pada kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi situasi regional, seperti kelompok pro-Suriah, pro-Palestina, maupun pro-Barat

Pada tahun 1943, Lebanon mengeluarkan sebuah Pakta Nasional tidak tertulis yang menjadi dasar awal pemerintahan dan cikal bakal Konfesionalisme di

⁷⁶ Arthur S.B, Alan J.D, Thomas C.D (ed), *Political Handbook of The World 1997*, New York: CSA Publication Binghamton University, 1997. Hlm., 47.

⁷⁷ *Encyclopedia Britanica Inc, Op., Cit.*, hlm. 892.

Lebanon. Pakta ini dicetuskan guna mencegah terjadinya konflik sektarian yang seringkali terjadi. Dalam pakta tersebut kekuasaan politik dalam pemerintahan didistribusikan dengan rasio 6:5. Dalam pakta tersebut disepakati bahwa kursi presiden dijabat oleh kaum Kristen Maronit, perdana menteri berasal dari golongan Sunni, dan kepala parlemen berasal dari Syi'ah. Untuk komposisi anggota parlemen sendiri terdiri dari 30 orang wakil berasal dari kaum Maronit, 20 orang dari kaum Sunni, 19 orang dari kaum Syi'ah, 11 orang Yunani Ortodoks, 6 orang dari kaum Druze, 6 orang dari kaum Yunani Katolik, 5 orang dari kaum Armenia Ortodoks, dan masing-masing 1 orang wakil dari Armenia Katolik dan Protestan.⁷⁸

Pada awal pertengahan tahun 1970 sampai dengan tahun 1990, terjadi konflik sipil yang menghalangi proses berpolitik Lebanon. Pasca konflik sipil Lebanon, rasio yang semula 6:5 diubah menjadi sama untuk mendapatkan representasi yang adil menurut dua agama mayoritas melalui *Taif Agreement*.⁷⁹ Setelah pemberlakuan *Taif Agreement*, kekuasaan di Lebanon terbagi-bagi oleh kekuatan sosial-politik yang bertentangan. Kubu militer yang mendominasi sejak meletusnya konflik sipil berkepanjangan di tahun sebelumnya, terbawa untuk ikut serta menancapkan pengaruhnya dalam reformasi politik Lebanon. Kubu yang lain adalah kaum kapitalis yang menggunakan kekuatan ekonominya melalui bantuan negara Eropa dan Amerika Serikat guna mempengaruhi keputusan dewan pemerintahan. Kubu yang terakhir adalah kubu Konservatif yang berisi para mantan pemimpin lokal sebelumnya, kubu ini tidak terlalu banyak memiliki pengaruh seperti kubu sebelumnya, karena kurangnya dukungan terutama setelah kemunculan *Taif Agreement*, banyak masyarakat Lebanon percaya bahwa negaranya harus memulai perubahan dengan memakai pola sistim yang baru melalui pembenahan pola yang lama.⁸⁰

⁷⁸ M. Riza Sihbudi. *Bara Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 1991, hlm. 29.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ <http://ddc.aub.edu.lb/projects/pspa/conflict-resolution.html> (diakses pada 20 Oktober 2010).

BAB 3

KONFLIK SIPIL LEBANON 1975-1990

3.1 Latarbelakang Konflik

Lebanon sebuah negara kecil di Timur Tengah dengan keindahan panorama alamnya yang menawan dan mempunyai keanekaragaman budaya serta etnisitas, membuat negara ini menjadi salah satu negara unggulan Timur Tengah. Akan tetapi kondisi semacam itu tidak berselang lama, Lebanon segera berubah menjadi negeri yang penuh dengan konflik bersenjata. Rakyat selalu dihampiri oleh peperangan yang bermuara baik dari konflik internal maupun eksternal. Berbagai macam pertikaian terjadi yang seringkali memakan korban jiwa dan merusak infrastruktur yang ada. Salah satu konflik yang menyita perhatian dunia adalah perang saudara yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1975-1990. Sejak saat itulah Lebanon tidak lagi menjadi surganya para wisatawan, namun sebuah medan pertempuran sektarian yang dapat membuat konflik internal sekecil apapun menjadi besar. Konflik sipil yang terjadi di Lebanon tidak mewakili konflik internal yang ada disana. Selayaknya perang saudara yang biasanya melibatkan bangsa di suatu negara, namun perang saudara di Lebanon lebih dipengaruhi oleh konflik regional di sekitarnya.

Dari akar permasalahannya ada tiga faktor yang menjadi penyebab awal mula terjadinya konflik sipil yang sangat kompleks ini, yaitu masalah pembagian kekuasaan, ketimpangan sosial-ekonomi antar kaum, dan kedatangan para pengungsi Palestina akibat dari perang Arab-Israel.⁸¹ Yang pertama, masalah pembagian kekuasaan yang dianggap tidak merata. Ketika Lebanon memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 22 November 1943 dibuatlah sebuah perjanjian yang menjadi dasar struktur politik negara itu, yaitu Pakta Nasional (*al-Misāk al-Waṭāniya*).⁸² Dalam pakta tersebut representasi kaum beragama di pemerintahan Lebanon didistribusikan dengan rasio 6:5 (6 bagi Kristen Maronit

⁸¹ Kirdi Dipoyudo, *Timur Tengah dalam Pergolakan*. Jakarta: CSIS, 1977, hlm. 109-110.

⁸² Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 80.

dan 5 bagi Muslim) berdasarkan sebuah sensus penduduk pada tahun 1932 yang menempatkan posisi Kristen Maronit sebagai kaum mayoritas, yaitu sebanyak 30% dari seluruh penduduk Lebanon.⁸³ Oleh karena itulah kemudian posisi kaum Kristen Maronit menjadi lebih dominan dibanding kaum lainnya, baik dalam pemerintahan maupun parlemen. Pada awalnya perjanjian tersebut tampak menjanjikan suatu kondisi yang stabil bagi Lebanon, namun ternyata dalam perkembangan kedepannya tidak berjalan dengan baik karena persetujuan tersebut merupakan perjanjian tidak tertulis sehingga tidak mengikat pihak-pihak yang ada di dalamnya. Dan juga karena adanya campur tangan pihak asing, yaitu Prancis, yang memiliki tujuan terselubung agar dapat menguasai Lebanon kembali kelak dengan mengintervensi proses pembuatannya, sehingga membuat penerimaan terhadap pakta tersebut bukanlah murni dari kesadaran masing-masing akan tetapi ada unsur keterpaksaan.

Kaum Muslim yang merasa dirugikan dengan pembagian seperti itu menginginkan adanya perubahan dalam sistem politik Lebanon. Salah satunya dengan pencanangan sensus ulang sehingga sistem politik yang baru tidak akan terpaku dengan poin-poin Pakta Nasional yang dibuat berdasarkan sensus penduduk tahun 1932. Namun usulan tersebut tentu saja ditolak oleh kaum Maronit mengingat kondisi demografis Lebanon dari tahun ke tahun telah mengalami perubahan dan jika diadakan sensus ulang maka akan mengancam dominasi mereka dalam pemerintahan. Disinilah kemudian muncul perbedaan kepentingan antara Kristen Maronit yang ingin mempertahankan status quo dengan kelompok Islam yang menghendaki dilakukannya perubahan.⁸⁴ Kelompok Maronit kemudian mengusulkan sebuah penawaran dimana perimbangan kekuatan di parlemen yang tadinya menggunakan rasio 6:5 akan diubah menjadi 5:5 dengan catatan yang menjabat sebagai presiden harus tetap berasal dari Maronit. Usulan tersebut mendapat dukungan dari kelompok Kristen lainnya, tetapi ditolak oleh kaum Muslim. Sebab dengan komposisi seperti itu golongan Maronit tetap akan muncul sebagai pihak yang dominan.⁸⁵

⁸³ [Http://www.lebguide.com/Lebanon/history/Lebanon_history_french_mandate.asp](http://www.lebguide.com/Lebanon/history/Lebanon_history_french_mandate.asp). (diakses pada 20 Oktober 2010).

⁸⁴ M. Riza Sihbudi, *Op. Cit*, hlm. 32.

⁸⁵ Kirdi Dipoyudo, *Op. cit*.

Penyebab yang kedua adalah terjadinya ketimpangan di bidang sosial ekonomi. Orang-orang yang memperoleh manfaat dari kemajuan ekonomi Lebanon dan hidup dalam kemakmuran dan kemewahan pada umumnya berasal dari kelompok Kristen dan para *Zuama*⁸⁶. Sementara kaum Muslim yang rata-rata hidup di tepi pantai dan bagian selatan pedalaman Lebanon harus berjuang lebih keras untuk mampu bertahan hidup ditengah himpitan kemiskinan. Mungkin pihak yang harus bertanggung jawab atas hal ini adalah Prancis karena ketika masih berkuasa di Lebanon, negara Eropa ini lebih memperhatikan kondisi kelompok Kristen, terutama Kristen Maronit karena disamping memiliki kesamaan pemahaman, juga kaum Kristen Maronit mendukung janji Perancis yang akan membawa Lebanon menjadi negara maju yang mengikuti perkembangan Barat. Mereka juga diberi kesempatan lebih untuk dapat memperoleh pendidikan yang baik dengan melakukan studi ke negara-negara Eropa, sehingga muncul sebagai golongan terpelajar dan mampu memegang kendali di bidang ekonomi. Kesempatan itulah yang tidak dimiliki oleh kaum Muslim, membuat mereka justru menjadi korban ketimpangan sosial dari kemajuan pesat ekonomi Lebanon.⁸⁷

Kondisi ketimpangan sosial antara kaum Kristen Maronit dengan Muslim semakin diperparah dengan sistem ekonomi liberal yang dianut oleh Lebanon. Negara tidak banyak ikut campur di bidang ekonomi dan menyerahkannya kepada kekuatan mekanisme pasar. Hal ini tentu saja membuat kaum pemilik modal dapat mengontrol jalannya laju perekonomian sekehendak hati dan memalingkan diri terhadap nasib orang-orang tidak mampu. Keinginan kaum miskin⁸⁸ yang

⁸⁶ *Zuama* merupakan para pemimpin/tokoh masyarakat sepeninggalan dari sistim politik warisan kekhalifahan Ottoman. Para *Zuama* biasanya dikategorikan pada tiga segmentasi, yaitu tradisional/sosial, politik, dan militer. Masing-masing segmen merefleksikan bidang-bidang yang mereka kuasai di Lebanon. Keberadaan mereka terus berlangsung secara turun temurun, dan masyarakat Lebanon menghormatinya, terutama karena pengaruh keluarga serta jasa-jasa terdahulu dari para *Zuama*. Lihat, Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 85.

⁸⁷ Samir Makdisi, *The Lessons of Lebanon: the Economics of War and Development*, London: I.B.Tauris & Co. Ltd, 2004, hlm. 29.

⁸⁸ Kaum miskin Lebanon dalam hal ini merupakan kaum Muslim yang pemukiman dan mata pencahariannya hancur akibat dari perang Arab-Palestina. Perang tersebut selain menghancurkan infrastruktur, juga memalingkan perhatian pemerintahan Lebanon terhadap kaum Muslim dengan mencabut subsidi irigasi dan memutus jalur transportasi perdagangan, karena dianggap membahayakan dan mengganggu jalannya pemulihan keamanan dengan banyaknya milisi Palestina yang menyamar menjadi pengungsi. Lihat, William L Cleveland dan Martin Burton, *Op. Cit.*, hlm. 383-384.

menghendaki adanya persamaan hak dibidang ekonomi tentu saja ditolak oleh kaum elit yang sudah sangat nyaman dengan kehidupan mereka. Perubahan menuju keseimbangan tingkat kesejahteraan sosial akan sangat sulit tercapai apabila mengandalkan terciptanya mekanisme perubahan ekonomi yang merata dan berubah dengan cepat.

Penyebab ketiga dan yang tidak kalah penting adalah kedatangan para pengungsi Palestina ke Lebanon akibat perang Palestina-Israel. Kehadiran mereka di tanah Lebanon, terutama di kawasan bagian selatan membuat jumlah penduduk kaum Muslim semakin bertambah banyak. Sampai dengan tahun 1980-an jumlah pengungsi diperkirakan sudah mencapai 300.000 orang, yang pada awalnya hanya membangun kamp pengungsi namun pada akhirnya justru menetap di wilayah Lebanon Selatan. Jumlah tersebut hampir mencapai 10% dari jumlah keseluruhan penduduk di Lebanon.⁸⁹ Pihak kaum Muslim menerima kedatangan pengungsi Palestina dengan tangan terbuka selain karena alasan solidaritas agama, keberadaan mereka juga akan memperbanyak penduduk kaum Muslim guna mengimbangi komposisi kaum Kristen yang mayoritas kaumnya menduduki kursi pemerintahan Lebanon.

Dengan jumlah penduduk kaum Muslim yang melonjak drastis, hal ini membuat kedudukan kaum Maronit menjadi terancam. Keberadaan pengungsi Palestina yang menjadi warga negara Lebanon berpotensi mengganggu proses pembagian kursi pemerintahan antara kaum Kristen Maronit dengan Muslim, sehingga kaum Kristen Maronit menolak usulan diadakannya sensus ulang sebagai dasar pembuatan sistem politik yang baru. Kaum Kristen Maronit sadar bahwa keberadaan pengungsi Palestina di Lebanon mendapat suaka politik dari PBB, sehingga mustahil bagi mereka untuk mengusir orang-orang tersebut keluar dari kawasan Lebanon.⁹⁰ Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang saling bertolak belakang antara kedua kaum. Secara umum, kelompok kiri yang terdiri dari kaum Muslim di Lebanon menuntut perubahan sistem politik dan sosial di Lebanon, yang sebelumnya sangat didominasi oleh kelompok Kristen. Sedangkan kelompok kanan, yaitu kaum Kristen Maronit memiliki motif untuk tetap mempertahankan kekuasaannya dan menumbuhkan stabilitas di Lebanon.

⁸⁹ M. Riza Sihbudi, *Op. Cit.*, hlm. 30.

⁹⁰ William Cleveland, *Op. Cit.*, hlm. 358-359.

Konflik sipil Lebanon merupakan perang yang rumit karena melibatkan banyak pihak. Konflik ini tidak hanya melibatkan kelompok – kelompok internal Lebanon sendiri namun juga pihak asing seperti Suriah, Israel, Amerika Serikat dan PBB. Masing - masing pihak memiliki tujuan tersendiri mengapa mereka memilih ikut untuk terlibat perang. Israel berusaha memasuki medan pertempuran Lebanon dengan alasan mengejar milisi - milisi Palestina. Milisi Palestina ini dianggap mengganggu stabilitas Israel karena mereka menyerang Israel dari wilayah perbatasan Lebanon Selatan, melalui kamp-kamp pengungsian yang mereka dirikan, sehingga menyulitkan pasukan Israel untuk mengejar pasukan milisi yang ikut memburu di kamp pengungsi. Sedangkan Suriah yang pada awalnya ditugaskan menjadi pasukan penjaga perdamaian pasca sepeninggalan pasukan Amerika Serikat, namun pada akhirnya Suriah melalui ambisi pribadi presiden Assad justru berkeinginan untuk mendirikan 'The Greater Syria' yang wilayahnya mencakup Suriah dan Lebanon.⁹¹

Banyak pertimbangan mengapa Suriah ingin terlibat langsung kedalam kawasan Lebanon, diantara beberapa alasan tersebut adalah.⁹² Pertama, Beirut menjadi markas yang efektif untuk angkatan bersenjata Suriah dalam melakukan mobilisasi pada masa rezim Asad. Kedua, Lembah Biqa menjadi tempat yang strategis bagi Suriah untuk menanggulangi kepungan pasukan Israel dari Bukit Golan maupun kawasan pusat industri di bagian utara Suriah. Yang Ketiga, Lebanon menawarkan keuntungan ekonomi kepada Suriah, terutama dibidang ekspor narkotika. Diperkirakan selama perang sipil di Lebanon, Suriah mendapatkan dua milyar dolar pertahun dari perkebunan opium di Lembah Biqa. Sebuah nominal yang sangat besar sehingga mampu melampaui seluruh pendapatan masyarakat Suriah kala itu.⁹³ Pertimbangan yang terakhir bagi Suriah adalah untuk menancapkan pengaruhnya terhadap Lebanon, sehingga berimbas dengan penguasaan gerakan rakyat Palestina. Dari tahun 1971 sampai dengan 1983 Lebanon menjadi markas utama PLO, dan sampai tahun setelahnya masih menjadi kawasan pengungsi Palestina. Maka jika mampu menguasai Lebanon,

⁹¹ Edwards-Milton, *Op. Cit.*, hlm. 66.

⁹² Matthew Preston, "Ending Civil War: Rhodesia and Lebanon In Perspective," dalam Abu-Khalil dan Khasad, *Determinants and Characteristics of Syrian Policy in Lebanon*, hlm. 126.

⁹³ Matthew Preston, *Loc. Cit.*, dalam *Middle East International* (11 November 1991), hlm. 11.

presiden Suriah Hafez al-Asad akan dengan mudah memberikan pengaruhnya kepada PLO yang menduduki Lebanon Selatan.

Di tahun 1976, tentara Suriah memasuki Lebanon yang dilegitimasi oleh KTT Liga Arab. Hasil dari KTT tersebut adalah membentuk pasukan perdamaian Arab yang terdiri dari tentara Suriah, Arab Saudi dan Libya dengan nama ADF (*Arab Deterrant Forces*). Namun, konflik di Lebanon tidak semakin mudah untuk diselesaikan justru menjadi semakin rumit. Beberapa pihak tidak sepakat dengan keberadaan Suriah yang pada awal keberadaannya di Lebanon mendukung kelompok kanan. Tahun 1978, Israel yang merasa terancam dengan keberadaan milisi Palestina di wilayah Lebanon selatan memutuskan untuk melakukan invasi ke wilayah Lebanon dengan tujuan utama menyerang milisi Palestina. Tahun 1980 perang saudara di Lebanon tidak lagi antara kaum Kristen dengan kaum Muslim saja, tapi berkembang menjadi sesama Kristen dan Muslim. Perang ini terjadi ketika Amal Movements (kelompok militan Syi'ah) berkonflik dengan faksi Fatah (salah satu bagian dari PLO) dan ketika milisi Khataib terlibat bentrokan senjata dengan milisi National Liberation Front. Pada tahun yang sama, konstilasi perang saudara berubah menjadi perang antar negara (Israel – Suriah) yang menggunakan Lebanon sebagai medan perangnya. Suriah yang awalnya mendukung kaum Kristen Maronit mengubah dukungannya kepada kaum Muslim. Sedangkan kaum Kristen memilih untuk berafiliasi dengan Israel dengan menghancurkan PLO dan mengusir Suriah keluar dari Lebanon.⁹⁴

Konflik sipil Lebanon tidak dapat dipisahkan dari kelompok dan partai politik yang ada. Berbagai permasalahan yang terjadi merupakan buah dari keputusan-keputusan para pemimpin kelompok dan anggota partai politik Lebanon. Tingkat etnisitas sekte keagamaan di Lebanon yang besar mempengaruhi berdirinya kelompok-kelompok dan partai politik untuk menyalurkan aspirasi dan gagasan mereka. Pembagian kekuasaan yang didasarkan kuota masing-masing kaum beragama menyebabkan kelompok-kelompok dan partai-partai politik yang berdiri menjadi eksklusif dan berujung pada perjuangannya untuk mengaspirasikan kepentingan masing-masing, baik melalui media politik maupun kekuatan militer. Berbagai kelompok dan partai politik

⁹⁴ Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*, hlm. 221.

tersebut adalah, kelompok sayap kiri atau partai yang mayoritas pengikutnya kaum Islam yaitu Partai Sosialis Progresif-PSP (*al-Hizb al-Taqadummi al-Ishtiraki*), Partai Nasionalis Sosialis Suriah, Partai Kebangkitan Sosialis Arab (*Hizb al-Ba'ath al-Arabi al-Isthiraki*), Partai Komunis Lebanon-LCP (*al-Hizb al-Shuyu'i al-Lubnani*), Organisasi Aksi Komunis Lebanon, Pergerakan Nasserite Independen-INM (*al-Murabitun*), Kelompok Perlawanan Lebanon (*Afwaj al-Muqomah al-Lubnaniyyah*), Partai Hizbullah (*Hizb Allah*), Islam Jihad (*al-Jihad al-Islami*), AMAL Islam, Pergerakan Nasionalis Arab-ANM (*al-Harakah al-Qawmiyyah al-Arabiyyah*).

Partai Sosialis Progresif-PSP (*al-Hizb al-Taqadummi al-Ishtiraki*), didirikan pada tahun 1948 dan merupakan anggota dari sosialis internasional. Partai ini merupakan partai sekuler namun hampir semua pengikutnya adalah kaum Druze yang anti barat dan sangat nasionalis. Partai Nasionalis Sosialis Suriah, didirikan pada tahun 1932 untuk mendukung pembentukan “Suriah Raya” yang mencakup wilayah Irak, Jordan, Palestina, dan Suriah sendiri. Partai Kebangkitan Sosialis Arab (*Hizb al-Ba'ath al-Arabi al-Isthiraki*), Al-Ba'ath merupakan partai sekuler pan-Arab yang terbagi menjadi beberapa fraksi. Namun setiap fraksi yang terbentuk saling bersaing akibat dari intervensi Suriah pada tahun 1976. Partai Komunis Lebanon-LCP (*al-Hizb al-Shuyu'i al-Lubnani*), awal mulanya berdiri pada tahun 1924 sebagai Partai Rakyat Lebanon, namun pada masa Lebanon Raya pendirian partai tersebut dilarang oleh Perancis sehingga baru dilegalisasikan pada tahun 1970. Selanjutnya Organisasi Aksi Komunis Lebanon, didirikan pada pertengahan tahun 1970 dengan ikut bergabungnya dua kelompok ekstrim sayap kiri, Gerakan Sosialis Lebanon dan Sosialis Lebanon. Pergerakan Nasserite Independen-INM (*al-Murabitun*), berdiri pada tahun 1958 sebagai partai Sosialis. INM lebih dikenal dengan nama divisi militernya *al-Murabitun* (*The Vigilant*). Kelompok Perlawanan Lebanon (*Afwaj al-Muwamah al-Lubnaniyyah*), atau lebih dikenal dengan nama gerakan milisinya *al-Amal*, yang berarti “harapan”. Gerakan ini didirikan oleh Imam Musa al-Shadr. Pasca invasi Israel pada tahun 1982, beberapa milisi dari pro-Iran *al-Amal* bergerilya untuk mengusir pihak asing seperti tentara Amerika, Perancis, dan Israel. Partai Hizbullah (*Hizb Allah*). merupakan pergerakan sosial dan politik kaum Lebanon

yang berdiri pada tahun 1982. Hizbullah mengemuka pada sekitar tahun 1980 ketika melawan organisasi AMAL dan terlibat dalam beberapa penculikan orang Barat. Kelahiran gerakan ini disebabkan faktor utama dan beberapa faktor pendukung. Faktor utama yaitu invasi Israel pada tahun 1982 yang menyebabkan pembantaian 2000 orang pengungsi dan kehadiran pasukan PBB. Sedangkan faktor pendukungnya adalah atas marjinalisasi sosial dan politik terhadap komunitas Syi'ah yang berkepanjangan di Lebanon, pengaruh revolusi Islam Iran dan perpecahan gerakan Syi'ah di Lebanon.⁹⁵ Islam Jihad (al-Jihad al-Islami), merupakan kelompok tersangka dari pengeboman di Beirut pada tahun 1983 yang menewaskan 300 orang tentara Amerika serta Perancis. AMAL Islam merupakan bentuk ketidaksetujuan pecahan sebagian kelompok AMAL pada tahun 1982 yang dilaporkan sebagai tenaga militer Hizbullah. Pergerakan Nasionalis Arab-ANM (*al-Harakah al-Qawmiyyah al-Arabiyyah*), merupakan sebuah partai yang berorientasi dengan falsafah Marxisme. Organisasi ini didirikan pada tahun 1948, oleh seorang milisi Palestina yang bernama Geroges Habash.

Selanjutnya kelompok sayap kanan Kristen atau kelompok yang mayoritas pengikutnya adalah kaum Kristen yaitu Partai Phalangis, Partai Perlawanan, Partai al-Wa'ad, Partai Nasional Liberal-NLP (Hizb al-Ahrar al-Watani), Brigade Marada, Blok Nasional (al-Kutla al-Watani). Partai Phalangis (al-Katib al-Kubnaniyah/Phalangis Lebanon), partai ini berdiri pada tahun 1936 dan sekaligus menjadi organisasi front militan dengan pendukung kaum Kristen Maronit terbesar di Lebanon. Partai Phalangis menjadi salah satu gerakan yang memicu terjadinya perang sipil pada tahun 1975. Partai Perlawanan (*Forces*), partai ini didirikan pada tahun 1976 dan dipimpin oleh Samir Geagea sebagai milisi Kristen Maronit. Partai al-Wa'ad, dibentuk pada tahun 1991 oleh anggota tentara Lebanon. Pada pembentukannya, organisasi ini menerapkan gerakan pro-Suriah. Partai Nasional Liberal-NLP (Hizb al-Ahrar al-Watani), merupakan kelompok sayap kanan kaum Kristen Maronit yang didirikan pada tahun 1958. Partai ini menolak segala bentuk koalisi dengan kelompok Islam lainnya, terutama yang terlibat dengan Palestina. Brigade Marada, merupakan milisi bentukan kaum Kristen Maronit yang membangun basis militernya di Lebanon Utara. Blok

⁹⁵ David j. Whittaker (ed), *The Terrorism Reader*. London: Routledge, 2003, hlm. 51.

Nasional (al-Kutla al-Watani), Merupakan partai kaum Kristen Maronit yang berdiri pada tahun 1943. Partai ini merupakan partai yang berdiri sebagai oposisi pihak militer yang ikut terlibat dalam politik.

Kelompok-kelompok lainnya yang ada di Lebanon adalah Front Demokrasi Parlemen-FDP, Partai Konstitusi (al-Dustur), Partai Demokrat, Federasi Revolusi Armenia-FRA, Persatuan Kristen Demokratis Lebanon. Front Demokrasi Parlemen-FDP (al-Jabhah al-Dimuqratiyyah al-Barlamaniyah), adalah partai pendukung berlangsungnya model pemerintahan dari Presiden Fuad Cheheb. Partai Konstitusi (al-Dustur), didirikan pada tahun 1943 untuk mendukung sektor ekonomi Lebanon terutama di bidang perdagangan. Partai ini mendukung gerakan Arab Nasionalis atau Pan Arab. Partai Demokrat, merupakan partai sekuler yang didirikan pada tahun 1969, dan sangat mendukung terciptanya lebih banyak perusahaan swasta baik dari dalam maupun luar negeri. Federasi Revolusi Armenia-FRA, sebuah partai sosialis Armenia dengan pondasi anti kegiatan dari Soviet yang beraliansi dengan kaum Kristen Maronit. Persatuan Kristen Demokratis Lebanon, merupakan sebuah kelompok afiliasi dari Demokrasi Kristen Internasional.⁹⁶

3.2 Konflik Sipil 1975-1990

Konflik sipil tahun 1975 di Lebanon merupakan sebuah kulminasi dari berbagai konflik yang sering terjadi sebelumnya. Konflik antar golongan pada awalnya meledak pada tahun 1958 ketika pasukan Israel memasuki kawasan Lebanon, tetapi pada tahun itu juga konflik bisa segera dihentikan, namun sayangnya konflik kembali meledak pada tahun 1975 dan berkembang menjadi perang saudara yang berkepanjangan. Perang saudara ini telah berkembang menjadi konflik antar kepentingan yang pada awalnya terjadi antara pihak yang pro dan kontra status quo. Hingga sulit bagi pemerintahan untuk membedakan mana kawan dan mana lawan. Itulah gambaran yang terjadi pada masyarakat Lebanon kala itu. Dahulu Lebanon dijuluki sebagai surga para wisatawan, kemudian menjelma menjadi ladang peperangan para serdadu bersenjata.

⁹⁶ Banks, Arthur S, Alan J.D dan Thomas C.M. (ed), *Political Handbook of The World 1997*. New York: CSA Publication Binghamton, 1997, hlm. 484.

Perang Sipil yang berkejolak merupakan buah dari rasa ketidakpercayaan para politisi terhadap kinerja pemerintahan dalam mengambil keputusan atas berbagai masalah yang sedang dialami Lebanon, diantaranya adalah mengenai kedatangan para pengungsi Palestina dan sistem pemerintahan yang condong ke kaum Kristen. Salah satu politisi terkemuka yang sangat menginginkan perubahan dalam roda pemerintahan Lebanon adalah Kamal Junbalat, pemimpin dari kaum Druze kala itu. Untuk dapat lebih banyak mendapat dukungan, terutama dari kaum Muslim yang memiliki persamaan visi, maka Kamal Junbalat mendirikan sebuah organisasi koalisi bernama LNM (*Lebanese National Movement*).⁹⁷ Tujuan utama pendiriannya adalah untuk mempercepat perbaikan administratif secara menyeluruh, penghapusan dasar politik konfesionalisme yang kuotanya berdasarkan sensus tahun 1932, dan dukungan untuk prajurit Palestina.

LNM dengan Kamal Junbalat sebagai pemimpinnya juga merupakan salah satu penyebab dari meletusnya perang sipil.⁹⁸ Sedangkan dari pihak lain yang menentang visi dari Kamal Junbalat adalah pemimpin politik kaum Kristen Maronit yaitu Pierre Gemayel, sebagai ujung tombak gerakan Phalangis, dan Camile Chamoun yang pernah menjabat sebagai presiden. Dengan keadaan kaum Kristen Maronit yang diuntungkan oleh kondisi pemerintahan dibawah sistem politik konfesionalisme, maka segala usaha akan dilakukan untuk mempertahankan kondisi tersebut. Dalam menyiapkan konfrontasinya dengan milisi Palestina, militer-militer dari kaum Kristen Maronit menyiapkan persenjataan dengan skala besar, begitupun dengan PLO dan organisasi sayap kiri yang menyiapkan hal serupa. Kedua pemimpin saling bertikai dengan kepentingannya masing-masing, sampai pada pertengahan April April 1975 ketika masing-masing kaum membekali diri dengan senjata. Reruntuhan gedung seakan menjadi saksi bisu perang saudara paling berdarah yang pernah ada di Lebanon. Pemerintahan lumpuh, sarana pra sarana hancur, dan korban jiwa yang terus bergelimpangan.⁹⁹

Banyak pihak berbeda pendapat mengenai asal muasal dari konflik sipil tahun 1975-1990, akan tetapi bukti yang paling kuat sebagai penyebab konflik

⁹⁷ Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*, hlm. 174.

⁹⁸ William L Cleveland dan Martin Burton, *Op. Cit.*, hlm. 384.

⁹⁹ *Ibid.*

sipil tersebut adalah pada Februari 1975 ketika pendukung para nelayan yang didominasi oleh kaum Muslim melakukan demonstrasi di Sidon untuk menentang didirikannya *Protein Corp*, sebuah perusahaan perikanan milik Camile Chamoun (dia adalah seorang Kristen Maronit) yang akan menguasai jalur distribusi perikanan di Sidon. Pasukan Lebanon dikerahkan ke lokasi demonstrasi, akan tetapi karena kondisi tidak berujung membaik, demonstrasi berubah menjadi baku tembak. Politisi Muslim yang mendengar kabar baku tembak di Saïda menentang keras pengerahan pasukan Lebanon karena merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berdemonstrasi secara demokratis, mereka juga mempertanyakan kenapa pasukan lebih memilih menembaki warganya sendiri daripada mempertahankan perbatasan Lebanon dari serbuan Israel.¹⁰⁰

Diantara korban jiwa dalam pertikaian antara demonstran dengan pihak militer adalah Maruf Saad, salah seorang pemimpin Sunni yang disegani sekaligus aktifis gerakan *Naserrism* dan juga pemimpin dari demonstran di Sidon. Franjiyeh yang menjabat sebagai presiden melarang pengusutan lebih lanjut mengenai kematian Maruf Saad dengan alasan untuk meredam konflik lebih lanjut. Akan tetapi ternyata usahanya sia-sia, konflik hebat justru bertambah dengan kehadiran PLO serta kelompok *Naserrite* dan organisasi sayap kiri di awal Maret 1975 yang ikut terlibat bentrok dengan pasukan Lebanon.¹⁰¹

Sebagai balasan, kelompok Phalangis melakukan demonstrasi serupa dengan alasan solidaritas kepada pasukan Lebanon di Timur Beirut. Pada 12 Maret 1975 pejabat pemerintahan yang berwenang mengabulkan permintaan masyarakat Sidon dan pendukungnya untuk mencegah konflik lebih lanjut. Dua komandan pasukan dipindah tugaskan dan gubernur Sidon selama sebulan diberikan sanksi tugas. Sebulan kemudian tepatnya 13 Mei 1975, diumumkan bahwa proyek *Protein Corp* dibatalkan dan para nelayan di Sidon mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami pasca konflik dengan pasukan Lebanon.¹⁰²

¹⁰⁰ <http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field%28DOCID+lb0151%29> (diakses pada 26 Oktober 2010).

¹⁰¹ Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*, hlm. 183.

¹⁰² *Ibid.*

Keadaan mulai membaik setelah pemerintah menyanggupi kemauan dari para demonstran, akan tetapi pada 13 April 1975, sebuah mobil menembaki jemaah pendukung dari gerakan Phalangis di depan sebuah gereja di Ayn al-Rummaneh (yang kemudian diyakini sebagai misi untuk membunuh Pierre Gemayel) dan melukai belasan orang-orang Phalangis. Beberapa jam kemudian milisi Phalangis bereaksi dengan menembaki bus yang menuju Tal al-Za`tar, sebuah kamp pengungsian kaum Muslim Palestina, dan berhasil membalas dengan membunuh 21 orang warga Palestina¹⁰³. Peristiwa baku tembak terjadi diseluruh kawasan selatan Beirut antara Phalangis dan PLO yang dibantu kaum Muslim Lebanon, gerbang menuju perang berdarah selama 15 tahun pun akhirnya terbuka.¹⁰⁴

Pada akhir Juni 1975 pasukan PLO menerima untuk melakukan gencatan senjata dan menarik pasukannya selama sisa tahun 1975. Akan tetapi meskipun PLO telah menarik pasukannya, ternyata tidak menyelesaikan masalah perbedaan kepentingan antara masyarakat Kristen Maronit dan Muslim di Lebanon. Bentrokan terulang kembali pada Agustus 1975 antara LNM yang diketuai oleh Kamal Junbalat seorang Druze, dengan Phalangis. Pertempuran mengambil lokasi di Beirut dengan masing-masing pihak menggunakan gedung-gedung tinggi perkantoran dan hotel sebagai benteng artileri. Kota Beirut yang menjadi pusat kegiatan kosmopolitan masyarakat berubah menjadi zona peperangan meninggalkan gedung-gedung menjadi puing berserakan. Akhir tahun 1975 konflik mulai merambah ke arah yang lebih buruk ketika Phalangis dan para pendukungnya menguasai sebagian kawasan Beirut dan mulai mengusir kaum Muslim yang tinggal disana. Tindakan ini membuat kawasan Beirut menjadi sebuah kawasan sektarian yang terbagi-bagi berdasarkan kekuasaan kelompok mayoritas.¹⁰⁵

Pada Januari 1976, Phalangis dan pendukungnya dari kumpulan partai kristen membentuk koalisi yang bernama LF (*Lebanese Front* atau *Jabhat al-*

¹⁰³ Tidak ada kepastian berapa jumlah pasti korban jiwa warga Palestina saat itu, namun berbagai sumber ada yang menyebutkan 26 orang, bahkan 27 orang meninggal dunia termasuk diantaranya adalah pengawal Pierre Gemayel. Lihat : Kail C.E., *Lebanon's Second Republic Prospects for the Twenty-first Century*, hlm 32, dan William L Cleveland dan Martin Burton, *A History Of The Modern Middle East 3rd ed*, hlm. 385.

¹⁰⁴ Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*, hlm. 183.

¹⁰⁵ William L Cleveland dan Martin Burton, *Op. Cit.*, hlm. 385.

Lubnaniyya) yang diketuai Camile Chamoun, tujuan pembentukan koalisi tersebut adalah sebagai tandingan atas gerakan LNM yang diprakarsai oleh Kamal Junbalat. LF mulai mengerahkan pasukannya dan kemudian berusaha menduduki kamp pengungsi Palestina di Tal al-Za'tar di pinggiran Beirut. Karena basis pendukung PLO berasal dari kamp-kamp pengungsi Palestina, pendudukan kamp Tal al-Za'tar menarik kembali PLO untuk terlibat kembali ke dalam konflik. Di saat yang bersamaan, pasukan militer Lebanon mulai terpecah belah untuk bergabung dengan organisasi yang merefleksikan agamanya.¹⁰⁶ Tanpa bala tentara dan pemerintahan yang efektif, Lebanon semakin terjun lebih dalam menuju kehancuran dibalik konflik sipil sektarian

3.3 Keterlibatan Suriah dan Israel

Jalannya peperangan terus menyebar dan sampai kemudian perlahan-lahan jatuh ke campur tangan negara tetangga Suriah dan Israel yang sama-sama memiliki kepentingan di Lebanon. Kepentingan politik Suriah di Lebanon sampai kemudian diketahui sekretaris negara Amerika Serikat, Henry Kissinger, yang mengupayakan strategi untuk menyelesaikan konflik Arab-Israel yang berdampak pada Lebanon. Sejak Januari 1976 pemerintah Amerika Serikat sudah berupaya untuk mencari jalan keluar melalui jalur hubungan diplomasi politik kepada Suriah dan Lebanon, akan tetapi selalu menempuh jalan buntu. Pada 18 Maret, Presiden Franjiyeh meminta pertolongan Suriah dengan bantuan keamanan militernya. Akan tetapi Suriah tidak dapat menjamin segala sesuatu yang berhubungan dengan keamanan di perbatasan Israel, dan berharap bahwa Amerika Serikat akan mendorong Israel untuk tidak menganggap Suriah berkepentingan atas masalah Israel-Palestina. Israel pun menanggapi dengan persyaratan bahwa Suriah harus menjauhi kamp Israel di Beirut – Jalan Damaskus dengan jarak minimal 10 kilometer, atau yang biasa disebut dengan *red lines*.¹⁰⁷

Di saat Suriah bernegosiasi dengan Lebanon, Hafiz al-Assad mengirimkan pasukan PLA (*Palestine Liberation Army*) dibawah kepemimpinannya ke Lebanon. Suriah mengklaim bahwa langkahnya untuk meredam konflik sipil dan

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*, hlm 195.

mengembalikan stabilitas Lebanon, akan tetapi dibalik alasan itu sebenarnya langkah Suriah adalah untuk memperluas pengaruhnya di Lebanon. PLA melakukan patroli di Beirut dan membangun markasnya di Biqa. Penugasan PLA juga untuk menyelamatkan pasukan Kristen yang terpojok oleh gempuran PLO dan pasukan Junbalatt.¹⁰⁸ Setelah saling gempur selama berbulan-bulan dan tidak menemui titik temu, Yaseer Arafat selaku pemimpin PLO menghubungi Pangeran Fahd meminta agar Arab Saudi bergerak sebagai penengah.

Melalui bujukan Arab Saudi, PLO dan pasukan Suriah melakukan gencatan senjata pada 15 Oktober 1976. Diadakanlah konferensi di Riyadh, Arab Saudi, yang diwakili representasi dari negara Mesir dan Kuwait sebagai negara netral, dan Suriah, Lebanon, serta PLO sebagai pihak yang bertikai. Para representasi masing-masing negara menandatangani perjanjian damai antara lain dilaksanakannya gencatan senjata dan penempatan 30.000 pasukan Arab ADF (*Arab Deterrent Force*) di Lebanon untuk mengawasi proses perdamaian.¹⁰⁹ Meskipun pasukan ADF ada dibawah kekuasaan Ilyas Sarkis selaku presiden Lebanon, akan tetapi pasukan ADF yang sebagian besar terdiri dari militer Suriah membuat presiden Lebanon tidak memiliki pengaruh yang banyak, perintah pasukan ADF justru didominasi sepenuhnya oleh Suriah. Kehadiran ADF meskipun mendapat dukungan dari bangsa Arab tetap sebagai sebuah tugas yang sangat berat di Lebanon, karena selain mendamaikan pertikaian orang-orang Lebanon juga mengamankan perbatasan Selatan antara Palestina dan Israel.¹¹⁰

Perang sipil telah meruntuhkan kekuatan pusat pemerintahan Lebanon, akan tetapi tidak membuat politisi Lebanon untuk segera mengembangkan formula yang lebih baik dari sistem konfesionalisme terdahulu. Akibatnya konflik terus berkembang dan akibatnya telah membumi hanguskan Beirut, merenggut 30.000 – 40.000 korban jiwa dari berbagai pihak, serta invasi militer dari Suriah yang berkedok keamanan internasional. Usaha dari Presiden Ilyas sarkis untuk membangun kembali dan menyatukan basis militer di Lebanon tidak berjalan dengan semestinya karena rasa ketidakpercayaan antar organisasi dan masing-

¹⁰⁸ William L Cleveland dan Martin Burton, *Op. Cit.*

¹⁰⁹ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 204.

¹⁰⁹ Kail C.E, *Op. Cit.*, hlm. 32.

¹¹⁰ *Ibid.*

masing pasukannya. Terlebih semenjak peristiwa tahun 1977 yang merenggut nyawa Kamal Junbalat seorang aktivis gerakan LNM. Banyak pengikut dari gerakan LNM mencurigai pembunuhan Kamal Junbalat dilakukan oleh kaum Kristen Maronit, akan tetapi kaum Kristen Maronit menyangkalnya, mulailah muncul rasa saling tidak percaya antar kaum setelah peristiwa kematian Kamal Junbalat.¹¹¹

Kondisi Lebanon sempat berangsur membaik pada Maret 1978¹¹² ketika UN *Security Council* membentuk pasukan UNIFIL (*United Nations Interim Force*) di Lebanon melalui resolusi 425.¹¹³ UNIFIL memiliki tiga tugas penting yang dimandatkan oleh UN *Security Council*, ketiga tugas tersebut adalah. Pertama, memastikan penarikan mundur pasukan Israel di kawasan Selatan Lebanon. Kedua, mengembalikan perdamaian internasional dan keamanan serta membantu pemerintah Lebanon untuk menjamin pengembalian otoritas di seluruh kawasan. Yang ketiga, menjamin bahwa seluruh daerah operasi UNIFIL tidak dipergunakan untuk kegiatan permusuhan dalam bentuk apapun.¹¹⁴ Dari ketiga tugas yang diemban UNIFIL, hanya tugas pertama yang berhasil dijalankan. Israel meninggalkan kawasan Lebanon pada Juni 1978, dan membuat pergerakan PLO menjadi semakin leluasa mendirikan markas peninggalan Israel. Pada 3 Mei 1978, terjadi bentrokan pertama antara pasukan PLO dengan UNIFIL dari kontingen Perancis di kota pelabuhan Tyre. Setelah baku tembak tersebut, UNIFIL memilih untuk menjauhi kawasan Tyre. Baku tembak antara pasukan UNIFIL dengan PLO terus terjadi sampai pertengahan tahun 1982, dengan hasil terus terpojoknya pasukan UNIFIL.¹¹⁵

Pada 22 Mei 1982 Menteri Pertahanan Israel, Ariel Sharon, mengunjungi Amerika Serikat dan mengutarakan bahwa cepat atau lambat Israel akan

¹¹¹ William L Cleveland dan Martin Burton, *Op. Cit.*, hlm. 386.

¹¹² Sebelumnya 25.000 pasukan Israel telah menginvasi Lebanon sampai dengan daerah sungai Litani dengan kepentingan untuk memburu pasukan PLO yang terus membombardir Israel melalui kawasan Selatan Lebanon, sampai akhirnya Amerika Serikat dan UNIFIL turun tangan karena Israel telah melanggar batas wilayah dengan memasuki Lebanon. Lihat: William L Cleveland dan Martin Burton, *Op. Cit.*, hlm. 387.

¹¹³ Pasukan tersebut dibentuk untuk mengantisipasi operasi *Litani* yang dicanangkan Israel guna menyisir kawasan perbatasan selatan Lebanon. Tujuan operasi tersebut adalah untuk mengamankan kawasan Utara Israel dari milisi Palestina dan PLO. Lihat: John Laffin, *War of Desperation (Lebanon 1982-1985)*, London: Osprey Publishing, 1985, hlm. 18.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

menempuh langkah yang tegas terhadap aksi militer PLO terhadap Lebanon, karena hampir semua serangan teroris Palestina dan PLO terhadap Israel dimulai dari kawasan Lebanon.¹¹⁶ Kemudian Ariel Sharon menemui Bashir Gemayel untuk bernegosiasi agar mengizinkan pasukan Israel memasuki wilayah Lebanon, dan meminta Bashir Gemayel menginstruksikan pasukan phalangisnya serta meminta Suriah untuk menghindari pasukan Israel yang sedang beroperasi. Sayangnya tindakan tersebut justru membuat kelompok sayap kiri kecewa dan menuduh Gemayel telah menjual kemerdekaan Lebanon kepada Israel. Pada 14 September 1982, Bashir Gemayel dibunuh oleh Habib Chatouni, seorang aktivis *Syrian Socialist National Party*, dengan sebuah bom waktu di kediaman Gemayel. Amin Gemayel kemudian menggantikan posisi Bashir Gemayel untuk menjabat sebagai Presiden terpilih melalui keputusan parlemen Lebanon.¹¹⁷

Dari tahun 1976 sampai 1982, Lebanon berubah menjadi kumpulan kawasan konflik sektarian, dengan masing-masing sekte/kaum yang memiliki organisasi militernya sendiri, kemudian berlanjut dengan keterlibatan pasukan asing yang memperkeruh permasalahan Lebanon. Ketika pasukan Israel melintasi perbatasan dan sampai di Lebanon pada Juni 1982, babak menuju perang bersejarah dan kontroversial dimulai. Dua hari setelah kematian Bashir Gemayel atau tiga bulan setelah Israel mendaratkan pasukannya di Lebanon, terjadi tragedi Sabra dan Shatila yang mengemparkan dunia.¹¹⁸

Sabra dan Shatila merupakan kamp pengungsi di sebuah kawasan selatan Beirut, tepatnya di kawasan pinggiran kota. Dengan populasi yang terdiri dari orangtua dan anak-anak, pasukan Phalangis meyerbu kamp Sabra Shatila tanpa perlawanan karena kamp Sabra dan Shatila telah diambil alih oleh Israel, dengan kata lain Israel telah mencederai perjanjian UN. Phalangis memasuki kamp dengan tujuan untuk membalas dendam serta mencari tokoh utama dari pembunuh Bashir Gemayel. Operasi khusus Phalangis ini diketuai oleh Elie Hobeika, seorang garis keras Phalangis sekaligus kaki tangan Bashir Gemayel.¹¹⁹ Phalangis mendapat ijin memasuki kamp oleh Israel, dan dengan seketika membunuh secara

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 20-21.

¹¹⁷ John Laffin., *Op. Cit.*, hlm. 169-170.

¹¹⁸ Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*, hlm 218.

¹¹⁹ John Laffin., *Op. Cit.*, hlm 170.

kejam 1000 orang termasuk orang tua, wanita dan anak-anak yang ditinggalkan oleh pasukan PLO yang mengevakuasi diri dari pasukan Israel.

Tragedi Sabra dan Shatila membuat dunia internasional geram terhadap segala operasi Lebanon termasuk Phalangis, serta terhadap reaksi Israel yang tiba-tiba berubah dengan menginvasi Lebanon kembali. Melalui desakan masyarakat Israel dan dunia, pemerintah Israel membentuk, Komisi Kahan, untuk menginvestigasi peristiwa Sabra dan Shatila.¹²⁰ Pada Februari 1983 diputuskan bahwa tidak ditemukan bukti pasukan Israel terlibat dalam pembunuhan, akan tetapi dapat dipastikan bahwa Menteri Pertahanan Ariel Sharon, Kepala staff Letnan Jendral Raphael Eitan, kepala Intelejen Militer Mayor Jendral Yoshua saguy, Komandan Amir Drori dan Komandan di sektor Beirut Brigadir Jendral Amos Yaron bersalah. Sharon dan Saguy dipecat dari jabatannya, namun Eitan tidak mendapat hukuman karena dia akan pensiun dua bulan kemudian dari jabatannya. Drori juga tidak mendapat hukuman, sedangkan Yaron mendapat sanksi 3 tahun dari militer.¹²¹

Pada tahun 1983 Israel pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Lebanon. Mereka menjalankan sebuah evakuasi yang akan selesai pada tahun 1985. Akan tetapi pada kenyataannya evakuasi tersebut tidak berjalan dengan semestinya sampai pada tahun yang ditetapkan. Israel terus menduduki zona keamanan di kawasan Selatan Lebanon, sebuah kawasan yang mencakup 10% wilayah Lebanon. Sampai tahun 1985, Israel telah kehilangan 500 pasukannya selama berada di Lebanon.¹²² Di tahun 1983 pasukan ADF yang sebelumnya mengamankan Lebanon membubarkan diri, dan menyisakan pasukan Suriah yang membentuk PLA (*Palestine Liberation Army*). Pada tahun 1985 setelah pasukan multinasional dan Israel berangsur-angsur meninggalkan Lebanon, AMAL mengambil alih kawasan selatan Lebanon dan membangun kamp-kamp disekitar Beirut. Terjadi pertempuran didekat Sidon dan sekitarnya antara LF dengan AMAL-PSP yang dibantu Suriah. Pasukan AMAL yang terdiri dari kaum Shi'ah dan Druze terus menekan membabi buta, membuat LF mundur dan memaksa

¹²⁰ William L Cleveland dan Martin Burton, *Op. Cit.*, hlm. 388-389.

¹²¹ John Laffin., *Op. Cit.*, hlm 172.

¹²² William L Cleveland dan Martin Burton, *Op. Cit.*

17.000 keluarga kaum Kristen mengungsi ke Jezzini dan sekitar Beirut. Melalui koalisi AMAL-PSP tersebut, mereka telah menguasai kawasan Barat Beirut.¹²³

Pada akhir tahun 1985, sebuah pertemuan *tripartite* dilaksanakan di Damaskus yang bertujuan untuk menghilangkan kejenjangan sektarian yang menjadi masalah di Lebanon. Pertemuan itu menghasilkan beberapa keputusan yaitu, kesamaan representasi sektarian antara kaum Kristen dengan Muslim, kemudian abolisi politik sektarian dengan masa transisi, yang terakhir adalah keseimbangan baru pada hak prerogatif presiden terhadap perdana menteri dan kabinetnya. Dalam perjanjian ini juga disebutkan Lebanon akan tetap sebagai negara Arab berkenaan dengan identitasnya. Perjanjian tersebut membahas juga mengenai hak voting masyarakat Lebanon yang dikurangi menjadi mulai dari umur 18 tahun dari 21 tahun. Kemudian mendirikan Senat yang mengurus pertanyaan maupun pengajuan konstitusi, amandemen, naturalisasi, deklarasi perang dan perdamaian dari berbagai kaum di Lebanon. Yang terakhir, persetujuan ini membuka hubungan bilateral kembali antara Lebanon dengan Suriah.¹²⁴

Meskipun persetujuan *Tripartite* sebenarnya mendapat sambutan yang baik dari berbagai kalangan, presiden terpilih, Amin Gemayel, menolak rancangan persetujuan tersebut. Amin Gemayel menentang persetujuan tersebut karena kelayakannya masih lemah untuk diterapkan. Dia juga menyayangkan bahwa salah satu keputusan persetujuan itu akan melemahkan posisinya saat ini, kemudian juga penghapusan politik sektarian di Lebanon akan menutup sistem politik demokrasi di Lebanon sehingga memicu timbulnya sekularisasi. Pada bulan Februari, dia memaksa parlemen untuk menolak persetujuan *Tripartite*. Persetujuan tersebut pada akhirnya menemui jalan buntu karena tidak disetujui, dikemudian hari persetujuan *Tripartite* tersebut menjadi salah satu dasar dari pembentukan *Taif Agreement*.¹²⁵

Pada akhir 1987 sampai dengan awal tahun 1988, Lebanon mengalami hampir kegagalan di segala bidang. Pembunuhan dan penyanderaan terus meningkat terutama ditujukan kepada tokoh-tokoh penting Lebanon, bom dipicu

¹²³ Charles Winslow, *Op. Cit*, hlm:251

¹²⁴ Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*, hlm. 226.

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 226-227.

dimana-mana dan terus menyampaikan pesan-pesan kematiannya, bahkan masyarakat terus hidup di dalam lingkaran sektarian. Para kalangan ekonomi juga menyebut tahun ini sebagai “masa keterpurukan yang hampir menuju kesempurnaan” karena pemerintahan tidak menjalankan tugasnya, dan justru saling menuduh kepentingan satu sama lain. Terlebih lagi pasukan militer Lebanon yang terpecah belah dan tak mampu berbuat apa-apa. Kedatangan 7000 pasukan Suriah beberapa bulan sebelumnya dengan maksud mengamankan situasi justru menambah permasalahan konflik yang sedang terjadi antara AMAL dengan Hizbullah, yang saling berebut dominasi di Beirut.¹²⁶

Perseteraan antara AMAL dan Hizbullah mencapai puncaknya di tahun 1989. Kedua kubu bersaing memperebutkan Iqlīm al-Tuffah, sebuah kawasan perbukitan sepanjang Jezzīn sampai Nabatiyah di Selatan Lebanon. Suriah yang pada konflik AMAL-Hizbullah sebelumnya ikut berperang dipihak AMAL, pada konflik kali ini lebih memilih untuk berpartisipasi dengan cara berdiplomasi yang dibantu Iran. Sebuah persetujuan berhasil dicapai dengan kesepakatan bahwa Hizbullah dipaksa untuk menyerahkan daerah kekuasaannya di kawasan-kawasan penting sebelah Selatan Lebanon demi keperluan militer, dan keberadaannya hanya sebatas dibidang politik, kebudayaan, dan non militer. Sedangkan AMAL, dengan dukungan Suriah, diberikan wewenang menjaga keamanan di kawasan Selatan Lebanon. Kesepakatan tersebut telah menyelesaikan konflik di Lebanon untuk sementara di Selatan Lebanon, dan membawa babak baru bagi pemecahan masalah Lebanon kedepannya.¹²⁷

3.1 Perdamaian

Taif Agreement pada tahun 1989 menandai awal dari berakhirnya perang sipil yang berlangsung selama 15 tahun di Lebanon. Dipastikan hampir 100.000 orang meninggal dunia, dan 100.000 lainnya mengalami cacat akibat dari perang sipil Lebanon. Seperlima penduduk Lebanon, atau 900.000 orang meninggalkan kediannya yang luluh lantah akibat konflik sektarian terburuk yang pernah terjadi. Korban-korban penculikan era pertengahan 1980an ketika berlangsungnya

¹²⁶ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 254.

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 261.

gelombang nasionalisme Arab akhirnya dipulangkan kembali ke Barat pada Mei 1992.¹²⁸ Perang sipil Lebanon merupakan konsekuensi dari ketidaktegasan para pejabat pemerintah yang tidak bisa membedakan aspek internal konflik dari dimensi sektarian. Konflik berlarut-larut karena tidak ada kesepakatan mutlak antar kaum beragama di Lebanon mengenai struktur pemerintahan. Permasalahan terletak pada pembagian kekuasaan komunitas beragama terhadap sistem pemerintahan Konfesionalisme yang tidak lagi dapat merefleksikan kondisi demografis Lebanon. Pemulihan pemerintahan membutuhkan pembangunan ulang konstitusi dan terutama Pakta Nasional yang selama ini menjadi pedoman pemerintahan secara tidak langsung. Untuk itulah dibutuhkan sebuah formula yang tidak hanya dapat menghentikan peperangan tetapi juga dapat membangun kembali lembaga pemerintahan dan perekonomian, memperbaiki pola pikir antar kaum, mempertegas hubungan dengan dunia internasional, serta yang paling utama adalah mencegah terpicunya konflik dikemudian hari.

Arab Saudi yang sebelumnya juga menjadi penengah ketika terjadi konflik Suriah dan PLO di Lebanon berusaha untuk terlibat masuk kembali mencari solusi. Setitik cerah harapan muncul setelah berbagai usaha gencatan senjata, pembicaraan dan konferensi, sebagian besar dewan legislatif Lebanon berhasil dibujuk untuk mengikuti pertemuan di Taif, Arab Saudi. Total 62 deputi, 31 Muslim dan 31 Kristen (yang terpilih pada tahun 1972), berusaha untuk membentuk landasan konstitusi baru Lebanon.¹²⁹

Meskipun tahun berikutnya konflik sipil masih terjadi, namun tidak seburuk konflik-konflik sebelumnya karena telah diredam oleh adanya *Taif Agreement*. Salah satu harapan dari disepakatinya perjanjian tersebut adalah mengubah representasi umat beragama di parlemen yang semula 6:5 menjadi seimbang antara kaum Muslim dan Kristen. Hal ini dilakukan dengan menambah sembilan kursi baru bagi kaum Muslim, yang tiga kursinya diberikan untuk kaum Muslim Shi'ah. Melalui perjanjian ini juga Suriah diharapkan dapat menarik pasukannya dari Lebanon setelah kondisi politik berangsur membaik dan

¹²⁸ <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/lebanon.htm> (Diakses pada 31 Oktober 2010)

¹²⁹ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 264.

memungkinkan dari segi keamanan.¹³⁰ *Taif Agreement* akhirnya disahkan pada 22 Oktober 1989, para deputi dan dewan bertemu kembali di pangkalan udara Qulayat (Utara Tripoli) pada 4 November dan meratifikasi perjanjian tersebut. Kemudian melalui perjanjian tersebut, dipilihlah Rene Mu'awad sebagai Presiden pada 5 November yang kemudian diteruskan oleh Ilyas Hrawi.¹³¹

Proses menuju Lebanon yang lebih baik pasca diberlakukannya *Taif Agreement* sempat tercederai oleh gerakan Jendral Michel Amoun. Beberapa bulan sebelum diadakannya Konferensi *Taif Agreement*, Presiden Amin Gemayel yang jabatannya berakhir pada September 1988 mengangkat Michel Amoun, seorang Kristen Maronit dengan jabatan komandan Pasukan Bersenjata Lebanon menjadi perdana menteri selanjutnya dengan tujuanan agar kursi kepemimpinan tersebut tidak jatuh ke tangan kaum Sunni. Tindakan tersebut tentu saja memicu kemarahan Salim al-Huss yang akan sedang menjabat kursi tersebut sampai berakhir masa kepemimpinannya pada tahun 1990. Keberadaan dua pemimpin dalam satu pemerintahan mengancam terjadinya perselisihan yang menyebar dan membawa intervensi banyak pihak sehingga diperkirakan menyulut konflik sipil selanjutnya.

Melalui pertimbangan peristiwa tersebutlah yang memaksa politisi Lebanon melalui ajakan Arab Saudi untuk melaksanakan pertemuan di Taif dan mencari solusi pakta rekonsiliasi. Hampir semua pejabat menyetujui isi dari *Taif Agreement*, kecuali Michel Aoun yang menolak salah satu isinya mengenai eksistensi Suriah di Lebanon. Michel Aoun kemudian memproklamirkan perang terhadap Suriah dengan tujuan untuk menyingkirkan pasukan Suriah dari Lebanon secepatnya. Melalui pengaruh militernya, Michel Amoun mengerahkan pasukan artileri dan menyerbu kamp-kamp pasukan Suriah. Hampir 1000 warga dan ratusan tempat tinggal hancur akibat perang tersebut. Pada mulanya aksi Michel Amoun mendapat dukungan dari kaum Kristen dan Muslim, akan tetapi karena tindakannya yang telah merenggut banyak nyawa tak bersalah membuat seluruh rakyat Lebanon mengecam tindakannya. Pada awal 1990 Michel Aoun tidak hanya berperang melawan Suriah dan kaum Muslim, akan tetapi juga pasukan

¹³⁰ William L Cleveland dan Martin Burton, *Op. Cit.*, hlm. 390.

¹³¹ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 264.

bersenjata kaum Kristen Maronit yang menganggap Michel Amoun akan mengancam masa depan Lebanon dalam prosesnya menuju negara yang damai.¹³²

Perselisihan antara Michel Amoun dan seluruh lapisan masyarakat Lebanon berakhir pada akhir oktober 1990. Ketika perhatian seluruh dunia tertuju kepada krisis perang Irak-Kuwait, pasukan darat dan udara Suriah melancarkan serangan yang ditujukan kepada Michel Aoun. Michel Aoun kemudian melarikan diri ke suaka di kedutaan Perancis ketika pasukan Suriah telah mengepungnya. Di satu sisi, Amin Gemayel yang menjadi tokoh utama penyebab peperangan Suriah kontra Michel Aoun memilih untuk mengasingkan diri ke Swiss, Perancis dan Amerika Serikat sampai tahun 1990.¹³³

Dengan kekalahan Michel Aoun, unsur militer mulai sedikit demi sedikit dikurangi guna mencegah timbulnya konfrontasi lebih lanjut. Di bawah presiden Ilyas Harwi, seorang Kristen Maronit pro Suriah yang sebelumnya menjadi anggota majelis nasional, mulai merestorasi otoritas militer Lebanon. Banyak yang berpendapat bahwa keputusan-keputusannya dengan tidak melibatkan unsur militer telah mengakhiri perang sipil dan menyatukan partai-partai politik Lebanon.¹³⁴ Latar belakang Ilyas Harwi yang berasal dari golongan independen membuat hampir seluruh lapisan masyarakat mendukungnya, meskipun ada beberapa keputusan kontroversialnya yang terlalu condong ke Suriah, tetap menjadikan Lebanon sebuah negara yang terbebas dari masalah konflik sektarian lanjutan untuk beberapa tahun kedepannya.

¹³² William L Cleveland dan Martin Burton, *Op. Cit.*, hlm. 391.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

BAB 4

PENGARUH KONFLIK SIPIL TERHADAP SISTEM POLITIK LEBANON

4.1 Bentuk Pemerintahan Sebelum Konflik

Jauh sebelum menjadi negara merdeka dan masih dalam kekuasaan kekhalifahan Ottoman, Lebanon memberlakukan sebuah sistem pemerintahan otonom *Qāim Maqām*.¹³⁵ Sistem yang membagi kawasan Gunung Lebanon menjadi dua wilayah, yaitu wilayah untuk kaum Kristen dan kaum Druze. Dalam sistem ini, dipilih seorang *Qāim Maqām* atau gubernur yang memimpin masing-masing wilayahnya. Tugas dari para *Qāim Maqām* adalah mengurus administrasi dan peradilan serta menghapus praktek-praktek *Muqtā'a*.¹³⁶ Seorang *Qāim Maqām* dibantu oleh wakil dari kaum Druze dan Kristen Maronit. Tugas seorang wakil adalah mengurus wewenang dan aspirasi dari masing-masing kaumnya yang kemudian diteruskan ke *Qāim Maqām*.¹³⁷

Sistem *Qāim Maqām* dicetuskan oleh Metternich dari wakil kedutaan Austria, dengan pihak Inggris dan Ottoman yang bertujuan untuk mengurangi konflik antara dua kaum mayoritas yang berada di Gunung Lebanon. Dalam penerapan sistem tersebut terdapat masalah, yaitu keberadaan tempat tinggal kaum Druze dengan Kristen. Sebagian kaum Druze tinggal di wilayah milik kaum Kristen Maronit, begitupun sebaliknya beberapa kaum Kristen Maronit tinggal di wilayah milik kaum Druze. Karena persoalan kepemilikan tempat tinggal, munculah konflik kepentingan antar kaum. Kaum Druze tidak puas dengan keberadaan kaum Kristen Maronit yang jumlahnya terlampau banyak dan mengganggu pemukiman kaum Druze. Mereka melakukan penyerangan guna

¹³⁵ *Qāim Maqām* (Arab: مقائم مقاس)

¹³⁶ Berasal dari *Iqtā'a* (Arab: اقتطاع), yaitu sebuah praktek pemilik tanah (seringkali disebut “lintah darat”) dengan meminjamkan lahannya untuk digarap atau meminjamkan uang kepada para pekerja dan masyarakat dengan batas waktu dan bunga tertentu. Pada masa *Qāim Maqām* rata-rata pekerja berasal dari kaum Muslim, karena kaum Kristen Maronit dan Druze memiliki kedudukan yang lebih baik dari sistim *Qāim Maqām* Lihat: Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 302.

¹³⁷ Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*, hlm. 24.

mengusir kaum Kristen Maronit dari wilayah penduduk kaum Druze. Sebaliknya kaum Kristen Maronit yang merasa lebih dominan, memilih untuk bertahan dari serbuan kaum Druze. Konflik ini dapat diredam oleh pihak Ottoman dengan membenahi sistem *Qāim Maqām*.¹³⁸

Qāim Maqām kemudian dirombak menjadi sistem keterwakilan politik sektarian di Gunung Lebanon yang menjadi akar dari pembentukan Konfesionalisme. Perombakan tersebut diantaranya adalah bahwa seorang *Qāim Maqām* dibantu dewan untuk mengumpulkan pajak dan mengurus administrasi hukum, sehingga kerja dari *Qāim Maqām* lebih terfokus dalam menuntaskan permasalahan yang ada. Tiap dewannya terdiri dari 12 anggota yaitu: anggota dewan dan hakim yang masing-masing terdiri dari enam perwakilan komunitas: Maronit, Druze, Ortodoks Yunani, Katolik Yunani, Suni, dan Shi'ah. Pada waktu itu, kaum Shi'ah tidak mendapat kursi sebagai hakim karena Sultan hanya mengakui sah secara hukum Muslim Suni, sehingga kaum Shi'ah hanya mendapatkan jabatan sebagai penasihat. Ke-12 anggota tersebut akan menjadi wakil *Qāim Maqām* dengan pembagian Kristen Maronit di utara dan Druze di selatan. Masing-masing *Qāim Maqām* diangkat resmi menjadi petugas pemerintah dan menjadi wewenang *Wali* di Sayda, sedangkan di Jubayl, Zahleh dan Dayr al Qamar menjadi kota otonom dibawah pemerintahan langsung dinasti Ottoman.¹³⁹

Setelah diberlakukan pembenahan sistem *Qāim Maqām*, muncul beberapa ketidakpuasan warga mengenai pemilihan anggota *Qāim Maqām*. Salah satunya adalah pengangkatan seorang *Qāim Maqām* yang masih dengan sistem turun temurun. Disamping itu adanya kesenjangan sosial yang sangat timpang, antara *Syeikh* dengan saudagar dan pemilik tanah membuat kondisi di Gunung Lebanon tak lepas dari konflik. Berawal dari ketidakpuasan tersebut, kemudian terjadilah konflik berkelanjutan antara kaum Druze dengan Kristen Maronit. Akhirnya, melalui investigasi badan komisi internasional yang dihadiri oleh Inggris, Perancis, Austria, Prussia dan diselenggarakan oleh pemerintahan Ottoman dengan nama *Règlement Organique*, maka diputuskanlah bahwa akan dibentuk

¹³⁸ Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*, hlm. 36.

¹³⁹ *Ibid.*

sebuah sistim administrasi dan yuridikasi hukum baru yang bernama *Mutaşarrifiyah*.¹⁴⁰

*Mutaşarrifiyah*¹⁴¹ adalah pembaharuan dari sistem *Qāim Maqām*. *Mutaşarrifiyah* merestrukturisasi dan membekali pemerintahan di Gunung Lebanon dengan kekuasaan yang lebih baik karena disokong oleh bantuan internasional yang lebih berpengalaman dalam membantu menjalankan roda pemerintahannya.¹⁴² Pemimpin atau gubernur dari Gunung Lebanon dipilih berdasarkan penetapan Sultan Ottoman dan dengan persetujuan dari bangsa Eropa (Inggris, Perancis, Austria dan Prussia). Seorang gubernur dibantu oleh 12 dewan administrasi yang anggotanya terdiri dari berbagai kaum beragama di Lebanon. Pemilihan 12 dewan administrasi dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, tiap kaum memilih *Sheikh*-nya dengan harus mendapatkan persetujuan dari *Mutaşarrif*. Kedua, *Sheikh* yang terpilih akan diberi hak untuk memilih dua perwakilan dari masing-masing kaum.

Pada awalnya, dewan administrasi dibagi secara seimbang antara Kristen dan Muslim, dua kursi untuk tiap 6 kaum mayoritas Lebanon (Maronit, Druze, Orthodox Yunani, Katolik Yunani, Sunni, dan Syi'ah). Kemudian pada tahun 1864 *Règlement Organique* distrukturisasi dengan perubahan representasi, 7 kursi untuk Kristen dan 5 untuk Muslim. Pajak yang diperoleh di Gunung Lebanon menjadi pendapatan utama bagi anggaran belanja, dan apabila terdapat hasil surplus maka akan diberikan kepada Sultan Ottoman sebagai upeti. Kemudian apabila terdapat defisit anggaran, maka dana bantuan akan diberikan oleh pemerintah Ottoman.¹⁴³

Sistem *Mutaşarrifiyah* berlangsung dari tahun 1861 sampai dengan 1914, pada waktu diterapkan sistem tersebut banyak terjadi korupsi yang dilakukan oleh *Mutaşarrif* dan pemberontakan-pemberontakan untuk menggulingkan *Mutaşarrif* maupun kekhalifahan Ottoman atas Lebanon. Kekuasaan *Mutaşarrif* yang tidak mendapat pengawasan langsung atau independen dari kekhalifahan Ottoman, membuat peluang untuk melakukan tindakan korupsi menjadi besar. Selain itu

¹⁴⁰ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 33.

¹⁴¹ *Mutaşarrifiyah* (Arab: متصرفية)

¹⁴² *Ibid.*, hlm 48.

¹⁴³ Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*, hlm. 43.

juga faktor budaya peninggalan turun termurun dari para *Mutaşarrif* sebelumnya yang terbiasa melakukan korupsi sehingga, dipraktikkan oleh calon pemegang jabatan *Mutaşarrif* berikutnya.¹⁴⁴

Sistem *Mutaşarrifiyah* berakhir ketika terjadi perang dunia pertama yang membuat kawasan Lebanon menjadi basis militer kekhalifahan Ottoman untuk menahan gempuran *Triple Etente* (Inggris, Perancis, dan Russia). Pada 1 September 1920, Jenderal Gouraud secara resmi mengumumkan bahwa Lebanon berubah menjadi Lebanon Raya di bawah mandat Perancis. Luas kawasannya disahkan meliputi wilayah terdahulu ketika masa sistem *Mutaşarrifiyah*, yang digabungkan dengan kawasan perkotaan Beirut, Sidon, Tyre dan Tripoli, serta empat kota peninggalan Turki Ottoman yaitu Hasbaya, Rashaya, Ba'albak dan 'Akkar. Sedangkan perbatasan wilayahnya meliputi Nahr al-Kabir di bagian utara, Palestina di selatan dan Laut Mediterania di bagian barat serta daerah pegunungan *Anti Lebanon* di sebelah timur.¹⁴⁵

Setelah mendapatkan Lebanon melalui *Sykes-Picot Agreement*, Perancis merubah tatanan administrasi pemerintahan Lebanon Raya yang carut marut penuh korupsi sepeninggalan sistem pemerintahan terdahulunya. Perancis kemudian membentuk Komisaris Tinggi di Beirut yang bertanggung jawab kepada Departemen Luar Negeri. Komisaris Tinggi mengatur yurisdiksi urusan luar negeri Suriah dan Lebanon, sedangkan staf atau anggotanya bertugas mengawasi dan meresmikan hak veto yang diajukan. Di tiap wilayah memiliki gubernurnya masing-masing dengan perangkatnya seperti dewan, biro, hakim, dan staf—staf yang tiap divisinya terdapat perwakilan dari Perancis.¹⁴⁶

Reformasi paling penting pada masa kekuasaan Perancis adalah pada tahun 1926 ketika Lebanon Raya dirubah menjadi Republik Lebanon, dan mempunyai konstitusinya sendiri.¹⁴⁷ Konstitusi tersebut berisi badan parlemen legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan, Presiden, dan Senat. Dewan Perwakilan memilih Presiden dengan masa jabatan tiga tahun. Seorang Presiden tidak dapat menjabat kembali selama dua periode berturut-turut. Perancis

¹⁴⁴ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 46.

¹⁴⁵ Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*, hlm. 90.

¹⁴⁶ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 60.

¹⁴⁷ Kail C.E., *Op. Cit.*, hlm. 19.

kemudian mengembangkan konstitusi pada tahun 1927 dan 1929 untuk menjamin representasi yang proporsional untuk semua kaum beragama. Keberadaan Senat dihapuskan pada tahun 1927 dan diganti dengan Deputi, kemudian pada tahun 1929 masa jabatan Presiden yang semula tiga tahun ditambah menjadi enam tahun. Republik Lebanon lahir dengan Charles Dabbas sebagai Presiden pertamanya. Pada tahun berikutnya yaitu 1932 dilakukan sensus penduduk untuk pertama kalinya guna memilih representasi pejabat berdasarkan jumlah penduduk.¹⁴⁸ Sensus tahun 1932 tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel Komposisi Komunitas Beragama di Lebanon
Berdasarkan Survei Tahun 1932¹⁴⁹

Golongan	Jumlah	% dari Total Populasi
Kristen Maronit	261.043	30 %
Islam Sunni	182.842	20 %
Islam Syi'ah	158.425	18 %
Orthodoks Yunani	90.275	10%
Islam Druze	56.812	6.5%
Armenia	34.269	4%
Kristen Lainnya	14.065	1%
Yahudi	10.469	1%
Lain-lain	27.117	9.5%

Dengan mempertimbangkan beberapa faktor, terutama untuk meminimalisir konflik keterwakilan dari tiap kaum yang terus bertambah di Lebanon, pada Juli 1937 Komisaris Tinggi menetapkan majelis baru yang terdiri dari 60 deputi, yang 2/3 anggotanya diangkat melalui pemilihan dan sisa yang lainnya sudah ditetapkan melalui keputusan Komisaris Tinggi, semuanya didasarkan pada proporsional yang tertulis di sensus penduduk tahun 1932 pada tiap sekte.

Pada bulan September, Emile Eddé yang sebelumnya bersaing dengan Bishara al-Khuri akhirnya berhasil menjabat kembali menjadi Presiden. Kemudian

¹⁴⁸ Badredine Arfi., *Op. Cit.*, hlm. 190.

¹⁴⁹ Riza Sihbudi., *Konflik Lebanon: Pertalian Antar Berbagai Kepentingan, Jurnal Ilmu Politik Volume 3*, Jakarta: 1986, hlm. 72.

dia merekrut Khayr al-Din al-Ahdābm, seorang Muslim Suni, sebagai Perdana Menteri untuk membantu tugasnya menyusun kabinet pemerintahan. Dalam kabinet yang dibentuk oleh Khayr al-Din al-Ahdābm tersebut, dia menetapkan sebuah sistem yang menjadi panutan pada sistem pemerintahan yang akan diberlakukan pada masa mendatang yaitu Pakta Nasional.¹⁵⁰ Tujuan pemberlakuan tersebut adalah dengan pemberian kedudukan Presiden berasal dari pihak Kristen Maronit menjadi seimbang dengan pengangkatan Muslim Suni sebagai Perdana Menteri, sehingga tidak terdapat kecemburuan sosial dan politik antar kedua kaum.¹⁵¹

Setelah pembenahan sistem konstitusi di Lebanon, frekuensi pemberontak dan pemrotes mulai berkurang drastis. Aktifitas administrasi pemerintahan berjalan dengan semestinya karena politisi Lebanon mendapatkan pengalaman dan pembelajaran dari pemerintah parlemen Perancis sehingga dapat menjalankan kegiatan berpolitiknya dengan prosedur yang baik dan benar jauh dari kegiatan korupsi. Dengan keadaan pemerintahan yang berjalan dengan baik, kemudian memicu tokoh-tokoh masyarakat untuk membuat sarana aspirasi berupa partai-partai politik. Masing-masing kaum membentuk partai-partai politik dengan salah satu tujuannya adalah agar dapat mengumpulkan jumlah masa yang lebih besar sehingga kelak dapat memperoleh pengaruh di kursi pemerintahan.¹⁵²

Pada masa ini, penerapan sistem konstitusi Perancis dapat menciptakan dan mengarahkan Lebanon menjadi lebih baik, serta mengurangi konflik-konflik yang sebelumnya terjadi karena kinerja pemerintahan. Meskipun kondisi politik membaik, ternyata tidak sejalan dengan kondisi ekonomi dan sosial yang kerap bergejolak. Pada tahun 1930 merupakan kulminasi dari gejolak sosial dan ekonomi Lebanon. Masyarakat elit menengah keatas memprotes kebijakan monopoli Perancis yang semena-mena sehingga membuat bisnis dan perdagangan mereka terus merugi bahkan tutup yang menciptakan banyak gelombang pengangguran.¹⁵³ Konflik-konflik lainnya yang terjadi pada tahun berikutnya adalah ketika masyarakat Lebanon menginginkan lepas dari keterkaitan Perancis

¹⁵⁰ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 66.

¹⁵¹ Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*

¹⁵² Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 68.

¹⁵³ Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*, hlm 96.

dan menjadi negara yang merdeka. Terutama setelah kemerdekaan Suriah pada tahun 1941 yang memicu rakyat Lebanon untuk melakukan usaha yang sama.¹⁵⁴

Setelah menjadi negara yang merdeka dari kuasa Perancis, Lebanon mulai melakukan pembenahan pada sistim pemerintahannya dengan dasar Konfesionalisme. Pokok-pokok konstitusi pemerintahan Lebanon, dalam sistem pemilihan umum, birokrasi dan hukum yang masih mengadopsi konstitusi dari dokumen peninggalan Perancis ketika masih menduduki Lebanon pada tahun 1926 mulai dirombak. Untuk itulah diadakan pemilihan umum Lebanon pasca kemerdekaan, menetapkan Bishara Al-Khuri, seorang Kristen Maronit, menjabat menjadi presiden dan memilih Riyadh Al-Sulh dari golongan Muslim Sunni menjadi perdana menteri.¹⁵⁵ Mereka bersama-sama merumuskan solusi dari masalah sektarian dan tata pemerintahan dari setiap daerah, dan perumusan masalah tersebut melahirkan Pakta Nasional (*al-Misāk al-Waṭāniya*) secara tidak resmi yang berisi perbaikan-perbaikan dari sistem pemerintahan terdahulu. Pakta Nasional merupakan sebuah perjanjian yang pengaruhnya dapat membentuk pemerintahan Lebanon selama bertahun-tahun selanjutnya.

Dalam perumusan solusi tersebut dicetuskan empat dasar utama Pakta Nasional. Pertama, Pakta Nasional menetapkan pembagian kekuasaan diantara kaum seperti yang tertuang pada pasal 95 konstitusi dan berdasarkan sensus pada tahun 1932, bahwa rasio 6:5 diterapkan dalam pemilihan representasi pemerintahan, selain itu juga menetapkan kedudukan Presiden yang berasal dari kaum Maronit, Perdana Menteri berasal dari Muslim Sunni, Anggota Dewan dari Muslim Shi'ah, dan Wakil Pembicara Anggota Parlemen berasal dari kaum Druze.

Kedua, Pakta Nasional menegaskan identitas dan hubungan Lebanon dengan negara lain sebagai negara independen. Maksud dari negara independen dalam Pakta Nasional tersebut adalah bahwa Lebanon dapat menerima peradaban yang menguntungkan dan berguna dari Barat, akan tetapi tidak meninggalkan nilai-nilainya sebagai bangsa Arab. Tujuan dari dasar tersebut adalah untuk menyalurkan keinginan terpendam dari kaum Muslim dan Kristen. Kaum Muslim

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 98-9.

¹⁵⁵ William L Cleveland dan Martin Burton., *Op. Cit.*, 225.

yang ingin terus bersatu dengan Suriah sebagai sesama bangsa Arab dan Muslim guna menciptakan Suriah Raya, sedangkan Kaum Kristen menginginkan keberadaan militer Perancis dan dukungan dari Barat, mengingat hubungan kerjasama mereka terdahulu ketika masa Gunung Lebanon.

Ketiga, bahwa prinsip urusan politik luar negeri Lebanon untuk tidak menjadi negara pendukung atau batu loncatan bagi sebuah kolonialisme. Hal ini ditujukan untuk menangkal praktek kolonialisme Suriah dan Perancis melalui kawasan Lebanon. Akan tetapi ketika terjadi konflik sipil, dasar ketiga ini tidak terlaksana sepenuhnya, yaitu ketika Lebanon menjadi negara penonton pertempuran Israel-Palestina-Suriah-bangsa Arab di negaranya sendiri dengan pemerintahan dan militer yang lumpuh.

Keempat, mengingat dahulu kekuasaan Anggota Dewan yang berasal dari kaum Kristen terlalu dominan, maka alokasi partisipasi yang lebih besar diberikan kepada umat Muslim di pemerintahan sehingga mengurangi ketimpangan representatif antara kaum Kristen dengan Islam. Poin ini juga lebih memberikan kesempatan berpartisipasi pada kaum Muslim dalam kekuasaan, pengambilan keputusan dan fungsinya dalam pemerintahan. Kemudian jika posisi dan jabatannya berhubungan dengan urusan teknis maka akan didasari oleh kemampuan dari calon anggota dewan tanpa memandang bagaimana dan darimana asal muasalnya.¹⁵⁶

Poin-poin yang terdapat dalam Pakta Nasional tidak berfungsi secara utuh ketika terjadi perang sipil pada tahun 1958 dan mencapai puncaknya ketika terjadi perang sipil berdarah tahun 1975-1990. Kedatangan gelombang pengungsi Palestina yang mayoritas Muslim dan kemudian membaaur dengan masyarakat Lebanon membuat pembagian kekuasaan melalui *Konfesionalisme* menjadi timpang. Terlebih lagi dengan status Pakta Nasional yang sebatas perjanjian tidak tertulis, sehingga dapat dengan mudah dilanggar karena tidak memiliki pijakan dasar undang-undang yang kuat.

4.2 Bentuk Pemerintahan Setelah Konflik

¹⁵⁶ Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*, hlm. 110.

Konflik sipil 1975-1990 diakhiri oleh sebuah perjanjian *Taif Agreement*, yang dilaksanakan di Taif, Arab Saudi. *Taif Agreement* merupakan sebuah pengembangan dari sistem pemerintahan terdahulu yaitu Pakta Nasional yang masih berupa perjanjian tidak tertulis. *Taif Agreement* mengubah pokok-pokok penting yang berkaitan dengan sistem politik dan kedaulatan Lebanon, sehingga kabinet pemerintahan dapat dijalankan secara baik dan adil tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak asing. Tujuan utama dari pembentukan *Taif Agreement* adalah untuk mengakhiri perang sipil berkepanjangan yang kerap terjadi di Lebanon, terutama perang sipil 1975-1990, akibat dari konflik kepentingan antar kaum. Untuk itulah sebuah pemerintahan Konfesionalisme diberlakukan semenjak dibentuknya Pakta Nasional pada tahun 1943 dan berlanjut dengan pembenahannya melalui *Taif Agreement*. Konfesionalisme sendiri merupakan sebuah sub sistem dari Konsosiasionalisme¹⁵⁷ (Inggris: *Consociationalism*). Konsosiasionalisme yaitu sebuah sistem yang memberikan representasi pemerintahannya kepada golongan-golongan utama masyarakat berdasarkan etnik, agama, ataupun bahasanya.¹⁵⁸

Sebelum diadakan perjanjian *Taif Agreement*, tercatat tiga kali usaha untuk mengakhiri konflik sipil 1975-1990. Pertama, pada awal tahun 1975 melalui perundingan Komite Dialog Nasional. Komite tersebut dibentuk oleh perwakilan dari masing-masing kaum Lebanon, tanpa keterwakilan dari kaum Shi'ah serta pihak Palestina. Suriah menjadi mediator penyelenggaraan Komite Dialog Nasional yang menghasilkan rancangan Dokumen Konstitusional pada februari 1976. Dokumen Konstitusional memfokuskan pada pergantian kekuasaan dalam struktur pemerintahan Lebanon, yang kelak menjadi salah satu dasar pemikiran *Taif Agreement*. Akan tetapi ketika pertemuan untuk membahas Dokumen Konstitusional diadakan kembali, konflik sipil semakin meluas sehingga pertemuan Komite Dialog Nasional dihentikan. Suriah kemudian mengambil tindakan dengan memasuki Lebanon pada April 1976.

¹⁵⁷ Negara yang pertama kali memberlakukan Konsosiasionalisme adalah Belanda, yang kemudian diikuti Belgia, Siprus, dan Makedonia. Lihat: <http://www.balkananalysis.com/2004/02/17/problems-of-consociationalism-from-the-netherlands-to-macedonia/> (diakses pada 20 Desember 2010)

¹⁵⁸ Factsheet series no 27: Understanding Lebanese Confesionalism ed May, 2007, Canadians for Justice and Peace in the Middle East, hlm. 1.

Kedua, terjadi pada tahun 1983-1984 dengan diadakan pertemuan antara lima orang wakil kaum Kristen dan Muslim di Geneva dan Lausanne atas prakarsa Suriah. Dalam perundingan tersebut dibahas beberapa masalah yaitu pembatalan perjanjian keamanan antara pemerintahan Lebanon dan Israel pada Mei 1983¹⁵⁹, demonstrasi yang semakin menyebar atas dominasi Suriah di Lebanon, pengkajian ulang atas identitas Lebanon sebagai bangsa Arab, dan penarikan secara resmi seluruh pasukan Israel dari kawasan Lebanon. Dua permasalahan terakhir yang kemudian menjadi salah satu isi dari *Taif Agreement*.

Ketiga, pada tahun 1985 di Damaskus melalui *Tripartite Agreement*¹⁶⁰. Perjanjian ini diadakan oleh tiga pemimpin militer Lebanon, Eli Hobeika dari LF, Walid Junblat dari PSP, dan Nabih Berri dari AMAL.¹⁶¹ Sayangnya perjanjian tersebut terbengkalai karena terjadi kelumpuhan pemerintahan pada awal tahun 1986, terutama menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Amin Gemayel. Kelumpuhan ini terjadi karena ketidakmampuan Amin Gemayel untuk bertindak secara tegas dalam mengurus masalah dalam negeri sehingga keputusan-keputusan pemerintah tidak berjalan dengan semestinya dengan kehadiran pihak asing di Lebanon.¹⁶²

Rencana digelarnya *Taif Agreement* muncul setelah dilakukan perundingan pada Mei 1989 di Casablanca, Maroko.¹⁶³ Dalam perundingan tersebut disepakati beberapa keputusan yang mencakup permasalahan yang sedang dihadapi

¹⁵⁹ Perjanjian tersebut dibentuk pada 17 Mei 1983 atas kesepakatan Amin Jumayil dan Ariel Sharon dengan tujuan utama penetapan perdamaian antara Israel dengan Lebanon. Kemudian ditetapkan perjanjian lain yaitu, bahwa Lebanon akan menjamin keamanan Israel di perbatasan Utaranya, serta membatasi hubungan Lebanon dengan bangsa asing terutama Arab. Sedangkan pihak Israel akan menarik pasukannya dari Lebanon. Lihat, Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*, hlm. 223.

¹⁶⁰ Perjanjian itu menghasilkan beberapa keputusan penting yaitu, persamaan representasi perwakilan antara kaum Kristen dengan Muslim, kemudian abolisi politik sektarian dengan masa transisi, dan yang terakhir adalah keseimbangan baru pada hak prerogatif presiden terhadap perdana menteri dan kabinetnya. Dalam perjanjian ini juga disebutkan Lebanon akan tetap sebagai negara Arab berkenaan dengan pertanyaan mengenai identitas Lebanon pada perpertemuan sebelumnya di Geneva. Perjanjian tersebut juga membahas hak voting masyarakat Lebanon yang dikurangi dari umur 21 tahun menjadi 18 tahun. Kemudian membentuk Senat yang mengurus pertanyaan maupun pengajuan konstitusi, amandemen, naturalisasi, deklarasi perang dan perdamaian dari berbagai kaum di Lebanon. Yang terakhir, persetujuan ini membuka hubungan bilateral kembali antara Lebanon dengan Suriah. Lihat, Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*, hlm 226.

¹⁶¹ Sarah Barclay., *College of Arts and Sciences CUREJ - College Undergraduate Research Electronic Journal - Consociationalism in Lebanon*. Pennsylvania: University of Pennsylvania, 2007, hlm. 28.

¹⁶² Benjamin MacQueen., *Political Culture and Conflict Resolution in the Arab World; Lebanon and Algeria*. Victoria: Melbourne University Press, hlm. 44-46.

¹⁶³ *Ibid.*, hlm. 47.

Lebanon. Pertama, menetapkan 108 (yang kemudian menjadi 128) anggota dewan perwakilan dengan representasi yang adil antara Muslim dengan Kristen dengan alokasi masing-masing kaum mendapat 64 kursi. Kedua, kursi Presiden tetap menjadi milik kaum Kristen Maronit. Ketiga, menghapuskan hak Presiden untuk mengangkat Konsul secara pribadi. Keempat, mengangkat Konsul dengan Perdana Menteri yang diangkat oleh Dewan dan dipimpin oleh Presiden. Dengan mengurangi wewenang Presiden Kristen Maronit terhadap Perdana Menteri Muslim Sunni melalui *Taif Agreement*, sehingga kedepannya dapat bekerja lebih baik. Sebagai poin tambahan, dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pasukan Suriah secara resmi akan meninggalkan Lebanon ketika kondisi politik Lebanon sudah cukup kondusif untuk ditinggalkan.¹⁶⁴

Setelah dilakukan perundingan serta pemungutan suara, *Taif Agreement* ditandatangani pada 22 Oktober 1989 di Taif, Arab Saudi, yang kemudian diratifikasi pada 4 November 1989 di Landasan Udara Qulayāt (Utara Tripoli).¹⁶⁵ Pada saat dilakukan pemungutan suara dihadiri oleh 31 orang kaum Kristen dan 31 orang kaum Muslim dari 71 anggota parlemen pemilu 1972¹⁶⁶ yang selamat. Wakil dari Suriah tidak hadir ketika dilaksanakan perundingan, akan tetapi Suriah tetap mendapat status sebagai negara pengamat/peninjau karena pengaruh dan hubungannya dengan Lebanon di masa lalu.¹⁶⁷

Tujuan dari *Taif Agreement* adalah untuk menghapuskan dominasi dari kaum Kristen Maronit seperti yang tertulis dalam Pakta Nasional, dan memberikan posisi yang pantas kepada kaum Kristen dan Muslim di kabinet pemerintah. Keseimbangan ini diterapkan dalam sistim distribusi kursi Parlemen dan jabatan-jabatan penting lainnya. Kursi Presiden, diserahkan kepada kaum Kristen Maronit. Presiden merupakan kekuatan kepala pemerintahan, selain itu juga sebagai pemelihara keutuhan, kemerdekaan, kesatuan wilayah, dan konstitusi pemerintahan Lebanon. Posisi Perdana Menteri sebagai ketua dari kabinet, diisi oleh kaum Muslim Sunni. Di posisi Ketua Dewan Legislatif, yang dijabat oleh

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 264.

¹⁶⁶ Karena peperangan yang berkepanjangan, tidak ada pemilihan umum yang dilaksanakan semenjak tahun 1972, menetapkan anggota parlemen selama 17 tahun dengan komposisi yang sama. Lihat, Sune Haughballe, *War and Memory in Lebanon*. New York: Cambridge Univ Press, 2010, hlm. 67.

¹⁶⁷ Benjamin MacQueen, *Op. Cit.*

kaum Shi'ah, mendapat tugas dari Presiden untuk memimpin perundingan parlemen dan memberitahukan hasilnya kepada Dewan Legislatif. Jabatan Ketua Dewan Legislatif diperpanjang menjadi empat tahun yang sebelumnya merupakan satu sampai dua tahun.¹⁶⁸

Taif Agreement memperkenalkan 31 perubahan amandemen pada struktur konstitusi Libanon yang diakui oleh Parlemen pada 21 Agustus 1990, dan ditandatangani serta diimplementasikan kedalam undang-undang oleh Presiden Ilyas Harwi pada 21 September 1990.¹⁶⁹ Reformasi tersebut tidak merubah dasar struktur politik, karena dasar dari pemerintahan Libanon masih merupakan politik sektarian atau Konfesionalisme yang dicanangkan sebelumnya melalui Pakta Nasional. *Taif Agreement* meratifikasi Pakta Nasional tahun 1943 dengan salah satu tujuannya agar tercipta struktur Konfesionalisme baru yang adil dan berlaku sepanjang berdirinya konstitusi Libanon.¹⁷⁰ Meskipun dalam *Taif Agreement* disebutkan juga bahwa Politik Sektarian atau Konfesionalisme akan diabolisi dan menjadi tujuan nasional tanpa jangka waktu tertentu, karena dengan mengabolisi Konfesionalisme maka semua bidang pekerjaan akan dapat terisi tanpa ada kaitannya dengan representasi dari kaum tertentu, meskipun tidak menutup kemungkinan apabila kelak akan timbul perbedaan pendapat dan pemikiran akibat perbedaan kepercayaan.¹⁷¹

“G. Abolition of Political Sectarianism: Abolishing political sectarianism is a fundamental national objective”¹⁷²

The following shall be done in the interim period:

- a. Abolish the sectarian representation base and rely on capability and specialization in public jobs, the judiciary, the military, security, public, and joint institutions, and in the independent agencies in accordance with the dictates of national accord, excluding the top-level jobs and equivalent jobs which shall be shared equally by Christians and Muslims without allocating any particular job to any sect.
- b. Abolish the mention of sect and denomination on the identity card.

“G. Abolisi Politik Sektarian: Abolisi politik sektarian merupakan tujuan pokok nasional”

¹⁶⁸ Sarah Barclay, *Loc. Cit.*, hlm. 34.

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ Sune Haughbolle, *Op. Cit.*, hlm. 39.

¹⁷¹ G Barcla, *Op. Cit.*, hlm 87-88.

¹⁷² Sarah Barclay, *Loc. Cit.*, hlm. 87-88.

Hal-hal berikut akan dilaksanakan dalam tempo sementara:

- a. Abolisi dasar representasi sektarian dan lebih mempercayakan kemampuan dan spesialisasi pada pekerjaan umum, kehakiman, militer, keamanan, umum, dan institusi gabungan, dan di agen independen yang sesuai dengan pakta nasional, tidak termasuk pekerjaan tingkat atas dan pekerjaan serupa yang akan di dibagi secara adil kepada kaum Kristen dan Mislem tanpa menjatahkan pekerjaan tertentu kepada kaum apapun.
- b. Abolisi penggolongan sekte yang telah disebutkan pada kartu identitas.

4.3 Analisis Perubahan Sistem Politik Konfesionalisme

Dari era kekhalifahan Ottoman melalui *Qāim Maqām* dan *Mutaṣarrifiyah*, sampai dengan era mandat Perancis yang berakhir dengan kemerdekaan, membawa dampak yang sangat signifikan terhadap konstitusi Lebanon. Bekal pengetahuan berpolitik dari peradaban sebelumnya dan ditambah kondisi masyarakat Lebanon yang heterogen menciptakan sebuah dasar sistim politik Konfesionalisme yang tertanam dalam perjanjian tidak tertulis Pakta Nasional. Sebuah perjanjian yang hadir terkait dengan kondisi pemerintahan Lebanon yang ingin menciptakan kemajuan pasca kemerdekaannya dari Perancis. Kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan *Taif Agreement* yang merupakan pengesahan perjanjian tak resmi sebelumnya yaitu Pakta Nasional dengan beberapa pembenahan yang terkait didalamnya, yang salah satu tujuan utamanya adalah menyudahi konflik sipil berkepanjangan tahun 1975-1990.

Struktur pemerintah tertinggi Lebanon saat ini secara sah dipegang oleh Presiden, Perdana Menteri, dan Ketua Dewan Parlemen. Masing-masing kursinya diberikan kepada Kristen Maronit, Muslim Sunni, dan Muslim Syiah. Perwakilan 128 anggota parlemen juga dibagikan secara proporsional kepada Muslim Sunni, Syi'ah, Druze, Alawit, Kristen Maronit, Katolik Yunani, Ortodok Yunani, dan Ortodok Armenia, serta beberapa kaum beragama minoritas. Presiden yang akan menjabat tidak dipilih oleh masyarakat, akan tetapi dia harus mendapat dukungan dari 2/3 atau 72 anggota parlemen. Presiden juga berhak mencalonkan seorang Muslim Sunni sebagai kandidat Perdana Menteri, akan tetapi juga harus dengan persetujuan dari Ketua Parlemen yang dijabat oleh Muslim Syi'ah. Presiden tidak lagi berhak membuat undang-undang tanpa persetujuan parlemen dan

memberhentikan maupun mengangkat perdana menteri dan menterinya. Ketua Parlemen juga terlebih dahulu mendiskusikan kepada parlemen, sehingga siapapun politisi yang ingin menduduki kursi kepemimpinan di Lebanon, harus mampu mendapatkan dukungan dari kaum lainnya.¹⁷³

Pada tanggal 16 Juli 1992, keputusan pada *Taif Agreement* yang memberikan alokasi kursi anggota parlemen 108 orang tercederai oleh pengesahan konstitusi parlemen Lebanon yang memutuskan bahwa kursi anggota parlemen ditambah menjadi total 128 orang, meskipun rasio representasi perwakilan kaum tetap seimbang 64 kursi. Keputusan tersebut bernuansa politis karena 2/3 kursi barunya merupakan hasil pemilihan di area yang kala itu dikuasai oleh pasukan militer Suriah. Suriah masih memiliki pengaruhnya di Lebanon melalui perjanjian kerjasama Lebanon-Suriah terdahulu, serta dengan kehadiran para kandidat parlemen Lebanon yang berhaluan pro-Suriah, sehingga pengaruh Suriah di Lebanon dapat terus diperluas, demi tercapainya dominasi kekuasaan dan penghapusan penarikan mundur seluruh pasukan Suriah di Lebanon.¹⁷⁴

Tabel Perbandingan Alokasi Kursi Parlemen¹⁷⁵

Golongan	Sebelum Taif	Sesudah Taif
Kristen Maronit	30	34
Ortodoks Yunani	11	14
Katolik Yunani	6	8
Ortodoks Armenia	4	5
Katolik Armenia	1	1
Protestan	1	1
Kristen Lainnya	1	1
Total kaum Kristiani	54	64
Sunni	20	27
Syi'ah	19	27
Druze	6	8
Alawit	0	2
Total kaum Muslim	45	64
	99	128

Taif Agreement dibentuk berdasarkan salah satu masalah yang sedang dihadapi Lebanon yaitu, masalah reformasi sistim politik. Dalam salah satu poin

¹⁷³ Ian, O'Flynn, dan David Russell (ed). *Power-Sharing New Challenges for Divided Societies*. London: Pluto Press, 2005, hlm. 140.

¹⁷⁴ Matthew, Preston. *Loc. Cit.*, hlm. 212.

¹⁷⁵ http://wapedia.mobi/en/Elections_in_Lebanon (diakses pada 27 November 2010)

Taif Agreement, membahas tentang upaya untuk menyeimbangkan tuntutan dari kaum Muslim dan Kristen dalam kegiatan berpolitik Lebanon. Misalnya pada seksi I, artikel A yang menyatakan kedaulatan Lebanon sebagai negara yang bebas untuk berkuasa dan merupakan tanah tumpah darah rakyat Lebanon. Kemudian pada artikel B yang menyatakan identitas Lebanon sebagai bangsa Arab, lalu keterikatannya pada organisasi dunia yang tidak memihak kepada kubu manapun, dengan tujuan untuk mencegah gesekan kepentingan antar kaum. Selanjutnya artikel C, mengutamakan kebebasan publik tanpa diskriminasi. Ketiga artikel tersebut secara umum mewakili kepentingan dan keadilan kaum Kristen dan Muslim, kaum Kristen yang menginginkan Lebanon menjadi negara bebas dan independen sedangkan kaum Muslim ingin agar Lebanon tidak meninggalkan identitasnya sebagai bangsa Arab. Seperti yang tertuang dalam isi *Taif Agreement* seksi “I. Prinsip-prinsip Umum” sebagai berikut.

“I. General Principles.”¹⁷⁶

- A. Lebanon is a sovereign, free, and independent country and a final homeland for all its citizens.
- B. Lebanon is Arab in belonging and identity. It is an active and founding member of the Arab League and is committed to the league's charter. It is an active and founding member of the United Nations Organization and is committed to its charters. Lebanon is a member of the nonaligned movement. The state of Lebanon shall embody these principles in all areas and spheres, without exception.
- C. Lebanon is a democratic parliamentary republic founded on respect for public liberties, especially the freedom of expression and belief, on social justice, and on equality in rights and duties among all citizens, without discrimination or preference.

“I. Prinsip-prinsip Umum:”

- A. Lebanon merupakan negara yang berkuasa, bebas, dan independen dan tanah air bagi semua warganegarannya.
- B. Lebanon adalah bangsa Arab dalam identitas dan kepribadiannya. Lebanon merupakan pendiri dan anggota aktif dari Liga Arab dan berkomitmen terhadap piagam Liga Arab. Lebanon ialah pendiri dan anggota aktif dari Organisasi PBB dan berkomitmen terhadap piagam PBB. Lebanon merupakan anggota dari gerakan nonblok. Pemerintah Lebanon akan menjalankan dasar-dasar tersebut di semua kawasan dan lingkungan, tanpa terkecuali.
- C. Lebanon merupakan republik demokratis parlemen yang didirikan atas kebebasan publik, terutama kebebasan bereksperisi dan

¹⁷⁶ Sarah Barclay, *Loc. Cit.*, hlm. 79.

beragama, pada keadilan sosial, dan pada kesamaan hak dan pekerjaan atas semua warga negara, tanpa diskriminasi atau preferensi.

Reformasi politik yang baru dalam *Taif Agreement* salah satunya adalah mengurangi hak prerogatif Presiden dan memindahkan kekuasaan badan eksekutif kepada Dewan Menteri secara seksama. Menurut Artikel 17 dari konstitusi yang baru, sebagai berikut:¹⁷⁷

”Executive power shall be entrusted to the Council of Ministers, and the Council shall exercise it in accordance with conditions laid down in this constitution.”

“Kekuasaan Badan Eksekutif akan dipercayakan kepada Dewan Menteri, dan Dewan Menteri akan menjalankannya sesuai dengan kondisi-kondisi yang tertuang dalam konstitusi ini.”

Sedangkan menurut konstitusi yang lama adalah.

“Executive power shall be entrusted to the President of the Republic who shall exercise it assisted by the Ministers in accordance with conditions laid down in this constitution”

“Kekuasaan Badan Eksekutif akan dipercayakan kepada Presiden Libanon yang dalam menjalankan kekuasaannya akan dibantu oleh Menteri sesuai dengan kondisi-kondisi yang tertuang dalam konstitusi ini.”

Setelah perang sipil usai pada tahun 1990, sebagian besar partai politik atau kelompok masyarakat yang ada lebih termarginalisasi sesuai dengan persamaan agama maupun etnisnya. Partai-partai belum mampu untuk mengembangkan visi dan misinya kearah yang lebih nasionalis, karena mengikuti kecenderungan yang ada, yaitu partai menjadi batu pijakan untuk mengangkat pengaruh pasukan militer dari partai-partainya, atau partai lain yang sejalan, dan mengangkat posisi pemimpinnya untuk mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari masyarakat (contohnya adalah LF yang dibantu oleh pasukan Phalangis).¹⁷⁸

Pada tahun 1990 konflik sipil yang selama ini mendominasi Masyarakat Lebanon mulai berakhir dan pasukan Lebanon kembali menjalankan tugasnya menjaga kawasan Libanon. Dimulai dari Beirut sampai dengan kawasan-kawasan

¹⁷⁷ http://www.aub.edu.lb/the_lebanese_civil_war (diakses pada 12 Desember 2010)

¹⁷⁸ <http://ddc.aub.edu.lb/projects/pspa/krayem/krayem.html> (diakses pada 12 Desember 2010).

perbatasan lintas negara. Insiden kekerasan di tahun berikutnya berkurang dari yang sebelumnya 108 insiden menjadi 60 insiden. Beberapa konflik yang terjadi muncul dari para milisi Palestina yang mencegah pasukan Lebanon untuk menjalankan tugasnya mengamankan kawasan perbatasan Selatan Lebanon. Masyarakat mulai yakin dengan perubahan yang diberikan pemerintah bahwa Lebanon dapat terus bertahan dengan sistim politik yang sudah dibenahi melalui *Taif Agreement*. Meskipun dengan keberadaan pihak asing yang masih mendiami Lebanon seperti Suriah, Israel, dan Palestina.¹⁷⁹

Suriah diberikan batas waktu tak lebih dari dua tahun setelah Lebanon meratifikasi *Taif Agreement* pada 4 November 1989. Dengan kondisi stabilnya pemerintahan Lebanon melalui penyelesaian pemilihan Presiden, pembenahan kabinet, dan pengesahan semua reformasi politik ke dalam konstitusi. Apabila akan dilakukan penambahan jangka waktu penarikan pasukan Suriah dari Lebanon, maka sebuah perjanjian antar dua negara harus dilaksanakan terlebih dahulu. *Arab Tripartite Committee* yang terdiri dari tiga negara netral yaitu Maroko, Arab Saudi, dan Algeria juga diberikan kewenangan untuk memberikan bantuan terhadap permasalahan politik luar negeri Lebanon.¹⁸⁰ Di tahun 1991 Ilyas Hrawi membuat keputusan yang membuat banyak pihak kecewa. Hrawi melakukan sebuah Perjanjian Kerjasama Lebanon-Suriah dengan Presiden Suriah, Hafiz al-Assad, di bidang keamanan, hubungan luar negeri, perdagangan, budaya dan kebijakan ekonomi dengan membangun Dewan Tertinggi Hubungan Bilateral. Keputusan tersebut menurut pengamat politik Lebanon dikhawatirkan akan menambah intervensi Suriah semakin dalam di pemerintahan, terutama menjelang dilakukannya pemilihan umum¹⁸¹ rakyat Libanon dan pemulihan kondisi pasca berakhirnya perang sipil 1975-1990.¹⁸²

Pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1992 sempat tercederai oleh aksi unjuk rasa. Karena pada batas waktu yang telah ditentukan yaitu Agustus 1992, Suriah masih mendiami wilayah Lebanon. Hal tersebut membuat

¹⁷⁹ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 272.

¹⁸⁰ Sarah Barclay, *Loc. Cit.*, hlm. 94.

¹⁸¹ Terbukti pada tanggal 16 Juli 1992, melalui pengaruh Suriah dilakukan pengesahan konstitusi parlemen Libanon yang menambah kursi anggota parlemen menjadi total 128 orang. 2/3 kursi barunya dilaksanakan di daerah yang masih dikuasai oleh pasukan militer Suriah. Lihat, Matthew, Preston. *Loc. Cit.*, hlm. 212.

¹⁸² Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 275.

pemilu yang diadakan pada bulan Agustus sampai dengan September¹⁸³ diboikot oleh mayoritas kaum Kristen dan beberapa kaum Muslim. Meskipun pada akhirnya pemilu yang diadakan empat tahun sekali tetap dijalankan dengan sejumlah kandidat dan pemilih dari Kristen Maronit yang abstain.¹⁸⁴ Hizbullah menjadi partai yang memimpin perolehan suara di pemilu 1992, dengan perolehan hampir 10% kursi pada legislatif Lebanon karena minimnya partisipasi Kristen Maronit dalam pemilu.¹⁸⁵

Selama berlangsungnya konflik sipil 1975-1990, banyak para tokoh politik dan jurnalis yang menjadi sandera milisi jihad kaum Muslim dan Kristen ekstrim. Pada tahun 1991 saat Lebanon mulai berkembang dengan keamanan yang lebih baik, para sandera yang selama ini ditahan berangsur-angsur dibebaskan. Termasuk para sandera yang berasal dari Barat yang ditahan oleh gerakan jihad Muslim milik Hizbullah. Begitu juga Israel yang melepaskan 51 orang tahanan Lebanon, dengan timbal balik pertukaran informasi mengenai korban atau pasukan Israel yang ditahan di Lebanon.¹⁸⁶

Bidang perekonomian merupakan prioritas utama perkembangan Lebanon setelah politik menyusul dilaksanakannya pemilihan umum dan perombakan konstitusi. Perdana Menteri Rafik Hariri yang menjabat pada tahun 1992, terbukti berhasil merekonstruksi keuangan Lebanon dengan menginvestasikan bidang perniagaan. Dia juga membangun *Solidere* di Beirut, sebuah perusahaan saham pemerintah yang dibangun untuk memperkuat pangsa pasar Lebanon yang terpuruk sekian puluh tahun. Beberapa proyek lainnya yaitu pengembangan transportasi dan infrastruktur masyarakat. Harapan utama Rafik Hariri adalah dapat mengembalikan perekonomian Lebanon seperti dulu kala ditengah situasi politik yang kompleks.¹⁸⁷ Rafik Hariri juga mulai membangun kembali hubungan kerjasama bilateral sempat yang terputus dengan Perancis dan Amerika Serikat. Dengan memberlakukan sistem ekonomi *laissez-faire* untuk menarik minat para

¹⁸³ Pemilu tersebut merupakan pemilu pertama kali yang mengangkat 128 anggota parlemen, dengan kevakuman kabinet selama 20 tahun semenjak pemilu sebelumnya yang diadakan pada tahun 1972. Lihat, Ian, O'Flynn, dan David Russell (ed). *Op., Cit.*, hlm. 140.

¹⁸⁴ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 274.

¹⁸⁵ Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*, hlm. 547.

¹⁸⁶ Charles Winslow, *Op. Cit.*, hlm. 276.

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 278.

investor luar negeri ke dalam perekonomian Lebanon.¹⁸⁸ Hasilnya PDB per kapita Lebanon naik tajam 353% pada tahun 1990an.¹⁸⁹

Meskipun usahanya terbukti berhasil, Rafik Hariri sempat beberapa kali melakukan usaha untuk mengundurkan diri sebanyak 3 kali karena tekanan dari parlemen. Parlemen Lebanon menganggap keputusan Rafik Hariri yang menginginkan pertumbuhan perekonomian secara cepat merupakan perubahan yang terlalu terburu-buru. Parlemen khawatir tidak menutup kemungkinan bahwa perekonomian Lebanon yang naik tajam akan mengalami penurunan yang drastis pula jika rakyat Lebanon belum siap menerima perubahan yang terlalu radikal.¹⁹⁰

Di sisi lain Walid Junblat seorang Druze, sebagai menteri yang bertanggung jawab terhadap rakyat terlantar mulai melakukan gerakan sosial di kawasan Lebanon. Sebuah program yang bertujuan untuk melindungi dan memulangkan kembali warga yang menderita sebagai korban perang. Walid Junblat perlahan-lahan mulai menjalankan programnya keseluruh pelosok Lebanon, terutama di daerah-daerah konflik akibat perang sipil 1975-1990. Program tersebut berhasil membangun kembali pemukiman yang hancur dan mengumpulkan para warganya untuk pulang ke daerah asalnya. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi warga Palestina yang bermukim di wilayah perbatasan Selatan Lebanon. Pemerintah memutuskan untuk mengurangi kamp-kamp pengungsian yang akan dibangun, dengan pembatasan 50.000 pengungsi Palestina yang berhak menjadi warga negara Lebanon, termasuk kesamarataan hak sebagai warga negara didalamnya.¹⁹¹ Karena program pemerintah untuk jangka panjang adalah menjadikan Lebanon sebagai negara yang berkuasa atas kawasannya, dan kawasan tersebut merupakan hak dari warga negaranya sesuai dengan apa yang tertuang dalam isi *Taif Agreement* seksi "I. Prinsip-prinsip Umum".¹⁹²

Perlahan-lahan Lebanon mulai mengembangkan elemen-elemen pemerintahannya yang selama berlangsung perang sipil tidak berfungsi secara maksimal. Kondisi politik dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan Lebanon

¹⁸⁸ Fawwas Traboulzi, *Op. Cit.*

¹⁸⁹ <http://earthtrends.wri.org/text/economics-business/variable-638.html> (diakses pada 12 Desember 2010).

¹⁹⁰ Charles Winslow, *Op. Cit.*

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² Sarah Barclay, *Loc. Cit.*, hlm. 79.

yang baru, keadaan ekonomi yang tumbuh pesat, dan yang paling terpenting adalah keadaan sosial masyarakat sektarian mulai terbangun dengan kepercayaan terhadap jaminan keamanan yang lebih baik dan pemerintah Lebanon yang lebih adil. Semua hal tersebut terjadi setelah dilakukan gencatan senjata perang sipil 1975-1990, demi mengembalikan kejayaan Lebanon dahulu sebagai surga pariwisata Timur Tengah dan ibukota perbankan bagi dunia Arab atau *The Switzerland of the Middle East*.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagai sebuah negara yang kompleks akan keberadaan umat beragamanya, Lebanon termasuk negara yang kaya akan keindahan alam hingga kekayaan etnik dan budaya serta sistem berpolitikanya. Melalui perjalanan panjang sejarah dan kekayaan budaya, membuat Lebanon menjadi sebuah bangsa dengan tingkat heterogen masyarakatnya yang tinggi. Karena itulah Lebanon senantiasa menjadi aktor penting di kawasan Asia Barat dan dunia internasional. Namun didasari atas keberagaman tersebutlah yang menjadikan Lebanon rentan akan konflik sektarian. Konflik sipil menjadi kelemahan dari keberagaman kaum beragama di Lebanon.

Hasil kajian menunjukkan penyebab konflik sipil 1975-1990 adalah masalah pembagian kekuasaan berupa perbedaan porsi representasi di pemerintahan yang berat sebelah, kesenjangan sosial-ekonomi antar kaum yang terlalu jauh terutama di bidang sosial ekonomi antara Kristen Maronit dengan Muslim sejak era kekhalifahan Ottoman. Selanjutnya kedatangan para pengungsi Palestina akibat dari perang Arab-Israel yang menambah struktur demografis masyarakat Lebanon. Kemudian keterlibatan pihak-pihak asing seperti Israel, Suriah, Amerika Serikat, Iran yang ikut campur dalam perang terbuka maupun keputusan pemerintah Lebanon. Lalu yang terakhir, perbedaan cara pandang masyarakat sektarian Lebanon mengenai arah dan tujuan nasionalisme negaranya kedepan.

Proses terjadinya konflik sipil bermula ketika kaum Muslim dan Kristen terpecah menjadi dua kubu. Di pihak kaum Kristen ingin agar pemerintah Lebanon lebih memfokuskan membenahi urusan dalam negeri dengan mengorbankan permasalahan Palestina-Israel. Di pihak lain yaitu kaum Muslim, menginginkan agar pemerintah Lebanon lebih mengedepankan penyelesaian konflik antar Palestina-Israel, karena konflik tersebut telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan infrastruktur tempat tinggal bagi kaum Muslim. Keberadaan milisi Palestina yang berselisih dengan Israel, menimbulkan konflik kepentingan

diantara teritorium 3 negara yaitu, Palestina, Israel, dan Lebanon. Dibawah tekanan baik dari Dunia Arab maupun anggota parlemennya sendiri, Lebanon dituntut untuk lebih berperan dalam konflik Israel-Palestina yang tak berkesudahan. Hubungan pemerintahan yang dikuasai Muslim dan Kristen Maronit menjadi retak, terpecah dalam berbagai cara penyelesaian konflik yang saling bersinggungan.

Konflik kepentingan kemudian menjurus kepada perpecahan yang berkelanjutan antar organisasi militer, partai politik, dan pihak asing yang memiliki kepentingan di Lebanon. Setiap kelompok politik berafiliasi pada kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi situasi regional, seperti kelompok pro-Suriah, pro-Palestina, maupun pro-Barat. Dengan semakin runtuhnya pemerintahan, tidak bersatunya militer, dan semakin menyebarnya konflik, berakibat pada munculnya kontra realita sosial dan ideologi antara kaum Kristen melawan Muslim.

Konflik sipil 1975-1990 yang diakhiri oleh sebuah perjanjian *Taif Agreement*, membawa dampak perubahan terhadap kondisi politik, sosial, dan ekonomi Lebanon. Karena perang dapat diakhiri maka pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Pendistribusian ulang rasio sebelumnya berupa 6:5, diubah menjadi seimbang sehingga dari 128 kursi parlemen yang tersedia masing-masing kaum mendapat 64 kursi. Perwakilan 128 anggota parlemen juga dibagikan secara proporsional kepada Muslim Sunni, Syi'ah, Druze, Alawit, Kristen Maronit, Katolik Yunani, Ortodok Yunani, dan Ortodok Armenia, serta beberapa kaum beragama minoritas.

Struktur pemerintah tertinggi Lebanon saat ini secara sah dipegang oleh Presiden, Perdana Menteri, dan Ketua Dewan Parlemen. Kekuasaan Presiden juga dikurangi setelah sebelumnya Presiden dapat mengangkat perdana menteri tanpa persetujuan Ketua Parlemen. Perekonomian dapat berangsur naik setelah dilakukan restrukturisasi melalui kebijakan-kebijakan perekonomian sistim *laissez-faire* oleh perdana menteri Rafik Hariri. Beliau juga mulai membangun kembali hubungan kerjasama bilateral yang sempat terputus dengan Perancis dan Amerika Serikat. Seiring dengan kembali berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian, maka masyarakat Lebanon mulai percaya bahwa Lebanon akan

kembali menuju ke arah yang lebih baik. Terutama dengan program pemulangan korban dan pembangunan kembali pemukiman yang hancur akibat konflik sipil.

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa pertama, konflik terjadi akibat masalah pembagian kekuasaan, kesenjangan sosial-ekonomi antar kaum Kristen dengan Muslim yang dimulai sejak era kekhalifahan Ottoman, kedatangan para pengungsi Palestina yang menambah struktur demografis, dan terakhir keterlibatan pihak-pihak asing dalam perang terbuka maupun pemerintahan. Kedua, konflik yang terjadi selama 15 tahun terjadi karena bentrokan kaum Muslim dengan Kristen melalui organisasi militernya yang memiliki perbedaan kepentingan. Ketiga, *Taif Agreement* terbukti berhasil mengakhiri konflik sipil dengan mengubah dan mengesahkan konstitusi sebelumnya melalui Pakta Nasional, dan memulihkan keadaan sosial ekonomi Lebanon.

5.2 Saran

Penulis hanya membahas mengenai pengaruh konflik sipil Lebanon tahun 1975 sampai dengan 1990. Banyak hal lain yang tidak penulis jelaskan secara mendalam pada penulisan ini, seperti profil kegiatan partai-partai politik maupun organisasi masyarakat yang terlibat dalam konflik sipil dapat membawa dampak perubahan dalam pemerintah Lebanon.

Penulis menyarankan kepada para peneliti atau para mahasiswa untuk dapat mengkaji beberapa persoalan yang belum dibahas, diantaranya partai politik dan organisasi masyarakat seperti Phalangis, al-Amal, *Lebanese Front*, PSP, Gerakan *Nasserite*, dan sebagainya, dapat lebih dibahas mengenai latar belakang, tokoh, peranan, hingga kegiatan-kegiatannya yang memengaruhi pemerintah Lebanon. Selain itu, bagaimana sebuah paham komunis dapat masuk dan berkembang di kawasan Lebanon.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- The World Book Encyclopedia*, USA: World Book Inc, 1988.
- Akarli, E.D. *The Long Peace: Ottoman Lebanon. 1861-1920*. Los Angeles: University of California Press, 1993.
- Arfi, Badredine. *International Change and the Stability of Multiethnic States; Yugoslavia, Lebanon And Crises Of Governance*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2005.
- Armajani, Yahya. *The Middle East Past And Present*. New Jersey: Prentice Hall, 1970.
- Banks, Arthur S, Alan J.D. Thomas C.M. (ed), *Political Handbook of The World 1997*. New York: CSA Publication Binghamton, 1997.
- Burdah, Ibnu. *Konflik Timur Tengah: Aktor, Isu, dan Dimensi Konflik*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Cleveland, W., dan Bunton, M. *A History Of The Modern Middle East 3rd ed*. Oxford: Westview Press, 2004.
- Dawisha, Adeed. *Arab Nationalism In Twentieth Century: From Triumph to Despair*. New Jersey: Princeton University Press, 2003.
- Dipoyudo, Kirdi. *Timur Tengah dalam Pergolakan*. Jakarta: CSIS, 1977.
- Ellis, K.C.. *Lebanon's Second Republic Prospects for the Twenty-first Century*. Florida: University Press, 2002.
- O'Flynn, Ian., dan Russell David (ed). *Power-Sharing New Challenges for Divided Societies*. London: Pluto Press, 2005.
- Haughbolle, Sune. *War And Memory In Lebanon*. New York: Cambridge Univ Press, 2010.
- Hitti, P. A.. *History Of Syria: Including Lebanon And Palestine*. London: Macmilan & Co Ltd, 1951.
- *A Sort History Of The Near East*. London: Princeton University, 1966.

- Lenczowski, George. *The Middle East In The World Affairs*. New York: Cornell Univ Press, 1952.
- Gaspard, Toufic K. *A Political Economy Of Lebanon, 1948-2002 The limits of laissez-faire*. Netherland: Brill, 2004.
- Miall, Hugh, et al. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, terj. Tri Budhi Sastrio, Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- MacQueen, Benjamin. *Political Culture and Conflict Resolution in the Arab World; Lebanon and Algeria*. Victoria: Melbourne University Press.
- Milton-Edwards, Beverley. *Conflicts in The Middle East since 1945 2nd edition*. London: Routledge, 2002.
- Mochtar, Mas'ood. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3S, 1990.
- Monroe, Elizabeth. *The Middle East A Political And Economic Survey 4th edition*. London: Oxford Univ Press, 1973.
- Morrison, S.A. *Middle East Survey The Political, Sosial & Religious Problem*. London: The Pitman Press, 1954.
- Sihbudi, Riza. *Bara Timur Tengah*. Bandung: Mizan, 1991.
- , *Konflik Lebanon: Pertalian Antar Berbagai Kepentingan, Jurnal Ilmu Politik Volume 3*, Jakarta: 1986.
- Traboulzi, Fawwas. *A History Of Modern Lebanon*. London: Pluto Press, 2007.
- Purnomo, Agus. *Ideologi Kekerasan: Argumentasi Teologis-Sosial Radikalisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Winslow, Charles. *Lebanon War & Politics In A Fragmented Society*. London: Routledge, 1996.

II. KARYA ILMIAH/JURNAL/ARTIKEL/KORAN/MAJALAH/DOKUMEN

- “Lebanon Di Ambang Perang Saudara”. *Seputar Indonesia*. 8 Desember 2006.
- Factsheet series no 27: Understanding Lebanese Confesionalism ed May, 2007, Canadians for Justice and Peace in the Middle East
- Majalah *Edisi Koleksi Angkasa*. September 2006.

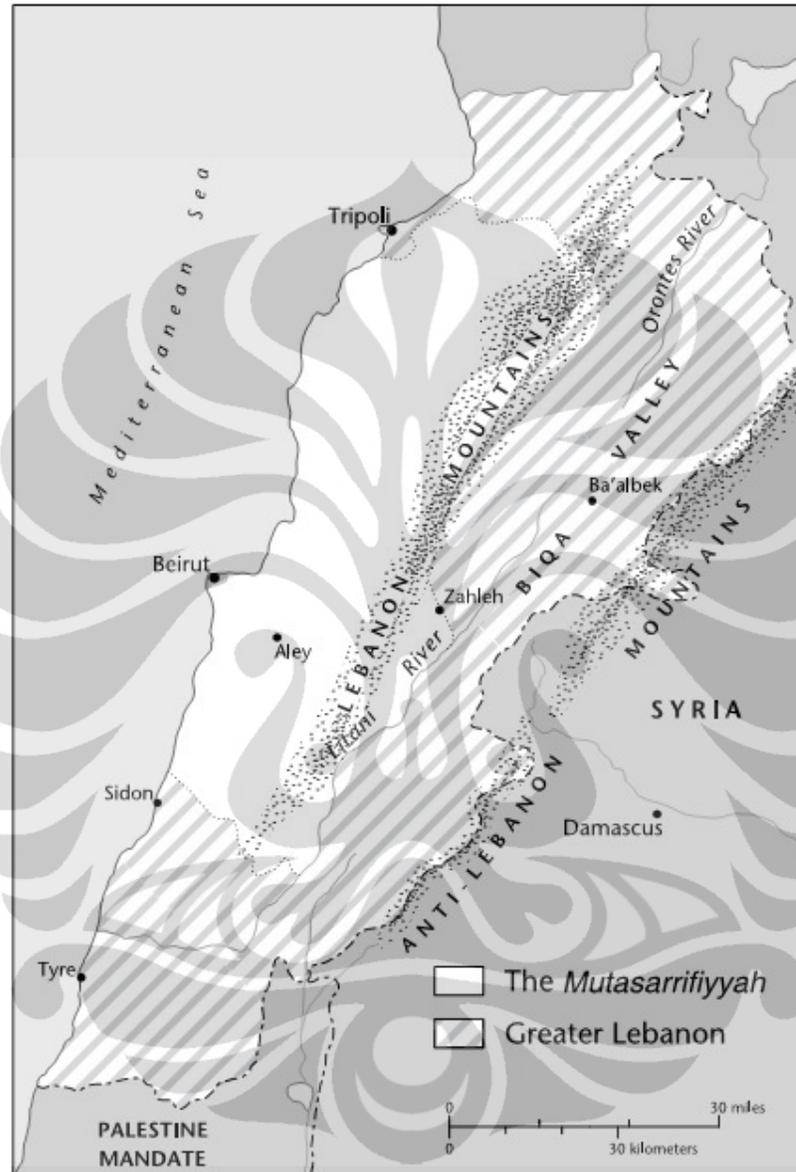
- Akarli, E.D.. *The Long Peace : Ottoman Lebanon, 1861-1920*. Los Angeles: University of California Press, 1993.
- Barclay, Sarah.. *College of Arts and Sciences CUREJ - College Undergraduate Research Electronic Journal - Consociationalism in Lebanon*. Pennsylvania: University of Pennsylvania, 2007.
- Laffin, John. *War of Desperation (Lebanon 1982-1985)*. London: Osprey Publishing, 1985.
- Makdisi, Samir. *The Lessons Of Lebanon: The Economics of War And Development*. London: I.B.Tauris & Co. Ltd, 2004.
- Preston, Matthew. *Ending Civil War: Rhodesia and Lebanon In Perspective*. London: I.B.Tauris & Co. Ltd, 2004.
- Robert L.B and Lawrence H.L., *The Eisenhower Administration, 1953–1961: A Documentary History, vol. 2*. New York: Random House, 1971

III. WEBSITE

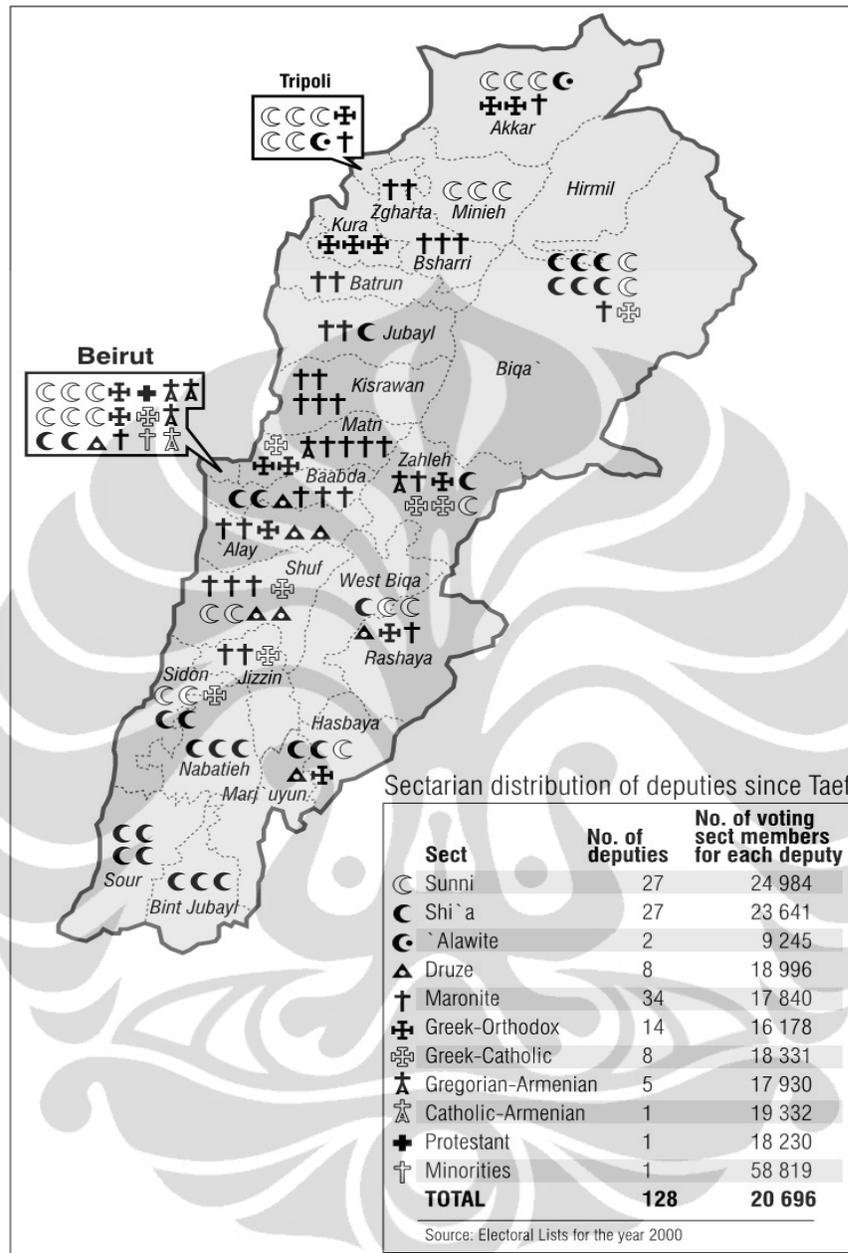
- <http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/lbtoc.html>
- http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7583757.stm
- http://www.lib.byu.edu/index.php/Sykes-Picot_Agreement
- http://www.lebguide.com/lebanon/history/lebanon_history_french_mandate
- <http://www.unrv.com/early-empire/pax-romana.php>
- <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/lebanon.htm>
- <http://www.dcc.aub.edu.lb/>
- <http://www.balkananalysis.com/2004/02/17/problems-of-consociationalism-from-the-netherlands-to-macedonia/>
- <http://earthtrends.wri.org/text/economics-business/variable-638.html>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Perbandingan wilayah Lebanon Raya dan *Mutasarrifiyyah*

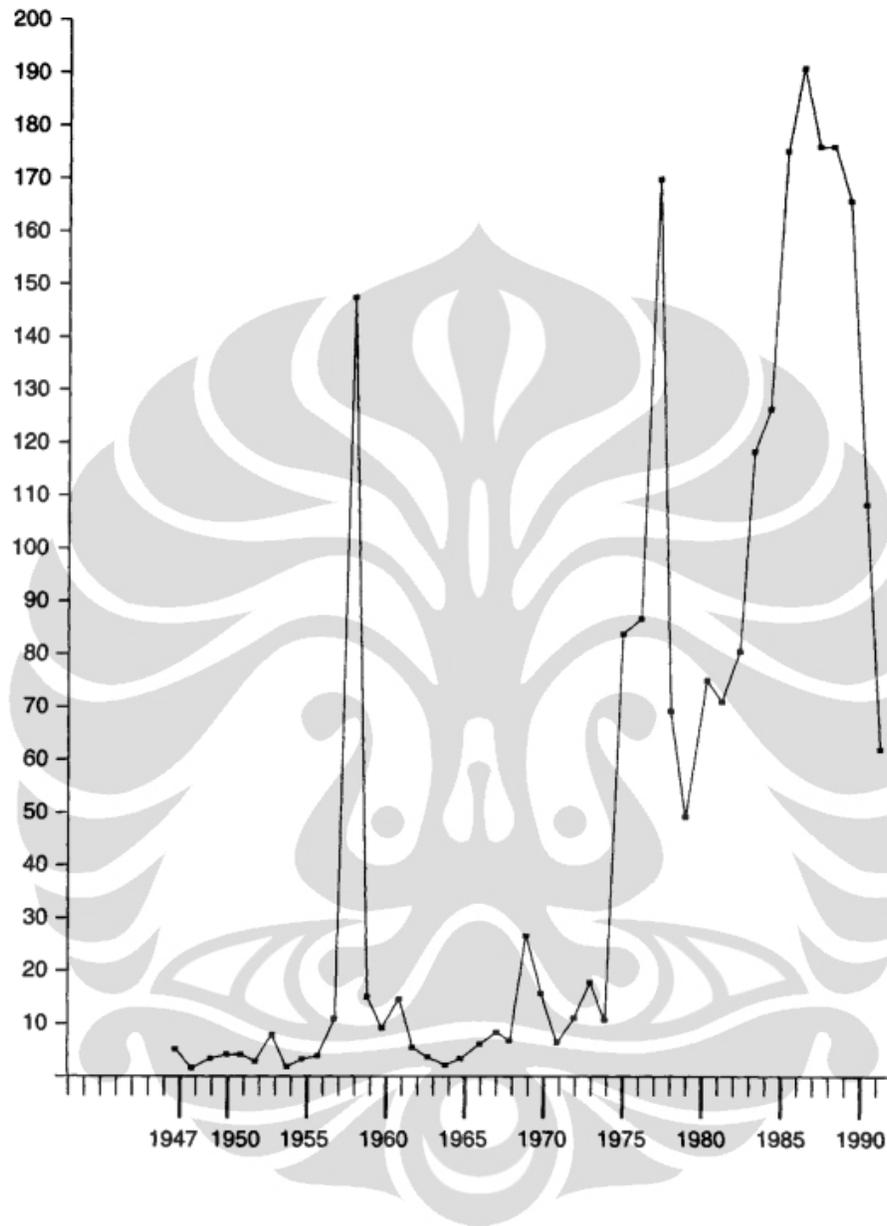


Sumber: William. C., dan Martin. Burton. *M. A History Of The Modern Middle East 3rd ed.* Oxford: Westview Press, 2004. Hlm. 220.

Lampiran 2: Distribusi Kursi Parlemen Setelah *Taif Agreement*.

Sumber: Fawwas, Traboulzi. *A History Of Modern Lebanon*. London: Pluto Press, 2007. Hlm. 241.

Lampiran 3: Grafik insiden konflik selama kurun waktu 1947-1990.



Sumber: Charles Winslow, *Lebanon War & Politics In A Fragmented Society*, London: Routledge, 1996, hlm. 280.

Lampiran 4: Stadium Beirut yang dihancurkan pasukan Israel karena dicurigai sebagai gudang senjata dan markas PLO



Sumber: John Laffin, *War of Desperation (Lebanon 1982-1985)*, London: Osprey Publishing, 1985., hlm: 23.

Lampiran 5: Seorang anak kecil di Marjayoun yang memegang senapan pistol merefleksikan ketegangan kondisi Lebanon kala perang sipil



Sumber: John Laffin, *War of Desperation (Lebanon 1982-1985)*, London: Osprey Publishing, 1985., hlm: 25.

Lampiran 6: Bassam Naim seorang gadis berumur 13 tahun yang menjadi pasukan militer Phalangis selama 2 tahun menaiki tank pengangkut M113



Sumber: John Laffin, *War of Desperation (Lebanon 1982-1985)*, London: Osprey Publishing, 1985., hlm: 49.

Lampiran 7: Bashir Gemayel dengan seragam pasukan Phalangis



Sumber: John Laffin, *War of Desperation (Lebanon 1982-1985)*, London: Osprey Publishing, 1985., hlm: 171.

Lampiran 8: Bishara al-Khuri Presiden pertama Lebanon setelah merdeka



Sumber: <http://images-mediawiki-sites.thefullwiki.org/03/3/8/7/6458835909920131.jpg> (diakses pada 20 Desember 2010)

Lampiran 9: Taif Agreement

Appendix A:

THE TAIF AGREEMENT

First, General Principles and Reforms:

I. General Principles:

A. Lebanon is a sovereign, free, and independent country and a final homeland for all its citizens.

B. Lebanon is Arab in belonging and identity. It is an active and founding member of the Arab League and is committed to the league's charter. It is an active and founding member of the United Nations Organization and is committed to its charters. Lebanon is a member of the nonaligned movement. The state of Lebanon shall embody these principles in all areas and spheres, without exception.

C. Lebanon is a democratic parliamentary republic founded on respect for public liberties, especially the freedom of expression and belief, on social justice, and on equality in rights and duties among all citizens, without discrimination or preference.

D. The people are the source of authority. They are sovereign and they shall exercise their sovereignty through the constitutional institutions.

E. The economic system is a free system that guarantees individual initiative and private ownership.

F. Culturally, socially, and economically-balanced development is a mainstay of the state's unity and of the system's stability.

G. Efforts (will be made) to achieve comprehensive social justice through fiscal, economic, and social reform.

H. Lebanon's soil is united and it belongs to all the Lebanese. Every Lebanese is entitled to live in and enjoy any part of the country under the supremacy of the law. The people may not be categorized on the basis of any affiliation whatsoever and there shall be no fragmentation, no partition, and no repatriation [of Palestinians in Lebanon].

I. No authority violating the common co-existence charter shall be legitimate

II. Political Reforms

A. Chamber of Deputies: The Chamber of Deputies is the legislative authority which exercises full control over government policy and activities.

1. The Chamber spokesman and his deputy shall be elected for the duration of the chamber's term.

2. In the first session, two years after it elects its speaker and deputy speaker, the chamber may vote only once to withdraw confidence from its speaker or deputy speaker with a 2/3 majority of its members and in accordance with a petition submitted by at least 10 deputies. In case confidence is withdrawn, the chamber shall convene immediately to fill the vacant post.

3. No urgent bill presented to the Chamber of Deputies may be issued unless it is included in the agenda of a public session and read in such a session, and unless the grace period stipulated by the constitution passes without a resolution on such a bill with the approval of the cabinet.

4. The electoral district shall be the governorate.

5. Until the Chamber of Deputies passes an election law free of sectarian restriction, the parliamentary seats shall be divided according to the following bases:

- a. Equally between Christians and Muslims.
- b. Proportionately between the denominations of each sect.
- c. Proportionately between the districts.

6. The number of members of the Chamber of Deputies shall be increased to 108, shared equally between Christians and Muslims. As for the districts created on the basis of this document and the districts whose seats became vacant prior to the proclamation of this document, their seats shall be filled only once on an emergency basis through appointment by the national accord government that is planned to be formed.

7. With the election of the first Chamber of Deputies on a national, not sectarian, basis, a senate shall be formed and all the spiritual families shall be represented in it. The senate powers shall be confined to crucial issues. President of Republic: The president of republic is the head of the state and a symbol of the country's unity. He shall contribute to enhancing the constitution and to preserving Lebanon's independence, unity, and territorial integrity in accordance with the provisions of the constitution. He is the supreme commander of the armed forces which

B. President of Republic: The president of republic is the head of the state and symbol of the country's unity. He shall contribute to enhancing the constitution and to preserving Lebanon's independence, unity, and territorial integrity in accordance with the provisions of the constitution. He is the supreme commander of the armed forces which are subject to the power of the cabinet. The president shall exercise the following powers:

1. Head the cabinet [meeting] whenever he wishes, but without voting.
2. Head the Supreme Defense Council.
3. Issues decrees and demand their publication. He shall also be entitled to ask the cabinet to reconsider any resolution it makes within 15 days of the date of deposition of the resolution with the presidential office. Should the cabinet insist on the adopted resolution, or should the grace period pass without issuing and returning the decree, the decree of the resolution shall be valid and must be published.
4. Promulgate laws in accordance with the grace period stipulated by the constitution and demand their publication upon ratification by the Chamber of Deputies. After notifying the cabinet, the president may also request reexamination of the laws within the grace periods provided by the constitution, and in accordance with the articles of the constitution. In case the laws are not issued or returned before the end of the grace periods, they shall be valid by law and they must be published.
5. Refer the bills presented to him by the Chamber of Deputies.

6. Name the prime minister-designate in consultation with the Chamber of Deputies speaker on the basis of binding parliamentary consultation, the outcome of which the president shall officially familiarize the speaker on.
7. Issue the decree appointing the prime minister independently.
8. On agreement with the prime minister, issue the decree forming the cabinet.
9. Issue decrees accepting the resignation of the cabinet or of cabinet ministers and decrees relieving them from their duties.
10. Appoint ambassadors, accept the accreditation of ambassadors, and award state medals by decree.
11. On agreement with the prime minister, negotiate on the conclusion and signing of international treaties which shall become valid only upon approval by the cabinet. The cabinet shall familiarize the Chamber of Deputies with such treaties when the country's interest and state safety make such familiarization possible. As for treaties involving conditions concerning state finances, trade treaties, and other treaties, which may not be abrogated annually, they may not be concluded without Chamber of Deputies' approval.
12. When the need arises, address messages to the Chamber of Deputies.
13. On agreement with the prime minister, summon the Chamber of Deputies to hold special sessions by decree.
14. The president of the republic is entitled to present to the cabinet any urgent issue beyond the agenda.
15. On agreement with the prime minister, call the cabinet to hold a special session whenever he deems it necessary.
16. Grant special pardon by decree.
17. In the performance of his duty, the president shall not be liable unless he violates the constitution or commits high treason.

C. Prime Minister: The prime minister is the head of the government. He represents it and speaks in its name. He is responsible for implementing the general policy drafted by the cabinet. The prime minister shall exercise the following powers:

1. Head the cabinet.
2. Hold parliamentary consultations to form the cabinet and co-sign with the president the decree forming it. The cabinet shall submit its cabinet statement to the Chamber of Deputies for a vote of confidence within 30 days [of its formation]. The cabinet may not exercise its powers before gaining the confidence, after its resignation, or when it is considered retired, except within the narrow sense of disposing of affairs.
3. Present the government's general policy to the Chamber of Deputies.
4. Sign all decrees, except for decrees naming the prime minister and decrees accepting cabinet resignation or considering it retired.
5. Sign the decree calling for a special session and decrees issuing laws and requesting the reexamination of laws.
6. Summon the cabinet to meet, draft its agenda, familiarize the president of the republic in advance with the issues included in the agenda and with the urgent issues to be discussed, and sign the usual session minutes.
7. Observe the activities of the public departments and institutions, coordinate between the ministers, and issue general instructions to ensure the smooth progress of work.

8. Hold working sessions with the state agencies concerned in the presence of the minister concerned.
9. By law, act as the Supreme Defense Council's deputy chairman.

D. Cabinet:

[No item 1. as published]

2. Watch over the implementation of laws and regulations and supervise the activities of all the state agencies without exception, including the civilian, military, and security departments and institutions.
3. The cabinet is the authority which controls the armed forces.
4. Appoint, dismiss, and accept the resignation of state employees in accordance with the law.
5. It has the right to dissolve the Chamber of Deputies at the request of the president of the republic if the chamber refuses to meet throughout an ordinary or a special session lasting no less than one month, even though it is summoned twice consecutively, or if the chamber sends back the budget in its entirety with the purpose of paralyzing the government. This right may not be exercised again for the same reasons which called for dissolving the chamber in the first instance.
6. When the president of the republic is present, he heads cabinet sessions. The cabinet shall meet periodically at special headquarters. The legal quorum for a cabinet meeting is $\frac{2}{3}$ the cabinet members. The cabinet shall adopt its resolutions by consent. If impossible, then by vote. The resolutions shall be adopted by a majority of the members present. As for major issues, they require the approval of $\frac{2}{3}$ the cabinet members. The following shall be considered major issues: The state of emergency and its abolition, war and peace, general mobilization, international agreements and treaties, the state's general budget, comprehensive and long-term development plans, the appointment of top-level civil servants or their equivalent, reexamination of the administrative division, dissolving the Chamber of Deputies, the election law, the citizenship law, the personal status laws, and the dismissal of cabinet ministers.

E. Minister: The minister's powers shall be reinforced in a manner compatible with the government's general policy and with the principle of collective responsibility. A minister shall not be relieved from his position unless by cabinet decree or unless the Chamber of Deputies withdraws its confidence from him individually.

F. Cabinet Resignation, Considering Cabinet Retired, and Dismissal of Ministers:

1. The cabinet shall be considered retired in the following cases:
 - a. If its chairman resigns.
 - b. If it loses more than $\frac{1}{3}$ of its members as determined by the decree forming it.
 - c. If its chairman dies.
 - d. At the beginning of a president's term.
 - e. At the beginning of the Chamber of Deputies' term.
 - f. When the Chamber of Deputies withdraws its confidence from it on an initiative by the chamber itself and on the basis of a vote of confidence.

2. A minister shall be relieved by a decree signed by the president of the republic and the prime minister, with cabinet approval.

3. When the cabinet resigns or is considered retired, the Chamber of Deputies shall, by law, be considered to be convened in a special session until a new cabinet is formed. A vote-of-confidence session shall follow.

G. Abolition of Political Sectarianism: Abolishing political sectarianism is a fundamental national objective. To achieve it, it is required that efforts be made in accordance with a phased plan. The Chamber of Deputies elected on the basis of equal sharing by Christians and Muslims shall adopt the proper measures to achieve this objective and to form a national council which is headed by the president of the republic and which includes, in addition to the prime minister and the Chamber of Deputies speaker, political, intellectual, and social notables. The council's task will be to examine and propose the means capable of abolishing sectarianism, to present them to the Chamber of Deputies and the cabinet, and to observe implementation of the phased plan. The following shall be done in the interim period:

a. Abolish the sectarian representation base and rely on capability and specialization in public jobs, the judiciary, the military, security, public, and joint institutions, and in the independent agencies in accordance with the dictates of national accord, excluding the top-level jobs and equivalent jobs which shall be shared equally by Christians and Muslims without allocating any particular job to any sect.

b. Abolish the mention of sect and denomination on the identity card.

III. Other Reforms:

A. Administrative Decentralism:

1. The State of Lebanon shall be a single and united state with a strong central authority.

2. The powers of the governors and district administrative officers shall be expanded and all state administrations shall be represented in the administrative provinces at the highest level possible so as to facilitate serving the citizens and meeting their needs locally.

3. The administrative division shall be recognized in a manner that emphasizes national fusion within the framework of preserving common coexistence and unity of the soil, people, and institutions.

4. Expanded administrative decentralization shall be adopted at the level of the smaller administrative units [district and smaller units] through the election of a council, headed by the district officer, in every district, to ensure local participation.

5. A comprehensive and unified development plan capable of developing the provinces economically and socially shall be adopted and the resources of the municipalities, unified municipalities, and municipal unions shall be reinforced with the necessary financial resources.

B. Courts:

[1] To guarantee that all officials and citizens are subject to the supremacy of the law and to insure harmony between the action of the legislative and executive authorities on the one hand, and the givens of common coexistence and the basic rights of the Lebanese as stipulated in the constitution on the other hand:

1. The higher council which is stipulated by the constitution and whose task it is to try presidents and ministers shall be formed. A special law on the rules of trial before this council shall be promulgated.

2. A constitutional council shall be created to interpret the constitution, to observe the constitutionality of the laws, and to settle disputes and contests emanating from presidential and parliamentary elections.

3. The following authorities shall be entitled to revise the constitutional council in matters pertaining to interpreting the constitution and observing the constitutionality of the laws:

a. The president of the republic.

b. The Chamber of Deputies speaker.

c. The prime minister.

d. A certain percentage of members of the Chamber of Deputies.

[2] To ensure the principle of harmony between religion and state, the heads of the Lebanese sects may revise the constitutional council in matters pertaining to:

1. Personal status affairs.

2. Freedom of religion and the practice of religious rites.

3. Freedom of religious education.

C. To ensure the judiciary's independence, a certain number of the Higher Judiciary Council shall be elected by the judiciary body.

D. Parliamentary Election Law: Parliamentary elections shall be held in accordance with a new law on the basis of provinces and in the light of rules that guarantee common coexistence between the Lebanese, and that ensure the sound and efficient political representation of all the people's factions and generations. This shall be done after reviewing the administrative division within the context of unity of the people, the land, and the institutions.

E. Creation of a socioeconomic council for development: A socioeconomic council shall be created to insure that representatives of the various sectors participate in drafting the state's socioeconomic policy and providing advice and proposals.

F. Education:

1. Education shall be provided to all and shall be made obligatory for the elementary stage at least.

2. The freedom of education shall be emphasized in accordance with general laws and regulations.

3. Private education shall be protected and state control over private schools and textbooks shall be strengthened.

4. Official, vocational, and technological education shall be reformed, strengthened, and developed in a manner that meets the country's development and reconstruction needs. The conditions of the Lebanese University shall be reformed and aid shall be provided to the university, especially to its technical colleges.

5. The curricula shall be reviewed and developed in a manner that strengthens national belonging, fusion, spiritual and cultural openness, and that unifies textbooks on the subjects of history and national education.

G. Information: All the information media shall be reorganized under the canopy of the law and within the framework of responsible liberties that serve

the cautious tendencies and the objective of ending the state of war. Second, spreading the sovereignty of the State of Lebanon over all Lebanese territories: Considering that all Lebanese factions have agreed to the establishment of a strong state founded on the basis of national accord, the national accord government shall draft a detailed one-year plan whose objective is to spread the sovereignty of the State of Lebanon over all Lebanese territories gradually with the state's own forces. The broad lines of the plan shall be as follows:

A. Disbanding of all Lebanese and non-Lebanese militias shall be announced. The militias' weapons shall be delivered to the State of Lebanon within a period of 6 months, beginning with the approval of the national accord charter. The president of the republic shall be elected. A national accord cabinet shall be formed, and the political reforms shall be approved constitutionally.

B. The internal security forces shall be strengthened through:

1. Opening the door of voluntarism to all the Lebanese without exception, beginning the training of volunteers centrally, distributing the volunteers to the units in the governorates, and subjecting them to organized periodic training courses.
2. Strengthening the security agency to insure control over the entry and departure of individuals into and out of the country by land, air, and sea.

C. Strengthening the armed forces:

1. The fundamental task of the armed forces is to defend the homeland, and if necessary, protect public order when the danger exceeds the capability of the internal security forces to deal with such a danger on their own.
2. The armed forces shall be used to support the internal security forces in preserving security under conditions determined by the cabinet.
3. The armed forces shall be unified, prepared, and trained in order that they may be able to shoulder their national responsibilities in confronting Israeli aggression.
4. When the internal security forces become ready to assume their security tasks, the armed forces shall return to their barracks.
5. The armed forces intelligence shall be reorganized to serve military objectives exclusively.

D. The problem of the Lebanese evacuees shall be solved fundamentally, and the right of every Lebanese evicted since 1975 to return to the place from which he was evicted shall be established. Legislation to guarantee this right and to insure the means of reconstruction shall be issued. Considering that the objective of the State of Lebanon is to spread its authority over all the Lebanese territories through its own forces, represented primarily by the internal security forces, and in view of the fraternal relations binding Syria to Lebanon, the Syrian forces shall thankfully assist the forces of the legitimate Lebanese government to spread the authority of the State of Lebanon within a set period of no more than 2 years, beginning with ratification of the national accord charter, election of the president of the republic, formation of the national accord cabinet, and approval of the political reforms constitutionally. At the end of this period, the two governments -- the Syrian Government and the Lebanese National

Accord Government – shall decide to redeploy the Syrian forces in Al-Biq'a area from Dahr al-Baydar to the Hammana-al-Mudayrij-'Ayn Darah line, and if necessary, at other points to be determined by a joint Lebanese-Syrian military committee. An agreement shall also be concluded by the two governments to determine the strength and duration of the presence of Syrian forces in the above-mentioned area and to define these forces' relationship with the Lebanese state authorities where the forces exist. The Arab Tripartite Committee is prepared to assist the two states, if they so wish, to develop this agreement. Third, liberating Lebanon from the Israeli occupation: Regaining state authority over the territories extending to the internationally-recognized Lebanese borders requires the following:

- A. Efforts to implement resolution 425 and the other UN Security Council resolutions calling for fully eliminating the Israeli occupation.
- B. Adherence to the truce agreement concluded on 23 March 1949.
- C. Taking all the steps necessary to liberate all Lebanese territories from the Israeli occupation, to spread state sovereignty over all the territories, and to deploy the Lebanese army in the border area adjacent to Israel; and making efforts to reinforce the presence of the UN forces in South Lebanon to insure the Israeli withdrawal and to provide the opportunity for the return of security and stability to the border area.

Fourth, Lebanese-Syrian Relations: Lebanon, with its Arab identity, is tied to all the Arab countries by true fraternal relations. Between Lebanon and Syria there is a special relationship that derives its strength from the roots of blood relationships, history, and joint fraternal interests. This is the concept on which the two countries' coordination and cooperation is founded, and which will be embodied by the agreements between the two countries in all areas, in a manner that accomplishes the two fraternal countries' interests within the framework of the sovereignty and independence of each of them. Therefore, and because strengthening the bases of security creates the climate needed to develop these bonds, Lebanon should not be allowed to constitute a source of threat to Syria's security, and Syria should not be allowed to constitute a source of threat to Lebanon's security under any circumstances. Consequently, Lebanon should not allow itself to become a pathway or a base for any force, state, or organization seeking to undermine its security or Syria's security. Syria, which is eager for Lebanon's security, independence, and unity and for harmony among its citizens, should not permit any act that poses a threat to Lebanon's security, independence, and sovereignty.

Sumber: Sarah Barclay, *College of Arts and Sciences CUREJ - College Undergraduate Research Electronic Journal - Consociationalism in Lebanon*. Pennsylvania: University of Pennsylvania, 2007, hlm. 79-85.

GLOSARI

- ADF** Keputusan dari KTT Liga Arab untuk membentuk pasukan perdamaian Arab yang terdiri dari tentara Suriah, Arab Saudi dan Libya dengan nama ADF (*Arab Deterrant Forces*).
- AMAL** Kelompok perlawanan Lebanon. Sebuah gerakan radikal anti-Israel di Selatan Lebanon yang didirikan oleh Imam Musa al-Sadr pada tahun 1974.
- Doktrin Eisenhower** Sebuah negara dapat meminta bantuan ekonomi atau pasukan militer kepada Amerika Serikat untuk mengatasi permasalahan konflik di negaranya.
- Hizbullah** Kelompok radikal milik kaum Shi'ah, menjadi lawan dari AMAL. Hizbullah merupakan salah satu kelompok dan partai politik berpengaruh di Lebanon.
- Kana'an** Penduduk asli Lebanon yang hidup sebagai pedagang dan pelaut. Karena jiwa petualang dan kebiasaan mereka yg berpindah-pindah tempat, mereka mendirikan pemukiman yang independen di sepanjang Laut Tengah.
- Konfesionalisme** Tatanan pemerintahan yang mengedepankan sebuah kesamarataan berpolitik dan kekuasaan diantara komunitas etnik atau keagamaan.
- Konsosionalisme** Sistim yang pemerintahan berdasarkan keberagaman sosial.
- LNM (*Lebanese National Movement*)** Sebuah gerakan kaum Druze yang didirikan oleh Kamal Junbalat. Tujuan dari gerakan ini adalaah untuk menghalau pergerakan Phalangis. Gerakan yang mendukung aktifitas politik PSP.
- Liga Arab** Berdiri pada tahun 1974 oleh prakarsa Mesir, Lebanon, Irak, Suriah, Transjordan, Yaman, dan Arab Saudi.
- LF (*Lebanese Front* atau *Jabhat al-Lubnaniyya*)** Tujuan pembentukan gerakan koalisi kelompok Kristen ini adalah sebagai tandingan atas gerakan LNM yang diprakarsai oleh Kamal Junbalat. LF dbentuk oleh Camile Chamoun.

Mutaşarrifiyah Pembaharuan dari sistem *Qāim Maqām* dengan merestrukturisasi dan membekali pemerintahan di Gunung Lebanon dengan kekuasaan yang lebih baik karena disokong oleh bantuan internasional yang lebih berpengalaman dalam membantu menjalankan roda pemerintahannya. Sistem ini berlangsung dari tahun 1861 sampai dengan 1914.

Nasserism Sebuah ideologi gerakan nasionalisme dan Pan Arab yang dikombinasikan dengan paham Sosialisme. Ideologi ini menentang adanya komunisme di kawasan Arab karena bertolak belakang dengan tradisi dan nilai agama yang menjadi pondasi masyarakat Arab. *Nasserism* juga menolak adanya intervensi bangsa asing, karena akan menggerus nilai-nilai norma dan kemandirian bangsa Arab.

Nasserite Masyarakat yang menganut ideologi *Nasserism*.

Ottoman/Utsmaniyah Sebuah negara kekhalifahan multi-etnis dan multi-religius. Kekhalifahan Ottoman menjadi salah satu kekuatan utama dunia dengan angkatan lautnya yang kuat, sehingga menguasai belahan eropa dan asia barat. Menguasai Lebanon selama hampir 400 tahun

Pakta Nasional Perjanjian tidak tertulis yang menjadi dasar dari Konfesionalisme Lebanon setelah menyatakan kemerdekaannya dari Perancis. Dalam pakta tersebut diatur jabatan dalam pemerintahan harus terdiri dari; Presiden berasal dari kaum Kristen Maronit, Perdana Menteri yang berasal dari Muslim Sunni, Ketua Dewan Legislatif dari Muslim Shi'ah, dan Wakil Pembicara Anggota Parlemen berasal dari kaum Druze. Dengan perbandingan anggota parlemen 6:5 bagi Kristen Maronit dan kaum Muslim menurut sensus penduduk tahun 1932.

PLO (Palestine Liberation Organization) Berdiri pada tahun 1964, payung organisasi dari gerakan politik dan milisi Palestina.

Pan-Arab Gerakan persatuan Arab sebagai satu kesatuan negara-negara Arab.

Pax Romana Masa damai dan minimalisasi peperangan oleh militer bangsa Romawi yang dicetuskan oleh Cesar Agustus. *Pax Romana* kadang disebut juga *Pax Augusta* karena dibentuk oleh Cesar Agustus. Masa ini berjalan sekitar 207 tahun (dari tahun 27 SM sampai tahun 180)

- Perjanjian Konstantinopel** Perjanjian yang diselenggarakan pada 18 Maret 1915, dengan isinya membagi wilayah Suriah utara dan Asia Minor (Turki) kepada anggota *Triple Etente*.
- Perjanjian London** Perjanjian yang diselenggarakan pada 26 April 1915, yang diadakan pasca Itali menyatakan bergabung dengan kekuatan *Triple Etente* dan menginginkan bagian dari kemenangan perang kala itu. Dalam perjanjian tersebut, kawasan Turki dibagikan kepada Inggris dan Perancis. Palestina yang posisinya berdekatan dengan Suriah (yang menjadi wilayah kepemilikan Inggris dan Perancis), menjadi wilayah milik dunia internasional karena merupakan wilayah suci bagi semua umat beragama dan untuk menghindari terjadinya polemik dikemudian hari.
- Perjanjian Sykes–Picot** Turki Ottoman dibagi wilayahnya dan disahkan menjadi milik Inggris dan Perancis, dengan Perancis mendapatkan wilayah tenggara Turki, kawasan Utara Irak, Suriah dan Lebanon.
- Phalangist** Partai politik dan organisasi militer kaum Maronit di Lebanon. Merupakan salah satu organisasi yang menjadi penyebab konflik sipil Lebanon.
- Protein Corp** Sebuah perusahaan perikanan milik Camile Chamoun yang memicu terjadinya gelombang demonstrasi di Sidon.
- PSP(Progressive Social Party)** Partai sayap kiri kaum Druze yang didirikan oleh Walid Junblat. Partai ini sebagai pendukung gerakan LNM.
- Qāim Maqām** Sistem yang membagi kawasan Gunung Lebanon menjadi dua wilayah, yaitu wilayah untuk kaum Kristen dan kaum Druze.
- Taif Agreement** Perjanjian yang mengakhiri gencatan senjata selama 15 tahun Lebanon dengan merestrukturisasi konstitusi Lebanon menjadi lebih seimbang. Taif Agreement mengesahkan perjanjian tidak tertulis sebelumnya yang menjadi dasar Konfesionalisme, yaitu Pakta Nasional.
- Triple Etente** gabungan negara pada perang dunia pertama yang terdiri dari Inggris, Perancis, dan Rusia.
- UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon)** berdiri pada tahun 1978 atas diberlakukannya resolusi UN no 425 pasukan penjaga perdamaian.

INDEX

- ADF 42, 50, 53
- AMAL 42, 43, 44, 68
- Ariel Sharon 51
- Babilonia 15
- Bashir Gemayel 51-52
- Bishara al-Khuri 27, 29-30, 63, 65
- Bizantium 17
- Camile Chamoun 32, 46-48
- Doktrin Eisenhower 32
- Georges Catroux 29
- Fakhr al-Din 19-20
- Hizbullah 55, 76
- Ilyas sarkis 50
- Israel 40-43, 45, 49-53, 68,
- Kana'an 14-16
- Kemerdekaan Lebanon 30
- Khayr al-Din al-Ahdāb 27
- Konfesionalisme 1, 5, 7, 12-13, 24, 31, 35, 46, 60, 67
- Konsosionalisme 67
- LNM (*Lebanese National Movement*) 46, 48, 50
- Liga Arab 31, 41, 73
- LF (*Lebanese Front* atau *Jabhat al-Lubnaniyya*) 48, 53, 74
- Makedonia 16
- Mameluk 18
- Michel Amoun 57-58
- Mutaṣarrifiyyah* 25-26, 31, 60-62
- Nasserism 31, 43
- Nasserite 31, 43
- Ottoman/Utsmaniyah 19-25
- Pakta Nasional 1, 2, 5, 6, 30, 31-32, 35, 38, 56, 64-65, 66-67, 69-71;
- Sensus penduduk tahun 1932 38, 63
- PLO (*Palestine Liberation Organization*) 3, 32, 42, 46-47, 48
- Pan-Arab 31
- Pasukan Salib 17-18
- Pax Romana 16
- Perjanjian Konstantinopel 25
- Perjanjian London 26
- Perjanjian Sykes–Picot 26
- Persia 15
- Phalangis 28, 30, 44, 47-48, 51-52, 74
- Protein Corp 46-47
- PSP (*Progressive Social Party*) 28, 42, 53
- Romawi 16-17
- Sabra dan Shatila 52
- Shakib Effendi 24
- Qāim Maqām* 23-24, 59-60
- Taif Agreement* 4-6, 33, 36, 54-57, 66-78
- Triple Etente 25-26
- UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*) 51